

RINGKASAN

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa LKPD Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

LKPD Tahun 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

LKPD ini disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Laporan keuangan BUMD dan pihak-pihak terkait lain yang mengelola dan atau menguasai aset pemerintah daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi (LRA) menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Per 31 Desember 2020 dengan realisasinya meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang perhitungan anggaran.

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pendapatan	990.574.666.426,00	1.059.913.793.139,59	107,00%	1.094.367.497.996,59
PAD	222.765.883.426,00	248.944.404.487,59	111,75%	252.048.754.413,59
Transfer	748.409.183.000,00	790.939.408.652,00	105,68%	822.129.463.583,00

Lain-lain pendapatan yang sah	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00
Belanja	1.214.224.279.739,81	1.014.631.224.152,20	83,56%	1.148.496.711.114,00
Operasi	925.602.410.111,56	816.557.831.371,63	88,22%	839.925.171.507,94
Modal	200.671.333.488,41	191.011.897.074,57	95,19%	307.800.742.344,06
Belanja tak terduga	87.250.474.139,84	6.361.433.706,00	7,29%	118.877.262,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	651.920.000,00
Surplus (defisit)	(223.649.613.313,81)	45.282.568.987,39	(-20,25%)	(54.129.213.117,41)
Pembiayaan netto	223.649.613.318,81	223.650.613.313,81	100,00%	277.778.826.431,22
	SiLPA tahun berjalan	268.933.182.301,20		223.649.613.313,81

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan SAL awal, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sehingga menghasilkan saldo akhir SAL.

Perbandingan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
SAL Awal 1 Januari	223.649.613.313,81	279.278.826.431,22
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(223.649.613.313,81)	(279.278.826.431,22)
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	268.933.182.301,20	223.649.613.313,81
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00
SAL Akhir	268.933.182.301,20	223.649.613.313,81

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020. Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	299.326.026.589,46	285.335.480.231,43
Investasi	154.319.701.895,23	149.291.587.947,91
Aset Tetap	2.158.740.823.172,04	2.090.514.505.680,71
Aset Lainnya	136.105.403.920,97	133.599.726.413,40
JUMLAH ASET	2.748.491.955.577,70	2.658.741.300.273,45
Utang Lancar	12.481.370.812,44	16.882.059.880,05
Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Ekuitas	2.736.010.584.765,26	2.641.859.240.393,40
JUMLAH UTANG DAN EKUITAS	2.748.491.955.577,70	2.658.741.300.273,45

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Laporan Operasional
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4/3)
Pendapatan Operasional				
Pendapatan LO	1.038.819.489.605,08	1.110.057.262.889,84	(71.237.773.284,76)	(6,42%)
PAD LO	230.550.834.335,08	267.021.918.212,14	(36.820.437.672,89)	(13,79%)
Transfer LO	787.732.857.603,00	823.064.614.443,00	(35.331.756.840,00)	(4,29%)
Lain-lain pendapatan yang sah LO	20.535.797.667,00	19.970.730.234,70	(565.067.432,30)	(2,83%)
Beban	959.839.585.901,90	982.980.049.979,73	(23.140.464.077,83)	(2,35%)
Beban operasi	959.838.058.901,90	982.980.049.979,73	(23.141.991.077,83)	(2,35%)
Surplus (defisit) operasional	78.979.903.703,18	127.077.212.910,11	(48.097.309.206,93)	(37,85%)

Surplus (Defisit) Non Operasional				
Surplus non ops	0,00	0,00	0,00	0,00%
Defisit non ops	328.752.640,00	0,00	328.752.640,00	0,00%
Surplus (defisit) non operasional	328.752.640,00	0,00	328.752.640,00	0,00%
Surplus(defisit) sebelum luar biasa	78.651.151.063,18	127.077.212.910,11	(47.768.556.566,93)	(38,11%)
Pos Luar Biasa				
Pendapatan luar biasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban luar biasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban tdk terduga	35.257.900,00	118.877.262,00	(83.619.362,00)	(70,34)
Surplus (defisit) luar biasa	(35.257.900,00)	(118.877.262,00)	83.619.362,00	(0%)
Surplus (defisit) LO	78.615.893.163,18	126.958.335.648,11	(47.768.556.566,93)	(38,08%)

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Perbandingan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.
Laporan Arus Kas
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus kas masuk	1.059.785.795.640,59	1.094.367.497.996,59
Arus kas keluar	823.619.327.077,63	840.695.968.769,94
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	236.166.468.562,96	253.671.529.226,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus kas masuk	127.997.499,00	0,00
Arus kas keluar	191.011.897.074,57	309.300.742.344,06
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(190.883.899.575,57)	(309.300.742.344,06)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus kas masuk	1.000.000,00	0,00

Arus kas keluar	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.000.000,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus kas masuk	37.526.892.507,00	55.229.715.540,00
Arus kas keluar	37.575.884.248,00	55.274.987.799,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(48.991.741,00)	(45.272.259,00)
Kenaikan (penurunan) kas bersih selama periode	45.234.577.246,39	(55.674.485.376,41)
Saldo awal kas di kas daerah	203.192.165.987,48	257.960.619.602,94
Saldo awal kas BLUD Dinas Kesehatan	7.160.289.222,91	5.779.791.851,63
Saldo awal kas BLUD RSUD	11.466.239.616,67	14.145.086.994,01
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	2.117.000,00	7.068.400,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	96.484,46
Saldo Awal Kas Lainnya	1.828.801.486,75	1.386.163.098,18
Saldo Akhir Kas	268.933.182.301,20	223.698.605.054,81
Saldo Akhir Kas di BUD	230.933.573.980,02	203.192.165.987,48
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.810.000,00	2.117.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	0,00	3.838.600,00
Saldo Akhir Kas BLUD Dinas Kesehatan	6.899.779.814,16	7.160.289.222,91
Saldo Akhir Kas BLUD RSUD	29.262.961.668,85	11.462.401.016,67
Saldo Kas Lainnya Lainnya	1.835.056.838,17	1.877.793.227,75
SALDO AKHIR KAS DI KAS DAERAH	268.933.182.301,20	223.698.605.054,81

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan ekuitas akhir.

Tabel 6
Laporan Perubahan Ekuitas
 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas awal	2.641.859.240.394,40	2.513.300.240.126,40
Surplus (Defisit) LO	78.615.893.163,18	126.958.335.648,12
Lain-Lain	15.535.451.207,68	1.600.664.619,88
Ekuitas akhir	2.736.010.584.765,26	2.641.859.240.394,40

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga mengungkapkan pula kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN PERUBAHAN SAL

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2020 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2020

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2020

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2020.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2020.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Bab VII Penjelasan Pos-Pos Neraca

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab XI Informasi Non Keuangan

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2020 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

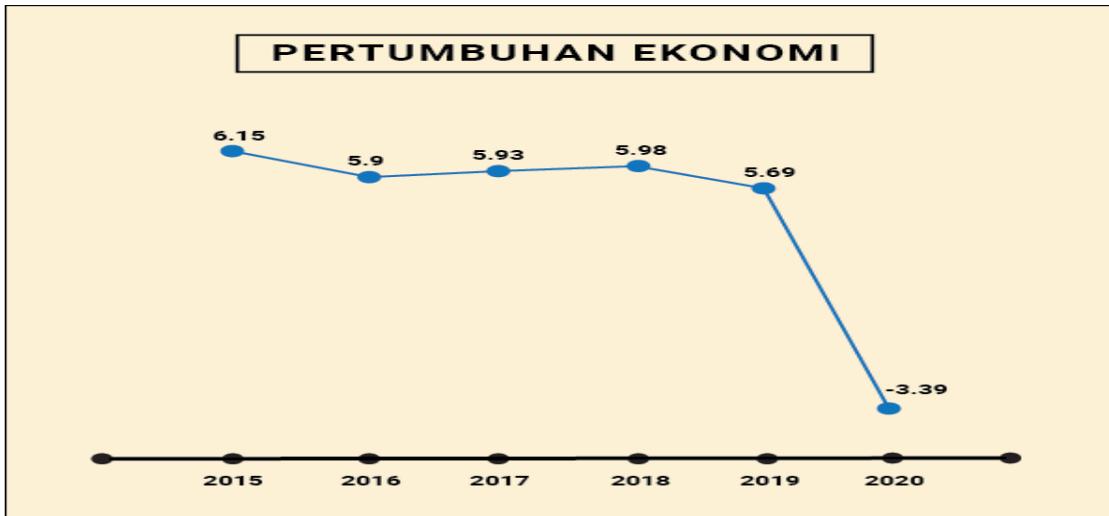
Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun mencerminkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

baik ADHB/Atas Harga Dasar Harga Berlaku maupun ADHK/Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2020 adalah sebesar -3,39, berarti mengalami kontraksi yang sangat dalam dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,69 atau mengalami penurunan yang sangat dalam sebesar -9,08, hal ini tidak bias dihindarkan dari pandemic Covid – 19 yang menyentuh sektor sosial dan ekonomi.

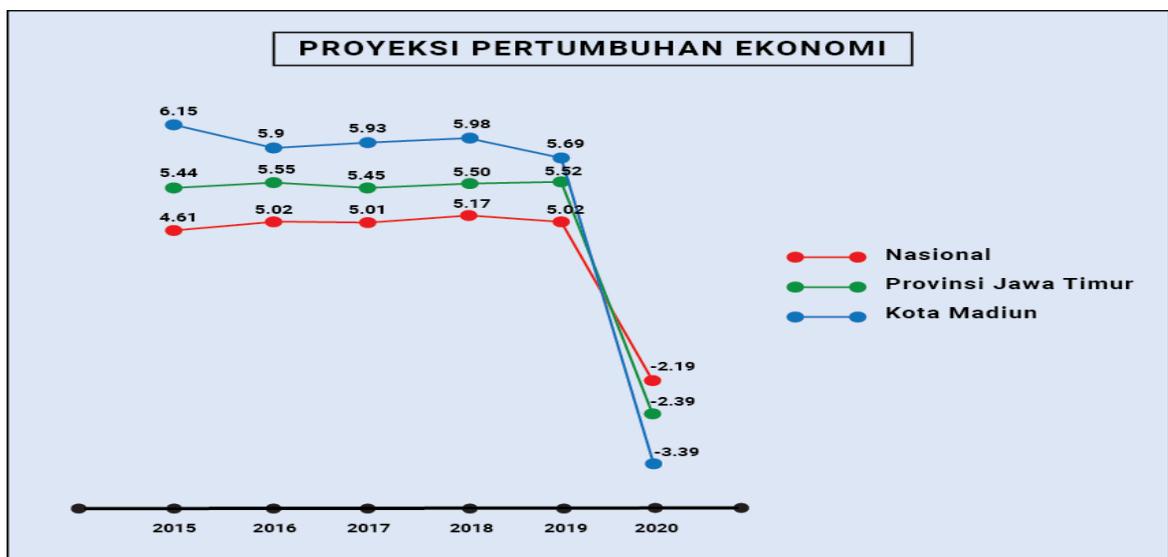
Gambar II. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 s.d 2020 (%)



Sumber :BPS Kota Madiun Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Gambar II.2
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun



Sumber : RKPD Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2015-2020 menunjukkan terjadi fluktuatif. Namun Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun berada pada angka 5,90 persen, akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kota madiun mengalami kenaikan sedikit sebesar 5,93, pada Tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan lagi yaitu sebesar 5,96. Sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan sedikit tetapi tetap lebih tinggi dari jawa timur maupun nasioal yaitu sebesar 5,69. Pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang sangat

dalam yaitu sebesar -3,39. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang lebih dalam dari pada nasional atau provinsi, hal ini menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 ternyata paling dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga mengalami kontraksi yang sangat dalam. Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2021 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut, dengan mempertimbangkan pandemic Covid-19 yang belum selesai secara sempurna.

2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dibawah ini.

Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2016 sampai tahun 2020 (Milyard)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2016	11.184,1	8.954,7	5,90
2017	12.111,2	9.486,1	5,93
2018	13.128,9	10.051,7	5,96
2019	14.107,3	10.623,8	5,69
2020	13.769,3	10.262,4	-3,39

Sumber: KUA Tahun2020*) Angka Sementara

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Terlihat dari nilai PDRB pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp11.184,1 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp8.954,7milyard, terus meningkat hingga mencapai Rp. 14.107,3 milyar untuk harga berlaku dan Rp 10.623,8 milyar untuk harga konstan pada tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 baik untuk berdasarkan harga konstan atau harga berlaku mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana untuk PDRB atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp. 10.262,4 (Milyard) dan untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 13,769,3 (milyard). Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar Rp 361,40 (Milyard), sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar Rp. 338,0 (Milyard).

Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s/d 2020 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,91	0,83	0,80	0,76	0,88
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,16	16,38	16,33	16,23	14,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22
6	Konstruksi	6,42	6,34	6,13	5,92	5,80

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	24,96	25,03	25,68	25,93	24,50
8	Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,37	3,43	3,54	3,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,74	4,85	5,00	4,80
10	Informasi dan Komunikasi	13,63	13,71	13,35	13,12	15,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,53	10,40	10,32	10,15	10,33
12	Real Estate	2,66	2,63	2,62	2,65	2,77
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,69	0,70	0,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,03	3,06	3,11	3,29
15	Jasa Pendidikan	7,72	7,62	7,45	7,57	8,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,29	1,31	1,34	1,54
17	Jasa Lainnya	3,70	3,63	3,65	3,68	3,45
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: RKPDTahun2022*) Angka Sementara

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 55,02%.

Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,85	0,79	0,76	0,71	0,82
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	17,35	17,68	17,86	17,69	15,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23
6	Konstruksi	6,40	6,38	6,14	6,09	6,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	23,24	23,21	23,56	23,68	2,18
8	Transportasi dan Pergudangan	2,90	2,97	3,04	3,11	3,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,89	4,96	5,11	5,27	5,01
10	Informasi dan Komunikasi	15,87	15,99	15,90	15,74	18,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,34	9,16	9,00	8,92	9,17

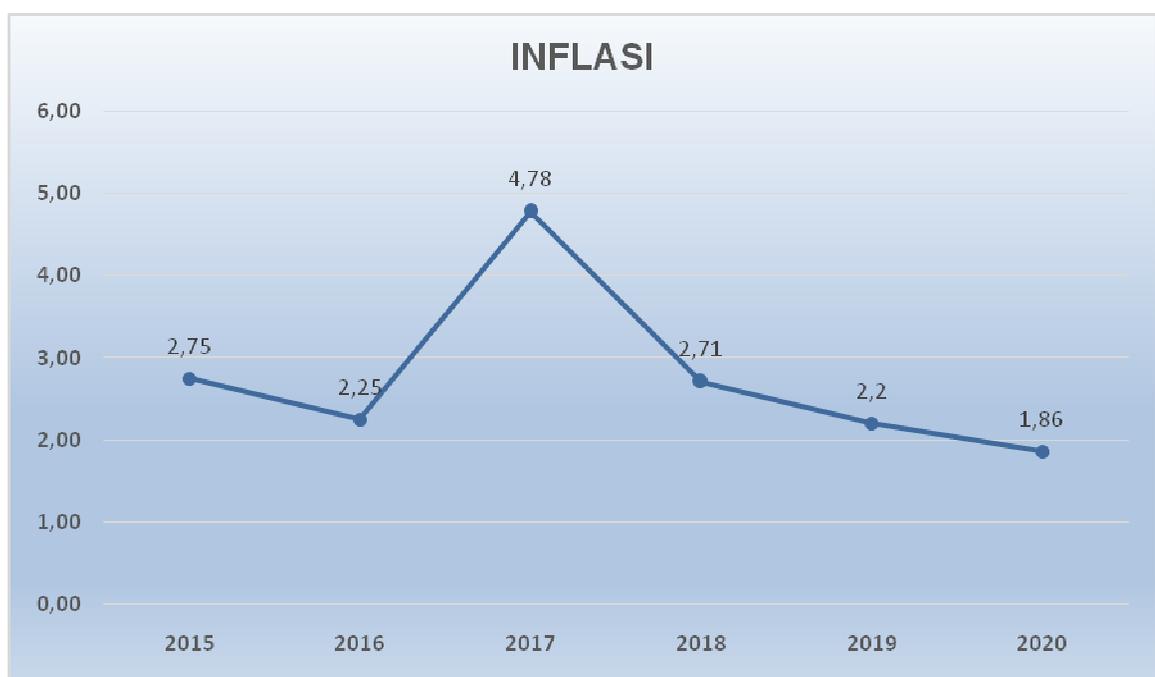
12	Real Estate	2,57	2,53	2,47	2,48	2,57
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,24	3,13	3,09	3,04	3,04
15	Jasa Pendidikan	7,32	7,22	7,10	7,24	7,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,27	1,29	1,31	1,50
17	Jasa Lainnya	3,72	3,66	3,65	3,69	3,41
PDRB		100	100	100	100	100

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2020 yaitu dari sektor Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, dan Jasa Keuangan. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 44.03%. Hal tersebut jauh berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berubah drastis akibat adanya Pandemi Covid - 19 di Kota Madiun dalam menopang perekonomian secara makro.

2.1.3. INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut.

Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2020



Sumber: RKPDTahun2021*) Angka Sementara

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi sempat mencapai 2,75 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2,25 persen sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 4,78 persen. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,71 persen, di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 2,20, dan di tahun 2020 angka inflasi sebesar 1,86 yang berarti inflasi di Kota Madiun cenderung berubah menuju deflasi akibat adanya ketimpangan supply - demand antara pasokan produksi dan kebutuhan konsumen akibat adanya pandemi Covid - 19.

2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus selain mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2020



Sumber: RKPD Tahun 2022

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,10 persen, pada akhir tahun 2016 mengalami kenaikan sedikit, menjadi 5,12 persen tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 4,26 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 4,26 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 4,26 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 4,26 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 4,26 persen.

mengalami penurunan yang signifikan lagi menjadi 3,85, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi 3,96. Sedangkan TPT tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 8.32 Berdasarkan pada data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun secara akumulatif kecenderungannya mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2016 dan 2019 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 angka pengangguran naik cukup signifikan diakibatkan kondisi ekonomi Kota Madiun yang mengalami kontraksi, hal itu linier dengan kondisi ekonomi makro nasional dan global yang juga mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid – 19 yang berimbas pada ekonomi lokal kota Madiun.

2.1.5. KEMISKINAN)

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2015-2020 dapat dilihat dibawah ini.

Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2015 – 2020



Sumber: RKPDTahun2022*) Angka sementara

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami trend yang naik, pada tahun 2017 penduduk miskin di Kota Madiun sebesar 4,94% atau mengalami penurunan kembali, sedangkan pada Tahun 2018 semakin mengalami penurunan menjadi 4,49%, pada akhir tahun 2019 angka inflasi kembali menunjukkan penurunan lagi menjadi 4,35. Sedangkan tahun 2020 angka kemiskinan terkerek naik cukup signifikan sebesar 4,98% yang disebabkan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi yang di akibatkan pandemi Covid – 19. Hal ini terjadi tidak hanya karena faktor lokal akan tetapi pengaruh regional, nasional bahkan global juga cukup besar. Pemerintah Kota Madiun sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020

Indeks	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
IPM	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88	80,91
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81
Indeks Pengetahuan	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,85
Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39	14,4
Rata-rata Lama Sekolah	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14
Indeks Pengeluaran	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	14.723	15,300	15.415	15,616	16,040	16,01

Sumber: RKPDTahun2022) Angka sementara*

IPM Kota Madiun pada Tahun 2020 mencapai 80,91 atau naik sebesar 0,03 poin dibanding Tahun 2019 yang mencapai 80,88. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

2.1.7. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN 2020

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian eksternal, karena kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Perkembangan kondisi perekonomian regional sangat terkait dengan kondisi perekonomian provinsi, nasional maupun dunia. Oleh karena itu, dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah tentunya harus memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah. Pemerintah Kota Madiun telah mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah yakni keterkaitan dengan kondisi perekonomian provinsi, nasional bahkan perekonomian global. Karena diyakini bahwa kondisi eksternal akan memiliki pengaruh pada perekonomian Kota Madiun.

Disamping itu adanya wabah pandemic Covid 19 sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi baik di tingkat daerah, regional maupun nasional. Pemerintah Kota Madiun juga tidak terlepas dari dampak tersebut dimana dalam struktur APBD mengalami refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka menangani dampak pandemic tersebut. Dengan adanya refocusing dan realokasi tersebut akan sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja yang di rencanakan, maka Kota Madiun juga melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, nasional dan provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2020 dapat dilihat dalam indikator ekonomi di bawah ini.

Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2020 – 2022

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,39	4,32	4,89
PDRB ADHB (juta rupiah)	13.769,29	14.382,54	14.962,46
PDRB ADHK (juta rupiah)	10.262,44-	10.583,47	10.947,19
PDRB per Kapita (juta rupiah)	77,62	79,65	82,83
TPT (%)	8,32	7,56	6,83
IPM	80,91	81,04	81,09
Inflasi (%)	1,86	4±1	4±1
Kemiskinan	4,98	4,76	4,52

Sumber: RKPDTahun2022

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan akan mencapai 4,32 dan 4,89 persen, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan karena adanya pandemi Covid 19 yang telah membuat kondisi ekonomi baik global, nasional, regional maupun daerah mengalami kontraksi sehingga mencapai titik keseimbangan baru pada level pertumbuhan ekonomi. Dengan level pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 diperkirakan menjadi 7,56 persen mengalami penurunan dari tahun 2020 karena karena diharapkan pada tahun 2022 terjadi recovery ekonomi yang di topang adanya program vaksinasi pemerintah yang akan menurunkan tingkat resiko ekonomi, sehingga angka TPT mengalami penurunan sampai angka 6,83 persen pada tahun 2021. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 di proyeksikan sebesar 81,04 dan terus meningkat sampai 81,09 pada tahun 2022. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan diperkirakan menjadi 4,76 pada Tahun 2021 seiring dengan berjalanya recovery ekonomi pada Tahun 2021.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid 19 dalam kegiatan sehari hari, karena tanpa hal itu semua kegiatan ekonomi menjadi percuma dan pandemi akan berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan resesi.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Pandemi Covid.

- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membukalampangkerjabaruuntukmengurangijumlahpengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatankemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

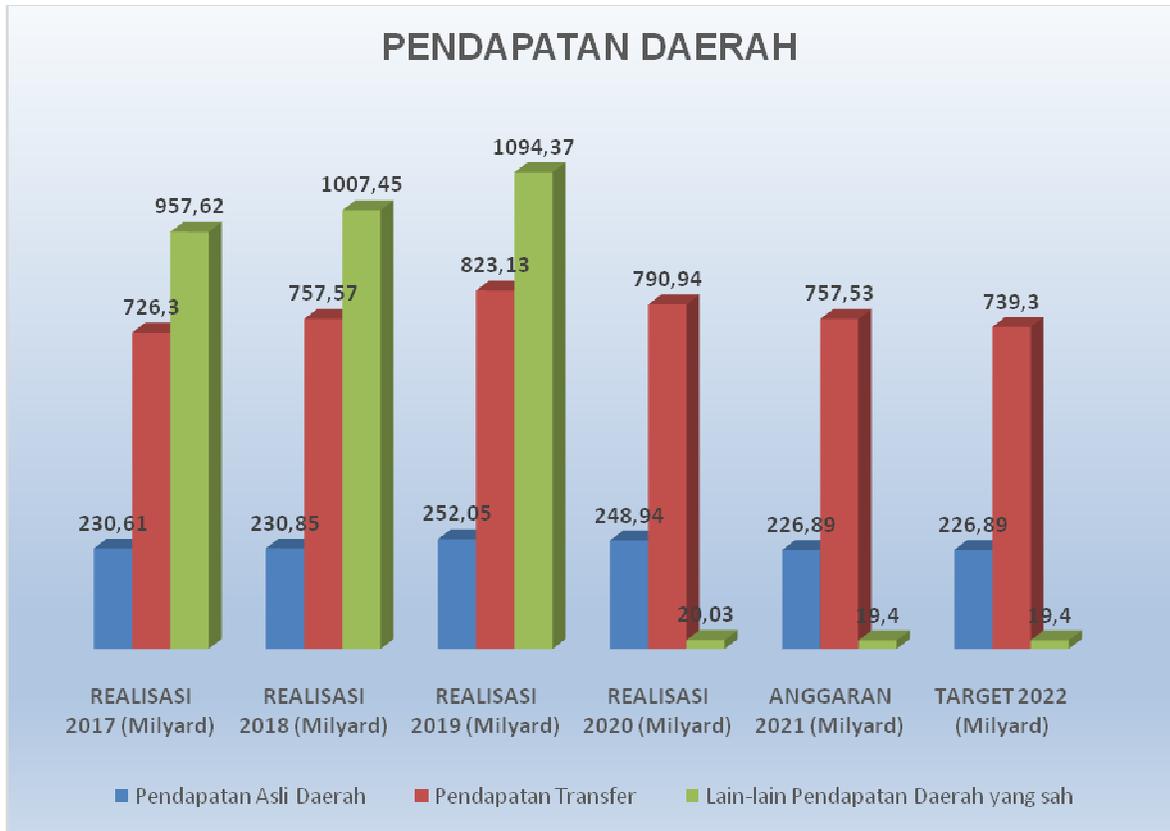
2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, selain itu otonomi daerah juga sebagai motivasi kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan pemerintah dan pembangunan yang dihadapi, utamanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah. Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam eriode 2017-2019 dan proyeksi 2020-2021 menunjukkan adanya tren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

2.2.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

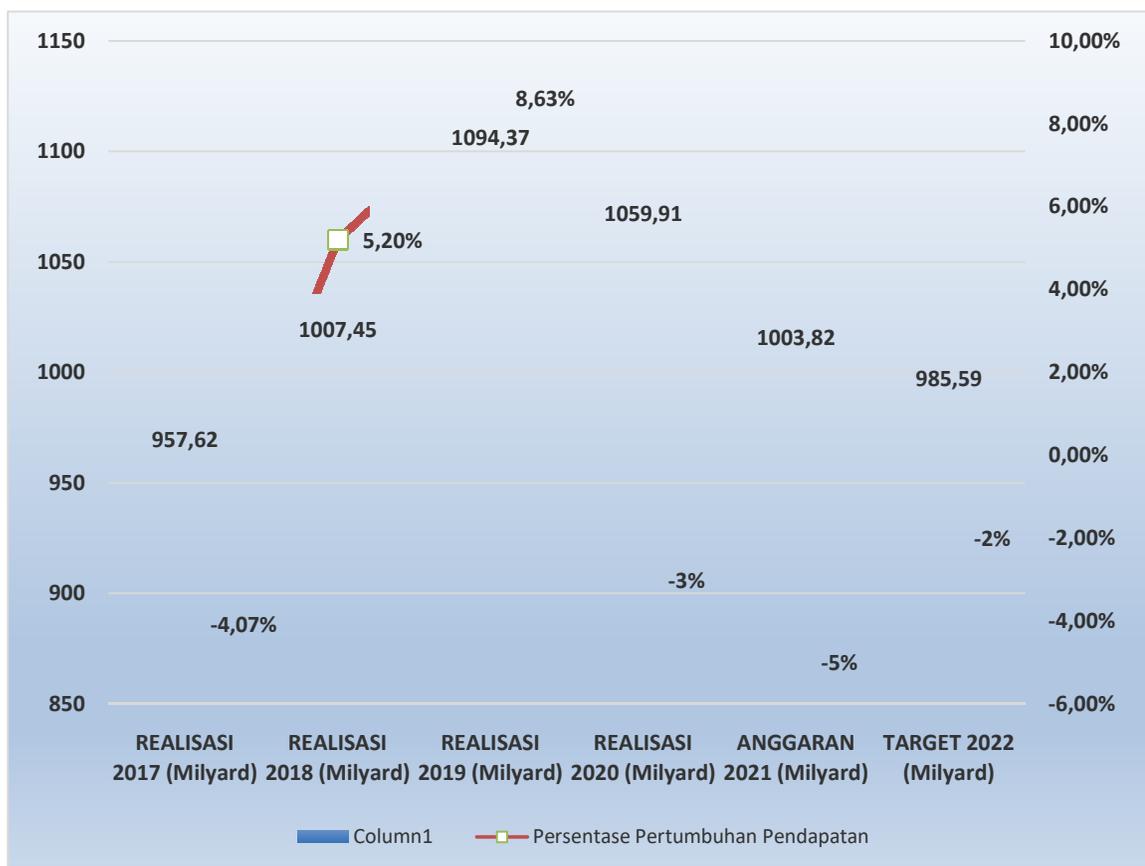


Su

mber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 4.1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2020, dan Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana perimbangan.



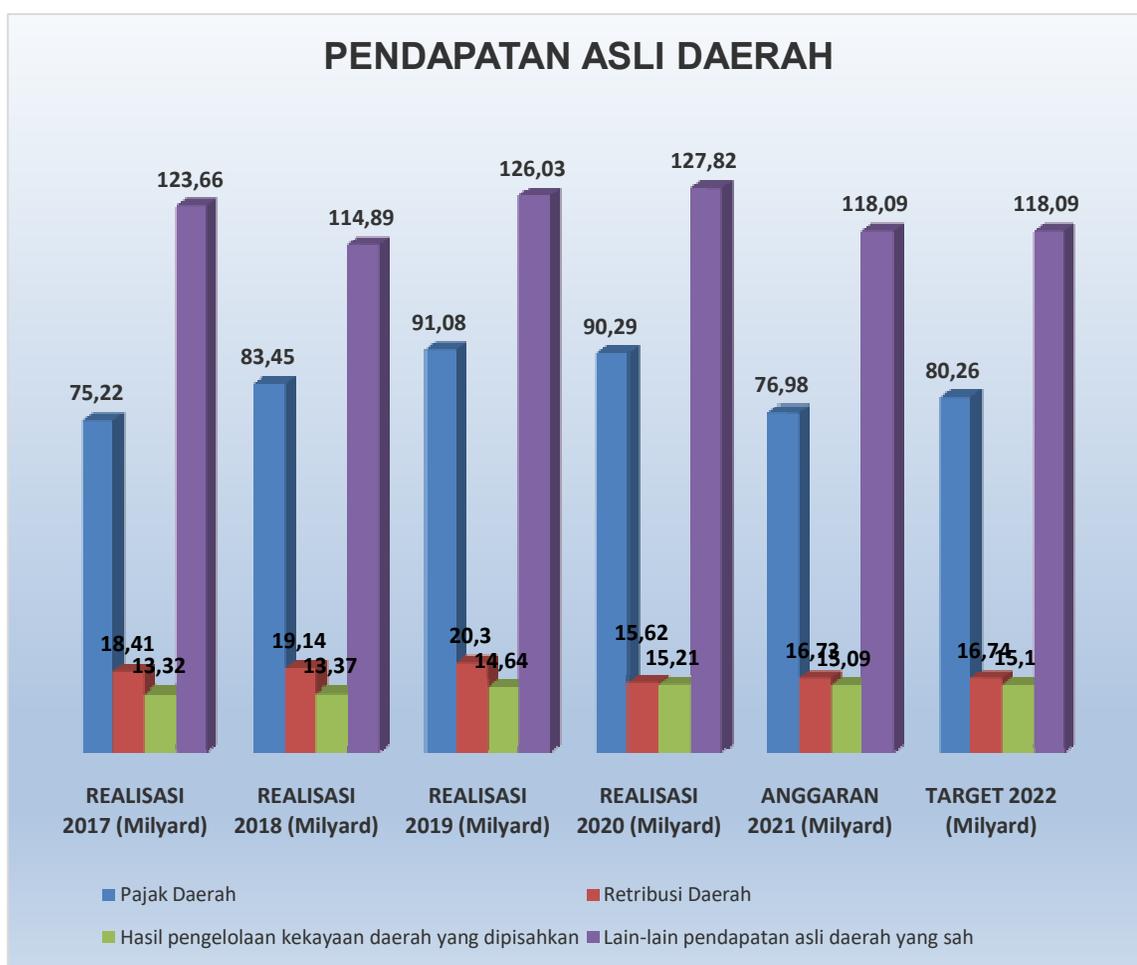
Su

mber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4. 2
 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2020,
 dan Target Tahun 2021

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2017 walaupun terjadi penurunan sebesar minus 4,07%, bahkan pada Tahun 2018 tumbuh lagi dengan kenaikannya sebesar 5,20% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 8,63%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,00%. Pada tahun rencana 2021 pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup signifikan ini terjadi akibat adanya pandemic Covid-19 menurun sebesar minus 5,00 %. Hal tersebut terjadi karena pendapatan yang mengalami penurunan adalah pendapatan dana transfer dan pendapatan asli daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 4. 3
 Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017– 2020
 dan Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan pendapatan asli daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017 Lain-Lain PAD yang Sah mendominasi pendapatan asli daerah, yang tahun sebelumnya didominasi oleh retribusi daerah. Selanjutnya pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 tetap didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah, karena BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

Mulai Tahun 2019 Dana Bos ada perubahan posting menjadi Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, komponen PAD Kota Madiun memiliki tren yang fluktuatif. Meskipun begitu, sampai tahun 2021 target PAD Kota Madiun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (tahun anggaran 2020) dimana pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar 235,59 milyar rupiah sedangkan pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 232,86 milyar rupiah.

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
PAJAK DAERAH	75.224.831.585,44	91.077.191.655,45	91.077.191.655,45	90.291.466.033,07	76.978.000.000,00	76.978.000.000,00
Pajak Hotel	4.974.716.454,00	6.194.574.076,00	6.626.179.761,00	4.372.533.671,20	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
Pajak Restoran	7.184.100.061,77	9.105.087.235,13	12.986.705.054,18	11.403.756.266,81	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
Pajak Hiburan	1.303.023.863,00	1.193.681.396,00	2.332.473.974,00	836.732.808,00	223.000.000,00	223.000.000,00
Pajak Reklame	2.774.982.703,00	2.786.643.986,33	1.837.373.634,87	1.928.783.033,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	18.503.214.981,13	19.722.287.098,64	20.627.903.089,64	20.664.839.579,46	19.300.000.000,00	19.300.000.000,00
Pajak Parkir	1.349.788.267,00	1.619.842.220,00	1.911.580.014,00	808.361.637,00	360.000.000,00	360.000.000,00
Pajak Air Tanah	302.830.125,54	314.745.611,31	330.002.129,20	329.465.566,00	264.000.000,00	264.000.000,00
BPHTB	20.375.963.778,00	21.964.631.908,00	23.753.115.140,56	27.567.526.535,00	20.001.000.000,00	20.001.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	18.456.211.352,00	20.553.210.830,00	20.671.858.858,00	22.379.466.936,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
RETRIBUSI DAERAH	18.407.218.016,50	19.142.589.648,50	20.301.325.919,00	15.619.539.719,00	16.731.224.667,00	16.731.224.667,00
Retribusi Jasa Umum	5.700.049.705,00	6.491.235.071,00	7.701.829.190,00	6.004.754.409,50	2.808.541.600,00	2.808.541.600,00
Retribusi Jasa Usaha	11.049.012.811,50	10.735.007.477,50	10.663.257.504,00	8.786.735.909,50	12.920.883.067,00	12.920.883.067,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.658.155.500,00	1.916.347.100,00	1.936.239.225,00	828.049.400,00	1.001.800.000,00	1.001.800.000,00

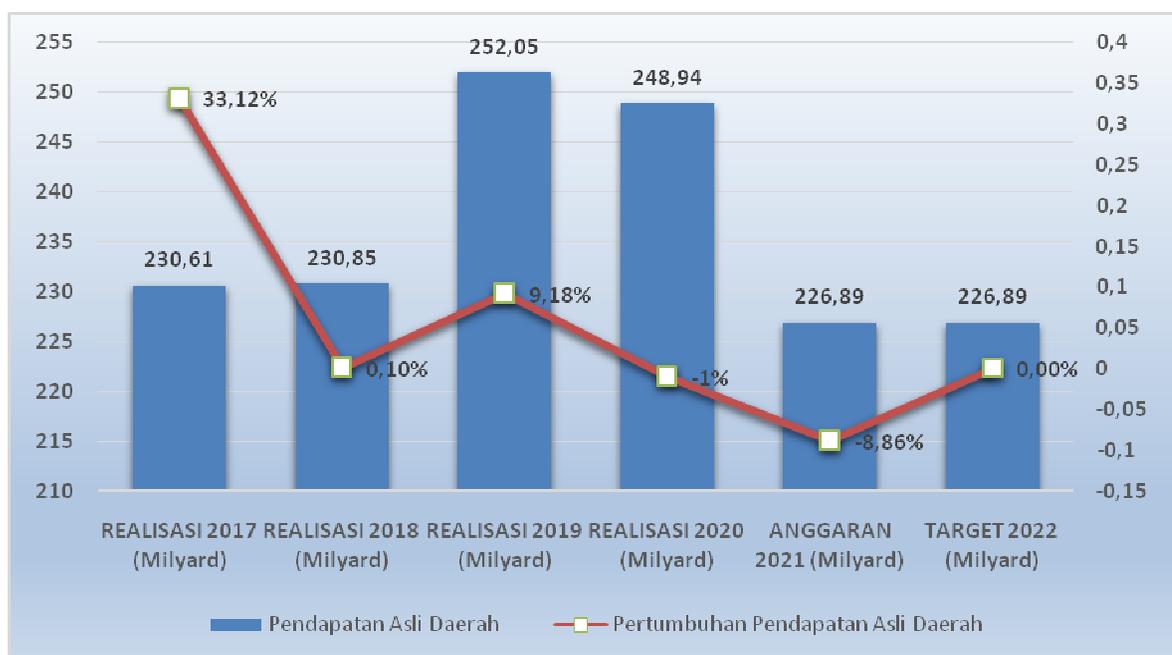
Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	13.320.249.415,28	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	15.092.455.426,00	15.092.455.426,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.469.677.821,00	7.453.161.342,89	8.527.026.057,05	8.754.363.181,00	8.630.550.045,00	8.630.550.045,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	6.114.685.283,50	6.461.905.381,40	6.461.905.381,00	6.461.905.381,00

Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	123.656.418.351,81	106.914.058.000,00	126.028.525.498,59	127.817.130.173,12	118.090.259.000,00	118.090.259.000,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	526.282.126,00	1.228.868.784,00	25.017.000,00	37.410.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	4.899.121.759,45	1.834.248.837,16	1.516.424.370,65	1.355.620.963,85	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	9.367.745.843,24	14.890.136.985,44	18.141.780.820,88	9.026.027.396,74	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.950.000,00	0,00	0,00	34.209.856,43	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	1.538.160.254,90	329.598.270,00	847.445.124,46	3.782.676,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	38.708.900,00	45.058.566,00	104.875.185,41	00,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.021.113,74	126.325.374,67	125.232.086,26	128.290.315,83	100.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	110.091.218,00	77.033.072,00	83.502.300,00	21.387.200,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	6.680.691.830,74	1.624.362.426,04	2.121.099.055,84	1.324.459.344,84	0,00	0,00
BLUD	80.473.662.542,47	94.906.050.027,92	103.063.149.555,09	115.885.942.419,43	107.490.259.000,00	107.490.259.000,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.

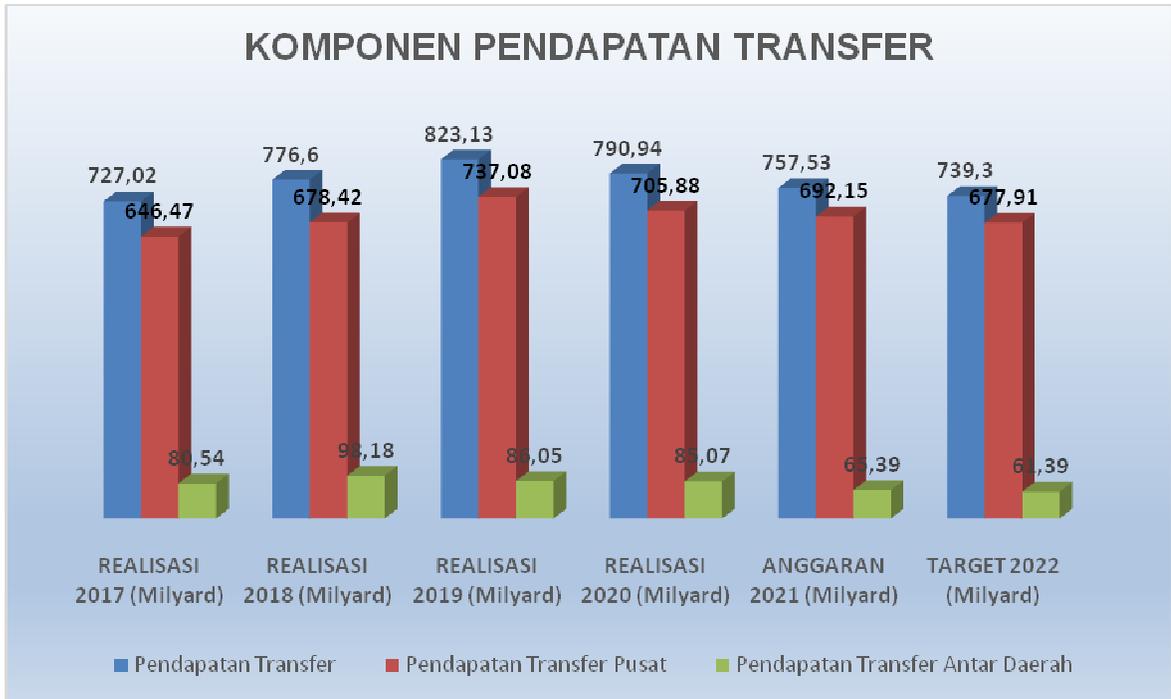


Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4. 4
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 – 2020, dan Target Tahun 2021

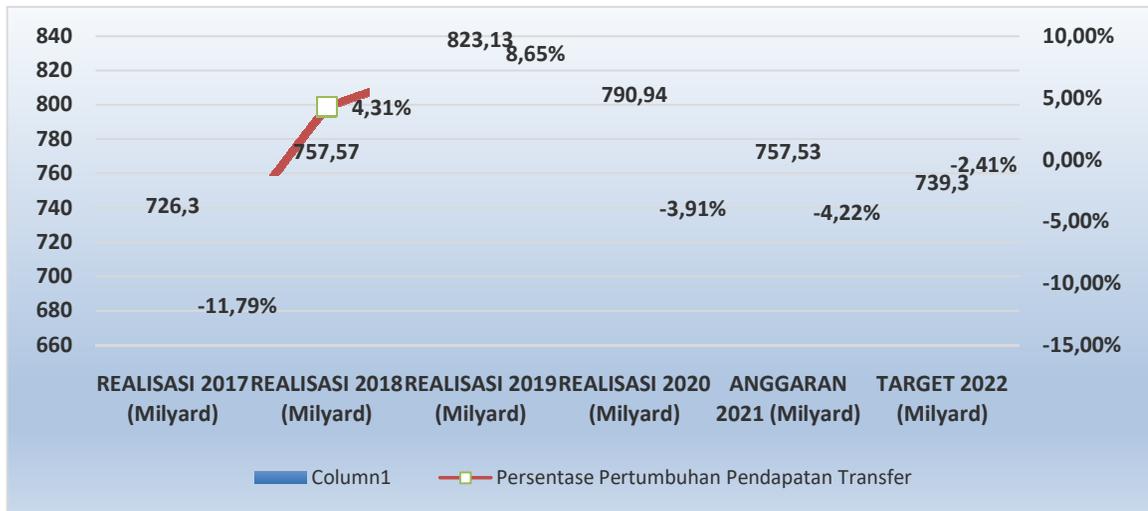
2. Dana Perimbangan

Dari gambar perkembangan pendapatan dana perimbangan Kota Madiun di bawah, terlihat bahwa dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.6
Persentase Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2017 – 2020,
dan Proyeksi Tahun 2021



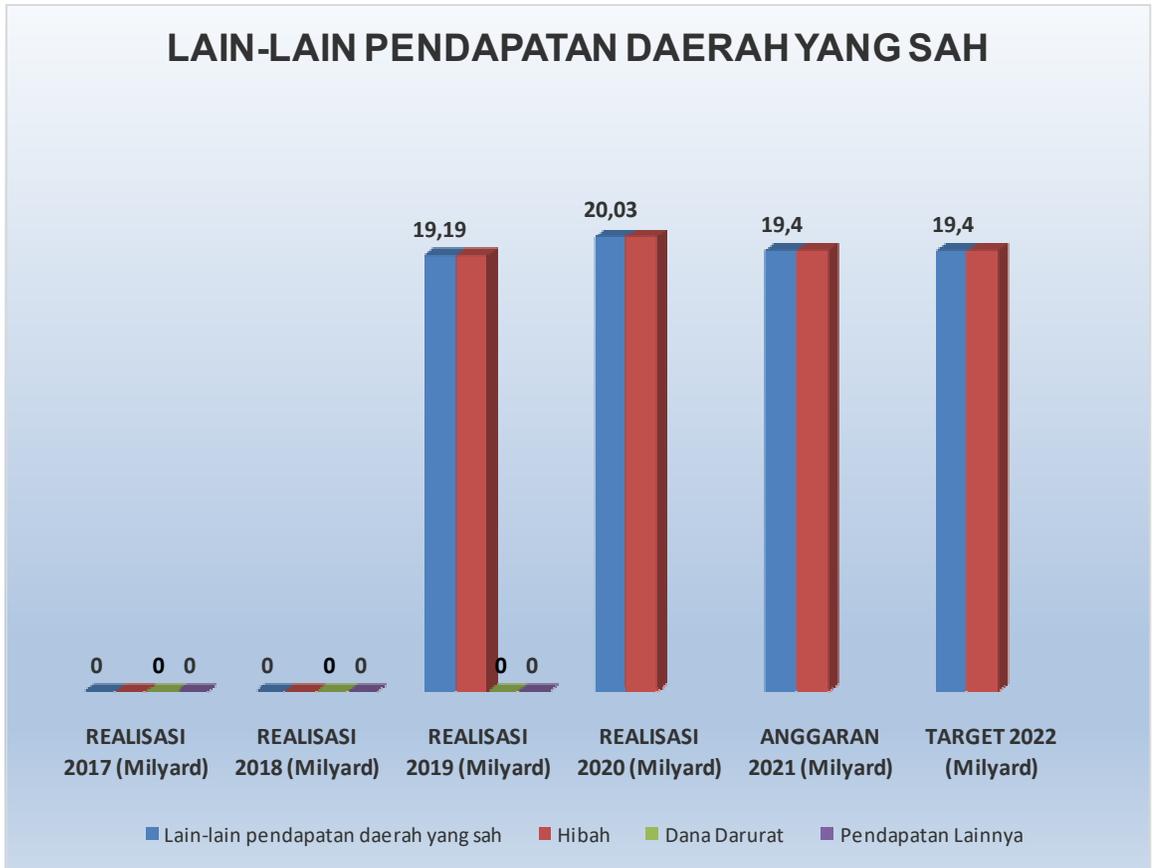
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.7
Persentase Pertumbuhan Dana Transfer Tahun 2017 – 2020,
dan Target Tahun 2021

Pendapatan Transfer masih merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Menandakan bahwa tingkat kemandirian Kota Madiun masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah komponen Pendapatan Transfer yang lebih besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah yang lain. Tren penerimaan Pendapatan Transfer mengalami fluktuatif dan penerimaan dana perimbangan tertinggi terjadi di Tahun 2016.

Pada tahun 2021 Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar 757.53 milyar, terjadi penurunan yang signifikan dari Anggaran 2020 yaitu sebesar 33,41 milyar dan jauh lebih kecil dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 790,94 milyar. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid 19 yang secara umum menurunkan penerimaan negara.

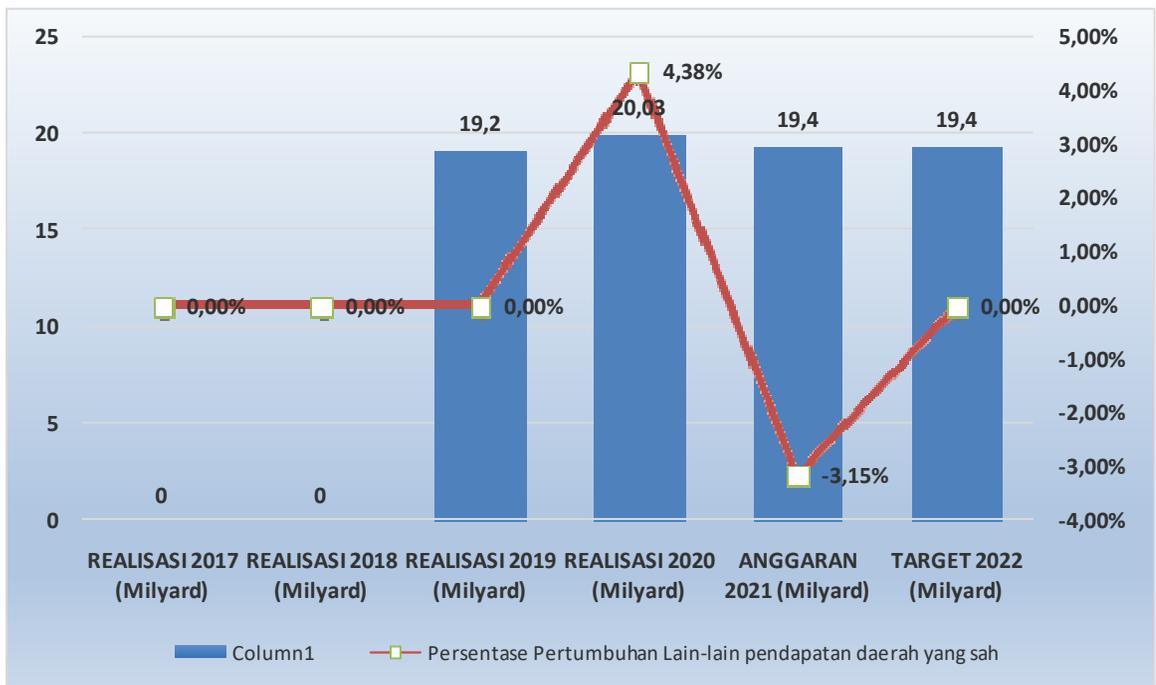
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.8
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 – 2020, dan Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana hibah mendominasi mulai Tahun 2019 sampai tahun 2021, hal ini disebabkan karena dana hibah merupakan dana hibah BOS.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.9
Persentase Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 – 2020, dan Target Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 19,40 milyar, sama dengan tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2020, karena anggaran ini bersifat mandatori dari pemerintah pusat.

Kebijakan Insentif Pajak Daerah

Dalam rangka menahan dampak ekonomi dari pandemi virus Corona (COVID-19), Pemerintah Kota Madiun memberikan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Kemudahan-kemudahan ini diberlakukan selama pandemi virus Corona (COVID-19) terjadi di Kota Madiun. Fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Madiun mulai dari perlindungan sosial, kesehatan hingga keringanan pajak. Pemberian fasilitas yang menyentuh dunia usaha dituangkan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemberian insentif diharapkan bisa membantu ruang keberlangsungan usaha selama pandemi virus corona (COVID-19) terjadi di Kota Madiun.

Kebijakan Insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud diberikan kepada:

- Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan Non PLN, Parkir, Reklame, Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- Insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. Penundaan Pembayaran;
 - b. Pengurangan Pajak;
 - c. Pengurangan sanksi administrasi berupa bunga; dan/atau
 - d. Penentuan kembali tanggal jatuh tempo
- Insentif pajak daerah kepada wajib pajak diberikan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah tahun pajak 2020 untuk masa pajak April, Mei dan Juni bagi semua pajak kecuali PBB Perkotaan

a. Penundaan Pembayaran

- Penundaan pembayaran diberikan kepada wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan Non PLN dan Wajib Pajak Parkir.
- Penundaan Pembayaran diberikan sampai dengan:
 - a. Tanggal 30 Juni 2020 untuk pembayaran masa pajak april dan mei ; dan
 - b. Tanggal 30 Juli 2020 untuk pembayaran masa pajak juni.

b. Pengurangan Pajak

- Pengurangan pajak diberikan kepada wajib pajak hotel, restoran dan wajib pajak parkir
- Pengurangan pajak diberikan :
 - a. sebesar 100% dari pajak yang seharusnya terutang untuk wajib pajak hotel dengan klasifikasi hotel non bintang, hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - b. sebesar 100% dari pajak yang seharusnya terutang untuk wajib pajak restoran dengan omzet sampai dengan Rp. 6.000.000,- per bulan berjalan;

- c. sebesar 50% dari pajak yang seharusnya terutang untuk wajib pajak restoran dengan omzet lebih dari Rp. 6.000.000,- per bulan sampai dengan Rp. 300.000.000,- per bulan berjalan; dan
- d. sebesar 50% dari pajak yang seharusnya terutang untuk wajib pajak parkir.

c. Pengurangan Sanksi Administrasi

- Insentif pajak daerah berupa pengurangan sanksi administrasi berupa bunga diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan;
- Pengurangan sanksi administrasi berupa bunga tersebut diberikan sebesar 100% dari sanksi administrasi berupa bunga yang seharusnya terutang; dan
- Pengurangan sanksi administrasi kepada wajib pajak bumi dan bangunan diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Salah satu implementasi dari Kebijakan Insentif tersebut, Pemerintah Kota Madiun telah memberikan insentif untuk Pajak Parkir dengan memberikan keringanan pada target setoran sehingga telah mengubah skema besaran pada kewajiban Pihak Ketiga dalam setoran Pajak Parkir yang telah ditetapkan.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai system pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan belanja dititik beratkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan system pelaporan yang akuntabel.

7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sector swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luarbiasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

2.3. TARGET KINERJA APBD

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 2020 pada setiap urusan pemerintahan.

2.3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini, Selain itu terbagi juga menjadi dua urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak pelayanan dasar.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat
6. UrusanSosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan LingkunganHidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana
8. Urusan Perhubungan
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Penanaman Modal

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13. Urusan Statistik
14. Urusan Persandian
15. Urusan Kebudayaan
16. Urusan Perpustakaan
17. Urusan Kearsipan

2.3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

2.3.3 URUSAN PENUNJANG

Urusan penunjang di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 8 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Unsur Staf (Sekretariat Daerah)
2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Perencanaan
5. Keuangan
6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8. Kecamatan

2.3.4. TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Pengungkapan Perubahan Anggaran:

Selama Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran terkaitrelokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Struktur APBD	APBD Murni (Rp)	Perkada No. 1 Tahun 2020 Tanggal 30 Januari 2020 (Rp)	Perkada No. 6 Tahun 2020 Tanggal 8 April 2020 (Rp)	Perkada No. 25 Tahun 2020 Tanggal 19 Juni 2020 (Rp)	Perkada No. 37 Tahun 2020 Tanggal 10 Agustus 2020 (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
Pendapatan:	1.056.906.304.000,00	1.056.906.304.000,00	1.075.628.869.000,00	975.494.259.140,00	991.484.849.140,00	990.574.666.426,00
PAD	235.504.941.000,00	235.504.941.000,00	235.504.941.000,00	222.856.453.140,00	222.856.453.140,00	222.765.883.426,00
Dana Transfer	802.001.763.000,00	802.001.763.000,00	820.724.328.000,00	733.238.206.000,00	749.228.796.000,00	748.409.183.000,00
Lain-LainPendapatan yang Sah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
Belanja	1.278.162.719.205,00	1.278.162.719.205,00	1.296.885.284.205,00	1.196.750.674.345,00	1.212.741.264.345,00	1.214.224.279.739,81
Belanja Pegawai	511.353.369.497,00	511.353.369.497,00	511.412.849.027,00	501.412.849.027,56	501.431.999.027,56	508.839.805.584,56
Belanja Barang	440.432.411.684,00	441.132.473.684,00	451.032.483.284,00	319.657.845.057,00	340.741.703.375,00	379.571.611.527,00
Belanja Modal	286.003.429.024,00	286.003.429.024,00	289.705.429.024,00	168.422.472.965,44	174.979.280.087,44	200.671.333.488,41
Belanja Hibah	15.562.452.000,00	14.862.390.000,00	16.648.692.000,00	16.648.692.000,00	16.648.692.000,00	16.845.547.000,00
Belanja Bansos	21.248.848.000,00	21.248.848.000,00	21.045.508.000,00	21.045.508.000,00	21.045.508.000,00	21.045.508.000,00
Belanja Tak Terduga	3.562.209.000,00	3.562.209.000,00	7.040.322.870,00	169.563.307.295,00	157.894.081.855,00	87.250.474.139,84
Pembiayaan Neto	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	223.649.613.313,81
SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebelum Penetapan APBD-Perubahan Tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan relokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penangan COVID-19 sebanyak 4 kali, yaitu :

a. Perkada Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 10 Januari 2020

Alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti hasil koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan kode rekeningnya. Sehingga tidak merubah Total Belanja maupun pendapatan hanya menyesuaikan koderekening.

b. Perkada Nomor 6 Tahun 2020, Tanggal, 8 April 2020

- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penambahan target anggaran Pendapatan Daerah;
- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan besaran jumlah anggarannya;
- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pergeseran alokasi anggaran untuk menambah pagu anggaran pada Kegiatan Peningkatan *Surveillance* Epidemiologi dan Imunisasi Tahun 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Madiun;
- Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa

Timur Tahun Anggaran 2020, perlu diadakan penambahan target anggaran pendapatan daerah;

Sehingga terjadi perubahan pada sisi pendapatan dan belanja.

c. Perkada Nomor 25 Tahun 2020, Tanggal 19 Juni 2020

- Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebarandan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran;
- Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian belanja daerah;
- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan belanja daerah.

Hal tersebut di atas menyebabkan perubahan lagi pada sisi pendapatan dan belanja.

d. Perkada Nomor 37 Tahun 2020, Tanggal 10 Agustus 2020

- bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020.

Hal ini juga yang menyebabkan perubahan lagi pada sisi pendapatan maupun belanja.

Selanjutnya, APBD-Perubahan Tahun 2020 telah mengakomodasi pelaksanaan relokasi dan refocusing anggaran tersebut beserta perubahan anggaran lainnya, yang terdiri dari:

a. Penurunan Target Pendapatan

Berkaitan dengan target pendapatan pada perubahan APBD terjadi penurunan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penurunan Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena kondisi pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi sehingga sangat berpengaruh pada PAD khususnya Pajak dan Retribusi Daerah. Disamping itu pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi juga tidak lepas dari dampak pandemic Covid-19 yang sangat berpengaruh di pendapatan negara.

b. Penurunan Anggaran Belanja

Pada sisi anggaran belanja terjadi juga penurunan belanja yang merupakan konsekuensi karena adanya penurunan pendapatan. Penurunan belanja terbesar terjadi di belanja modal dan belanja barang dan jasa, karena amanat refocusing dan realokasi dari pemerintah pusat adalah di kedua belanja tersebut.

c. Peningkatan Anggaran pembiayaan

Pada pembiayaan daerah terjadi penambahan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA, karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2020 SiLPA yang dipergunakan sebagai cuan adalah SiLPA sebelum audited, setelah di audited maka ada koreksi terjadi penambahan.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2020 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial
7. Urusan Tenaga Kerja
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Urusan Pangan
10. Urusan Pertanahan
11. Urusan Lingkungan Hidup
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Urusan Perhubungan
15. Urusan Komunikasi dan Informatika
16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Urusan Penanaman Modal
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
19. Urusan Statistik
20. Urusan Persandian

21. Urusan Kebudayaan
22. Urusan Perpustakaan
23. Urusan Kearsipan

3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi pemerintah Kota Madiun tahun 2020 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2020, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019 – 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Di antara capaian 24 (dua puluh empat) Indikator Sasaran pembangunan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 9 (sembilan) Indikator Sasaran yang tidak tercapai. Hal ini sudah merupakan capaian yang menggembirakan tetapi meskipun demikian perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi lebih baik terutama pada capaian indikator sasaran yang belum memenuhi target.

A. Permasalahan

Permasalahan tidak tercapainya 9 (sembilan) delapan indikator sasaran tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perubahan pola hidup baru dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti pelatihan tidak diperkenankan.
2. Data merupakan data proyeksi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun karena pengitungan data belum selesai/final
3. Terdapat realokasi anggaran maupun fokus kegiatan dengan mengutamakan mitigasi kebencanaan terhadap pandemi COVID-19 sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya terhambat dan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020

B. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Covid-19
2. Melaksanakan penyesuaian APBD dan perencanaan terkait dengan perubahan regulasi kebijakan pusat
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan dengan provinsi maupun pusat
4. Fokus terhadap program prioritas yaitu kelurahan mandiri, ekonomi kerakyatan dan pembangunan berbasis masyarakat
5. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di masa pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2020**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PENGHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1,	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun	Kemeterian Dalam Negeri
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masayarakat

		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Madiun	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Madiun	Kementerian PAN RB
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Madiun	BPK
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	Hasil Penilaian Keterisian data secara online dalam aplikasi Prodeskel Kemendagri	e_pedeskel Kemendagri
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 (I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{inc-dic})$	BPS
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Permukiman	(Indeks Perumahan Permukiman ((persentase rumah tinggal layak huni + persentase rumah tinggal bersanitasi + cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU) di bagi 3) + (Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman (Persentase RTH yang dikelola kondisi baik + Persentase Penerangan Jalan yang dikelola + Persentase Peningkatan Fasilitas Pemakaman) di bagi 3) di bagi 2)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Kinerja Ruas Jalan	Volume Lalulintas di bagi Kapasitas Jalan (kapasitas dasar di kali faktor penyesuaian hambatan samping di kali faktor penyesuaian hambatan kota di kali faktor penyesuaian pembagian arus di kali faktor penyesuaian lebar lajur)	Dinas Perhubungan
		Indeks Infrastruktur	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota yang Mantab (Panjang jalan kota kondisi mantap di bagi total panjang jalan kota di kali 100) + Persentase Kawasan Bebas Banjir/ Genangan ((Luas Kota Madiun)-(Luas Kawasan rawan banjir) dibagi Luas Kota Madiun dikali100) + Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Ketentuan (Jumlah Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik di bagi Jumlah seluruh bangunan gedung) dibagi 3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran air dikali 30% ditambah Indeks Pencemaran Udara dikali 30% ditambah Indeks tutupan Lahan dikali 40%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	Luas Wilayah Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRW dibagi dengan Total Luas Wilayah di kali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	Salah satu indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat	BPS
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	ukuran kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot 1/3)	BPS

8	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	Rasio Investasi terhadap Pertumbuhan PDRB (Realisasi Investasi tahun ini di bagi pertumbuhan Nilai PDRB tahun ini dikurangi pertumbuhan Nilai PDRB tahun sebelumnya)	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja x 100%	BPS
9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor perdagangan tahun ini di kurangi nilai PDRB sektor perdagangan tahun lalu di bagi nilai PDRB sektor perdagangan tahun lalu x 100%	BPS
		Pertumbuhan Sektor Pengolahan	Nilai PDRB Sektor Industri tahun ini di kurangi nilai PDRB sektor industri tahun lalu di bagi nilai PDRB sektor industri tahun lalu x 100%	BPS
		Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum tahun ini di kurangi nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum tahun lalu di bagi nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum tahun lalu x 100%	BPS
10	Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama di bagi konsumsi pangan utama	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

		Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(F_i - F_{i-1})$ <p>Dimana X_i dan X_{i-1} = komulatif proporsi penduduk atau rumah tangga pada record ke -i dan ke-(i-1) Dan F_i dan F_{i-1} = komulatif proporsi pengeluaran pada record ke -i dan ke-(i-1)</p>	BPS
11	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	Hasil Survei nilai persepsi kerukunan dengan 63 indikator	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Prestasi Pemuda dan Olah Raga ditingkat Regional dan Nasional	Jumlah Prestasi Pemuda dan Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
12	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	Total dari Nilai Persepsi Per Indikator di Bagi Total Indikator yang Terisi di Kali Nilai Rata-rata Terimbang	Satuan Polisi Pamong Praja



KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 6 Badan, 15 Dinas, 6 Bagian, dan 30 Kantor.

4.2 BASIS AKUNTANSI

- (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pengakuan atas pendapatan dan belanja yang didanai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- (08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

- (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.

- (12) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2.	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3.	Di atas 2 tahun	Macet	50%

- (13) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (14) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.
- (15) Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (16) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (17) Penggunaan penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
 - Penilaian investasi Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya tidak mempertimbangkan jumlah prosentase kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada point a sampai dengan d di atas.
- (18) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (19) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000.
- (20) Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilainya dibawah Rp500.000 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi tetap cukup dicatat dalam buku ekstra kompabel.
- (21) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (22) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- (23) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (24) Perkiraan masa manfaat aset tetap dan nilai sisa masing-masing kelompok aset mengikuti

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tida Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

- (25) Penambahan masa manfaat akan diterapkan jika OPD terkait mengajukan permohonan untuk diterapkan, jika belum atau tidak baik overhaul atau renovasi hanya akan menambah nilai aset definitif dan tidak menambah masa manfaatnya.
- (26) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (27) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun meliputi:
 - (28) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
 - (29) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - (30) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - (31) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
 - (32) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional
 - (33) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
 - (34) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas
 - (35) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
 - (36) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
 - (37) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
 - (38) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
 - (39) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
 - (40) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
 - (41) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

4.5 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

- (42) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- (43) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan termasuk yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Madiun.
- (44) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk

memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan 6 Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Oro-Oro Ombo, Puskesmas Patihan, Puskesmas Demangan, Puskesmas Banjarejo dan Puskesmas Tawangrejo.

- (45) Laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (46) Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

BAB
5

PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	222.765.883.426,00	248.944.404.487,59	111,75%	252.048.754.413,59

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp248.944.404.487,59 atau mencapai 111,75% yang berarti Rp26.178.521.061,59 atau 11,75% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp222.765.883.426,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2020 sebesar Rp248.944.404.487,59 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp252.048.754.413,59 terjadi penurunan sebesar Rp3.104.349.926,00 atau 1,23%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	76.350.000.000,00	90.291.466.033,37	118,26%	91.077.191.655,45
Retribusi Daerah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44%	20.301.325.919,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.092.455.426,00	15.216.268.562,40	100,82%	14.641.711.340,55
Lain-lain PAD yang sah	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59
Total	222.765.883.426,00	248.944.404.487,59	111,75%	252.048.754.413,59

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	76.350.000.000,00	90.291.466.033,07	118,26%	91.077.191.655,45

Realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp90.291.466.033,07 atau mencapai 118,26 % yang berarti Rp13.941.466.033,07 atau 18,26% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp76.350.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp90.291.466.033,07 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 Rp91.077.191.655,45 terjadi penurunan sebesar Rp785.725.622,38 atau 0,86%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.
Pajak Daerah**

Pajak Daerah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Pajak hotel	3.608.000.000,00	4.372.533.671,20	121,19%	6.626.179.761,00
2. Pajak restoran	10.100.000.000,00	11.403.756.266,81	112,91%	12.986.705.054,18
3. Pajak hiburan	737.000.000,00	836.732.808,00	113,53%	2.332.473.974,00
4. Pajak reklame	1.530.000.000,00	1.928.783.033,00	126,06%	1.837.373.634,87
5. Pajak penerangan	19.600.000.000,00	20.664.839.579,46	105,43%	20.627.903.089,64
6. Pajak parkir	750.000.000,00	808.361.637,00	107,78%	1.911.580.014,00
7. Pajak air tanah	275.000.000,00	329.465.566,60	119,81%	330.002.129,20
8. BPHTB	21.500.000.000,00	27.567.526.535,00	128,22%	23.753.115.140,56
9. PBB	18.250.000.000,00	22.379.466.936,00	122,63%	20.671.858.858,00
Total	76.350.000.000,00	90.291.466.033,07	118,26%	91.077.191.655,45

1. Realisasi pajak hotel sebesar Rp4.372.533.671,20 atau mencapai 121,19% yang berarti Rp764.533.671,20 atau 21,19% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.608.000.000,00.

Perincian realisasi pajak hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.1
Pajak Hotel**

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	24.765.560,00	11.947.060,00	48,24%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	4.365.228.091,20	4.360.586.611,20	99,89%
Total	4.389.993.651,20	4.372.533.671,20	99,60%

Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.372.533.671,20 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp6.626.179.761,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp2.253.646.089,80 atau 34,01%.

2. Realisasi pajak restoran sebesar Rp11.403.756.266,81 atau mencapai 112,91 % yang berarti Rp1.303.756.266,81 atau 12,91% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.100.000.000,00.

Perincian realisasi pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.2
Pajak Restoran

Pajak Restoran	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	93.601.832,00	22.541.332,00	24,08%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	11.479.252.099,81	11.381.214.934,81	99,15%
Total	11.572.853.931,81	11.403.756.266,81	98,54%

Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2020 sebesar 11.403.756.266,81 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp12.986.705.054,18 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.582.948.787,37 atau 12,19%.

3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2020 sebesar Rp836.732.808,00 atau mencapai 113,53% yang berarti Rp99.732.808,00 atau 13,53% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp737.000.000,00.

Perincian realisasi pajak hiburan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.3
Pajak Hiburan

Pajak Hiburan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	36.287.250,00	21.722.250,00	59,86%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	827.689.008,00	815.010.558,00	98,47%
Total	863.976.258,00	836.732.808,00	96,85%

Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2020 sebesar Rp836.732.808,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp2.332.473.974,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.495.741.166,00 atau 64,13%. Masa pandemi covid19 menyebabkan pajak hiburan turun dratis karena tidak boleh beroperasi.

4. Realisasi pajak reklame sebesar Rp1.928.783.033,00 atau mencapai 126,06% yang berarti sebesar Rp398.783.033,00 atau 26,06% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.530.000.000,00.

Perincian realisasi pajak reklame untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.4
Pajak Reklame**

Pajak Reklame	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	108.259.580,00	78.140.120,00	72,18%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	1.912.823.168,00	1.850.642.913,00	96,75%
Total	2.021.082.748,00	1.928.783.033,00	95,43%

Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.928.783.033,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2019 sebesar Rp1.837.373.634,87 atau terjadi peningkatan sebesar Rp91.409.398,13 atau 4,98%.

5. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp20.664.839.579,46 atau mencapai 105,43% yang berarti Rp1.064.839.579,46 atau 5,43% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.600.000.000,00.

Perincian realisasi pajak penerangan jalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.5
Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	1.916.114.552,82	1.916.114.552,82	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	18.748.724.909,14	18.748.725.026,64	110,22%
Total	20.664.839.461,96	20.664.839.579,46	100%

Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.664.839.579,46 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2019 sebesar Rp20.627.903.089,64 atau terjadi peningkatan sebesar Rp36.936.489,82 atau 0,18%.

6. Realisasi pajak parkir sebesar Rp808.361.637,00 atau mencapai 107,78% yang berarti Rp58.361.637,00 atau 7,78% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp750.000.000,00.

Perincian realisasi pajak parkir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.6
Pajak Parkir

Pajak Parkir	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	750.000,00	750.000,00	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	830.758.304,00	807.611.637,00	97,24%
Total	831.508.304,00	808.361.637,00	97,24%

Pencapaian pajak parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2020 sebesar Rp808.361.637,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2019 sebesar Rp1.911.580.014,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.103.218.377,00 atau 57.71%.

7. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp329.465.566,60 atau mencapai 119,81% yang berarti Rp54.465.566,60 atau 19,81% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp275.000.000,00.

Perincian realisasi pajak air tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.7
Pajak Air Tanah

Pajak Air tanah	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	29.180,00	0,00	0%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	329.489.031,60	329.465.546,60	99,99%
Total	329.518.211,60	329.465.566,60	99,98%

Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp329.465.566,60 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2019 sebesar Rp330.002.129,20 terjadi penurunan sebesar Rp536.562,60 atau 0.16%.

8. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp27.567.526.535,00 atau mencapai 128,22% yang berarti Rp6.067.526.535,00 atau 28,22% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp21.500.000.000,00.

Perincian realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.8
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	27.567.526.535,00	27.567.526.535,00	100%
Total	27.567.526.535,00	27.567.526.535,00	100%

Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp27.567.526.535,00 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp23.753.115.140,56 atau terjadi peningkatan sebesar Rp3.814.411.394,44 atau 16,06%.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22.379.466.936,00 atau mencapai 122,63% yang berarti Rp4.129.466.936,00 atau 22,63% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp18.250.000.000,00.

Perincian realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.9
Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	7.655.170.056,00	1.421.963.475,00	14,17%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	24.732.653.246,00	20.957.503.461,00	62,79%
Total	32.387.823.302,00	22.379.466.936,00	58,56%

Pencapaian target kinerja PBB dipengaruhi adanya peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan petugas penagih piutang PBB sampai dengan tahun 2020

Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2020 sebesar Rp22.379.466.936,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2019 sebesar Rp20.671.858.858,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.707.608.078,00 atau 8,26%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44%	20.301.325.919,00

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp15.619.539.719,00 atau 98,44% yang berarti Rp248.119.281,00 atau 1,56% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.867.659.000,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2020 sebesar Rp15.619.539.719,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.301.325.919,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.681.786.200,00 atau lebih rendah sebesar 23,06%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	6.518.635.000,00	6.004.754.409,50	92,12%	7.701.829.190,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	8.347.224.000,00	8.786.735.909,50	105,27%	10.663.257.504,00
4.1.2.03. Perizinan tertentu	1.001.800.000,00	828.049.400,00	82,66%	1.936.239.225,00
Jumlah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44 %	20.301.325.919,00

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji dibawah ini.

1. 4.1.2.01	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Jasa Umum	6.518.635.000,00	6.004.754.409,50	92,12 %	7.701.829.190,00
a. 4.1.2.01.02.				
Retribusi Pelayanan Persampahan/	136.803.000,00	176.011.500,00	128,66%	227.944.000,00
Dinas lingkungan Hidup	136.803.000,00	176.011.500,00	128,66%	227.944.000,00

➤ **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp176.011.500,00 atau mencapai 128,66 % yang berarti Rp39.208.500,00 atau 28,66% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp136.803.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp176.011.500,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019 sebesar Rp 227.944.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp51.932.500,00 atau 22,78%.

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
---------------	----------------	---	----------------

b.4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<u>1.880.250.000,00</u>	<u>1.483.688.612,50</u>	<u>78,89%</u>	<u>2.761.329.000,00</u>
Dinas Perhubungan	1.880.250.000,00	1.483.381.612,50	78,89%	2.761.329.000,00
	<u>1.880.250.000,00</u>	<u>1.483.688.612,50</u>	<u>78,89%</u>	<u>2.761.329.000,00</u>

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.483.381.612,50 atau mencapai 21,11% yang berarti Rp396.868.387,50 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.880.250.000,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.483.381.612,50 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebesar Rp2.761.329.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.277.947.387,50 atau 46,28 %. Hal ini disebabkan penurunan jumlah kunjungan ke pusat perdagangan dan wisata di kota Madiun karena kondisi wabah covid-19 yang ditetapkan menjadi bencana nasional sehingga menyebabkan penurunan di segala bidang aktivitas utamanya perdagangan dan wisata yang memberlakukan pembatasan aktivitas usaha dan jam operasi di kota Madiun.

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
c.4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar	<u>3.810.190.000,00</u>	<u>3.565.623.620,00</u>	<u>93,58%</u>	<u>4.170.236.890,00</u>
Dinas Perdagangan	3.810.190.000,00	3.565.623.620,00	93,58%	4.170.236.890,00
	<u>3.810.190.000,00</u>	<u>3.565.623.620,00</u>	<u>93,58%</u>	<u>4.170.236.890,00</u>
	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
d.4.1.2.02.09 Retribusi Ulang Tera	<u>61.060.000,00</u>	<u>66.236.980,00</u>	<u>108,48%</u>	<u>67.322.500,00</u>
Dinas Perdagangan	61.060.000,00	66.236.980,00	108,48%	67.322.500,00
	<u>61.060.000,00</u>	<u>66.236.980,00</u>	<u>108,48%</u>	<u>67.322.500,00</u>

➤ **Dinas Perdagangan**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.565.623.620,00 atau mencapai 93,58% yang berarti atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3.810.190.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.565.623.620,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 4.170.236.890,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp604.613.270,00 atau 14,50 %. Hal ini disebabkan karena kondisi wabah covid-19 yang kemudian ditetapkan menjadi bencana nasional sehingga menyebabkan penurunan aktivitas di segala bidang utamanya perdagangan dan wisata yang memberlakukan pembatasan aktivitas usaha dan jam operasi di kota Madiun.
- ☑ Realisasi retribusi ulang tera sebesar Rp66.236.980,00 atau mencapai 108,48% yang berarti Rp5.176.980,00 atau 8,48% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp61.060.000,00. dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar tahun 2019 sebesar Rp67.322.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.085.520,00 atau 1,61%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.

f. 4.1.2.01.10

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	<u>156.332.000,00</u>	<u>207.139.897,00</u>	<u>132,50%</u>	<u>0,00</u>
Dinas Komunikasi dan Informatika	156.332.000,00	207.139.897,00	132,50%	0,00

➤ **Dinas Komunikasi dan Informatika**

- ☑ Realisasi retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp207.139.897,00 atau mencapai 132,50% yang berarti Rp50.807.897,00 atau 32,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp156.332.000,00.

e. 4.1.2.01.07

Retribusi Pengujian Kendaraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	<u>474.000.000,00</u>	<u>506.360.800,00</u>	<u>106,83</u>	<u>474.996.800,00</u>
Dinas Perhubungan	474.000.000,00	506.360.800,00	106,83	474.996.800,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp506.360.800,00 atau mencapai 106,83% yang berarti Rp32.360.800,00 atau 6,83% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp474.000.000,00.

Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2020 sebesar Rp506.360.800,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp474.996.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp31.364.000,00 atau 6,60 %.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Jasa Usaha	<u>8.347.224.000,00</u>	<u>8.786.735.909,50</u>	<u>105,27 %</u>	<u>10.663.257.504,00</u>
a. 1.2.02.01				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<u>7.023.356.000,00</u>	<u>7.210.792.116,50</u>	<u>102,67%</u>	<u>8.442.093.638,00</u>
Dinas Perkerjaan Umum	10.000.000,00	10.005.000,00	100,05	543.010.000,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda & Olah Raga	150.000.000,00	254.625.000,00	169,75%	0,00
Dinas Perhubungan	30.000.000,00	51.079.740,00	170,27%	51.124.800,00
Badan Kepegawaian	70.000.000,00	96.875.000,00	138,39%	325.125.000,00
BPKAD	4.187.200.000,00	3.883.245.156,50	92,74%	4.635.854.533,00
Kec. Kartoharjo	1.200.000.000,00	1.307.796.690,00	108,98%	1.332.168.820,00
Kec. Manguharjo	647.000.000,00	659.221.080,00	101,89%	646.240.455,00
Kec. Taman	700.000.000,00	918.887.850,00	131,27%	886.804.230,00
Dinas Pertanian	29.067.000,00	29.056.600,00	99,96%	21.765.800,00

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 10.005.000,00 atau mencapai 100,05% yang berarti Rp5.000,00 atau 0,05,% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 10.005.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp543.010.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp533.005.000,00 atau 98,16%. Hal ini dikarenakan adanya reklas realisasi asrama haji ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

➤ **Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp254.625.000,00 atau mencapai 169,75% yang berarti Rp104.625.000,00 atau 69,75% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya reklas dari realisasi arsrama haji yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum beralih ke dinas kebudayaan, pariwisata, kebudayaan dan olah raga.

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp51.079.740,00 atau mencapai 170,27% yang berarti Rp21.079.740,00 atau 70,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp51.079.740,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp51.124.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp45.060,00 atau 0,09 %.

➤ **Badan Kepegawaian**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.96.875.000,00 atau mencapai 138,39% yang berarti Rp.26.875.000,00 atau lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp70.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.96.875.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp325.125.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp.228.250.000,00 atau 70,20%.

➤ **BPKAD**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp3.883.245.156,50 atau mencapai 92,74% yang berarti Rp 304.043.843,50 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.187.200.000,00. Realisasi ini terdiri atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT). Pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.883.245.156,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp4.635.854.533,00 atau terjadi Penurunan sebesar Rp752.609.376,50 atau 16,23%. Hal ini disebabkan kontribusi tetap di tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.250.000.000,00 dari Plaza Lawu Madiun yang dikelola oleh PT Sri Tanjung Megatama yang seharusnya dibayar pada tanggal 28 Desember 2020 belum terbayarkan dengan alasan pandemi covid.

➤ **Kecamatan Kartoharjo**

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan kartoharjo sebesar Rp1.307.796.690,00 atau mencapai 108,98% yang berarti Rp107.796.690,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.200.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp. 1.301.796.690,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.307.796.690,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp1.332.168.820,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp24.372.130,00 atau 1,83%.

➤ **Kecamatan Manguharjo**

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan manguharjo sebesar Rp659.221.080,00 atau mencapai 101,89% yang berarti Rp12.221.080,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp647.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan manguharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp4.500.000,00. dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp.654.721.080,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp659.221.080,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp646.240.455,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp12.980.625,00 atau 2,01%.

➤ **Kecamatan Taman**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan taman sebesar Rp918.887.850.000,00 atau mencapai 131,27% yang berarti Rp218.887.850,00 atau 31,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp700.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan taman berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp.912.887.850,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp918.887.850,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp886.804.230,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp32.083.620,00 atau 3,62%.

➤ **Dinas Pertanian**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pertanian sebesar Rp29.056.600,00 atau mencapai 99,96% yang berarti Rp10.400,00 atau 0,04% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.056.600,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp21.765.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7.290.800,00 atau 33,50%.

c.4.1.2.02.04Retribusi Tempat Khusus Parkir	Anggaran2020	Realisasi 2020		Realisasi 2020
	550.000.000,00	751.334.000,00	136,61%	992.301.956,00
Dinas Perhubungan	550.000.000,00	751.334.000,00	136,61 %	992.301.956,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp751.334.000,00 atau mencapai 136,61% yang berarti Rp201.334.000,00 atau 36,61% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp550.000.000,00. Realisasi ini sesuai potensi riil. Retribusi tempat khusus parkir meliputi lahan parkir parkir Sumber Umis. Hal ini sesuai dengan potensi riil.

Realisasi tempat parkir khusus tahun anggaran 2020 sebesar Rp751.334.000,00 dibandingkan dengan realisasi tempat parkir khusus tahun 2019 sebesar Rp992.301.956,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp240.967.956,00 atau 24,28 %.

d. 4.1.2.02.05 Retribusi Rumah Potong Hewan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
	37.400.000,00	37.110.000,00	99,22%	40.418.000,00
Dinas Pertanian	37.400.000,00	37.110.000,00	99,22%	40.418.000,00

➤ **Dinas Pertanian**

- ☑ Realisasi retribusi rumah potong hewan sebesar Rp 37.110.000,00 atau mencapai 99,22% yang berarti Rp290.000,00 0,78% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.37.400.000,00.

Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.110.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2019 sebesar Rp40.418.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.308.000,00 atau 8,18%.

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
e.4.1.2.02.06 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<u>736.468.000,00</u>	<u>787.499.793,00</u>	<u>106,93%</u>	<u>1.188.443.910,00</u>
Dinas Perkim	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	87.543.740,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda & Olah Raga	735.468.000,00	786.499.793,00	106,93%	200.425.561,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	900.474.619,00

➤ **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

- ☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.000.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2019 sebesar Rp87.543.740,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp86.543.740,00 atau 98,86%

➤ **Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga**

- ☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp786.499.793,00 atau mencapai 106,93% yang berarti Rp51.031.793,00 atau 6,93% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp735.468.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2020 sebesar Rp786.499.793,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2019 sebesar Rp200.425.551,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp586.074.242,00 atau 292,41% .

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

- ☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi karena dipindahkan ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu untuk periode yang berakhir 30 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji dibawah ini.

3. 4.1.2.03	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Perizinan Tertentu	<u>1.001.800.000,00</u>	<u>828.049.400,00</u>	<u>82,66%</u>	<u>1.936.239.225,00</u>
a. 4.1.2.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan	<u>1.000.000.000,00</u>	<u>826.249.400,00</u>	<u>82,62%</u>	<u>1.934.259.225,00</u>
Dinas Perkerjan Umum	1.000.000.000,00	826.249.400,00	82,62%	1.934.259.225,00

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

- ☑ Realisasi retribusi IMB sebesar Rp826.249.400,00 atau mencapai 82,62% yang berarti Rp173.750.600,00 atau 17,38,% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2020 sebesar Rp 826.249.400,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2019 sebesar Rp1.934.259.225,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.108.009.825,00 atau 57,28%.

d. 4.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1.980.000,00</u>
Dinas Perhubungan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.980.000,00

➤ Dinas Perhubungan

- ☑ Realisasi izin trayek sebesar Rp1.800.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000,00.

Realisasi izin trayek tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2019 sebesar Rp1.980.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp180.000,00 atau 9,09%.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.092.455.426,00	15.216.268.562,40	100,82%	14.641.711.340,55

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp15.216.268.562,40 atau 100,82% yang berarti 0,82% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.092.455.426,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 PDAM	6.550.840.385,00	6.550.840.385,00	100%	5.711.547.090,00
4.1.3.01.02 BPR Bank Daerah	1.238.131.353,00	1.361.944.488,00	110%	2.121.736.367,05
4.1.3.01.03 Aneka Usaha	841.578.307,00	841.578.308,00	100%	693.742.600,00
4.1.3.02.01 Bank Jatim	6.461.905.381,00	6.461.905.381,40	100%	6.114.685.283,50
Total	15.092.455.426,00	15.216.268.562,40	100,82%	14.641.711.340,55

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM sebesar Rp6.550.840.385,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2020 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan

Daerah Air Minum, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM anggaran 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun 2019 sebesar Rp5.711.547.090,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp839.293.295,00 atau 14,69%.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah sebesar Rp1.361.944.488,00 atau mencapai 110,00% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.238.131.353,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar per 31 Desember 2020 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 atau terjadi penurunan sebesar Rp 759.791.879,05 atau 35,81%.

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha sebesar Rp841.578.308,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp841.578.308,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2020 target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 841.578.307,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha per 31 Desember 2020 yang telah diaudit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun sebesar Rp6.461.905.381,40 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.461.905.381,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.461.905.381,40 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2019 sebesar Rp6.114.685.283,50 atau terjadi peningkatan sebesar Rp347.220.097,90 atau 5,68%.

Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya Tahun Buku 2020 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2020

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
PEMERINTAH KOTA MADIUN				

	1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah		115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp127.817.130.173,12 atau 110,71% yang berarti Rp12.361.361.173,12 atau 10,71% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp115.455.769.000,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.1.1
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.1 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.4.01				
Hasil Penjualan aset Daerah Yang tidak dipisahkan	25.000.000,00	37.410.000,00	149,64%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	1.500.000.000,00	1.355.620.963,85	90,37%	1.516.423.603,09
c. 4.1.4.03				
Bunga deposito	9.000.000.000,00	9.026.027.396,74	100,29%	18.141.780.820,88
d. 4.1.1.06				
Denda keterlambatan pelaksanaan keg	0,00	3.782.676,00	00,00%	847.441.442,46
e. 4.1.4.10				
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	00,00%	104.875.185,41
f. 4.1.4.12				
Pendapatan dari Angsuran /cicilan penjualan	192.000.000,00	21.387.200,00	11,14%	108.519.300,00

4.1.1 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
g. 4.1.4.13				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	128.290.315,83	128,29	125.232.086,26
h. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	1.260.672.058,95	00,00%	1.742.072.107,84
i. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	104.638.769.000,00	115.885.942.419,43	110,75%	103.063.149.555,09
j. Pendapatan BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
k. Denda Pajak	0,00	97.997.142,32	0,00	369.660.147,56
l. Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	9.371.250,00
Jumlah	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.1.2

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
1 Dinas Kesehatan	9.638.769.000,00	9.912.132.642,25	102,84%	10.966.974.494,28
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	9.638.769.000,00	9.912.132.642,25	102,84%	10.966.974.494,28
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
2 RSUD	95.000.000.000,00	105.973.809.777,18	111,75%	92.096.175.060,81
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.15				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	95.000.000.000,00	105.973.809.777,18	111,75%	92.096.175.060,81
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
3BAPENDA	0,00	97.997.142,32	00,00%	369.660.147,56
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Denda Pajak	0,00	20.258,32	00,00%	369.660.147,56
f. 4.1.4.15				
Pendapatan Lain Lain	0,00	97.976.884,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
4 BPKAD (SKPKD)	10.600.000.000,00	11.774.393.411,37	111,08%	22.477.825.245,94
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	1.500.000.000,00	1.355.620.963,85	90,37%	1.516.423.603,09
c. 4.1.4.03				
Bunga Deposito	9.000.000.000,00	9.026.027.396,74	100,29%	18.141.780.820,88
d. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	100.000.000,00	128.290.315,83	128,29%	125.232.086,26
f. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	1.220.393.268,95	0,00%	1.742.072.107,84
g. 4.1.4.10				
Pendapatan dari pengembalian		40.278.790,00	0,00%	104.875.185,41
h. 4.1.4.06				
Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan	0,00	3.782.676,00	00,00%	847.441.442,46
i. 4.1.4.15				
Pendapatan Denda Reribusi	0,00	0,00	00,00%	0,00
5 BPKAD	0,00	0,00	00,00%	0,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.03				
Bunga Deposito	0,00	0,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
d. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. 4.1.4.10				
Pendapatan dari pengembalian	0,00	0,00	00,00%	0,00
h. 4.1.4.06				
Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan	0,00	0,00	00,00%	0,00
i. 4.1.4.15				
Pendapatan Denda Reribusi	0,00	0,00	00,00%	0,00
6 Dinas Pertanian KP	25.000.000,00	37.410.000,00	149,64%	25.017.000,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	25.000.000,00	37.410.000,00	149,64%	25.017.000,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	0,00%	0,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
7 Dinas Perdagangan	192.000.000,00	21.387.200,00	11,14%	83.502.300,00

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	192.000.000,00	21.387.200,00	11,14%	83.502.300,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas

- Realisasi pendapatan blud puskesmas sebesar Rp9.912.132.642,25 atau mencapai 102,84% yang berarti Rp273.363.642,25 atau 2,84% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.638.769.000,00.
- Realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.912.132.642,25 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.966.974.494,28 terdapat penurunan sebesar Rp1.054.841.852,03 atau sebesar 9,62%.

2. RSUD

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD RSUD

- Realisasi pendapatan blud RSUD sebesar Rp 105.973.809.777,18 atau mencapai 111,52% yang berarti Rp10.973.809.777,18 atau 11,52% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 95.000.000.000,00.
- Realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 105.948.625.963,18 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 92.096.175.060,81 terdapat peningkatan sebesar Rp13.877.634.716,37 atau sebesar 15,07%.

3. Badan Pendapatan Daerah.

- a. Pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan.
- Realisasi pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar Rp97.976.884,00 dan denda pajak sebesar Rp.20.258,00 realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB dan denda pajak tidak dianggarkan dalam dalam APBD tahun anggaran 2020 karena realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB dan denda pajak tidak dapat diprediksi perolehannya.

4. BPKAD (SKPKD)

- a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- Realisasi pendapatan hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan tidak ada realisasi .
- b. Pendapatan jasa giro.
- Realisasi pendapatan jasa giro per sebesar Rp1.355.620.963,85 atau mencapai 90,37% yang berarti Rp144.379.036,15 atau 9,63% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00.
Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2020 sebesar Rp1.355.620.963,85 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.516.423.603,09 terdapat penurunan sebesar Rp160.802.639,24 atau sebesar 10,60%.
- c. Pendapatan Bunga Deposito.
- Realisasi pendapatan bunga depositosebesar Rp9.026.027.396,74 atau 100,29% yang berarti Rp 26.027.396,74 atau 0,29% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.9.000.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.026.027.396,74 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2019 sebesar Rp18.141.780.820,88 terdapat penurunan sebesar Rp9.115.753.424,14 atau sebesar 50,25%.
- d. Pendapatan hasil pengeloan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.
- Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKKsebesar Rp128.290.315,83 atau 128,29% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp100.000.000,00.
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2020 sebesar Rp128.290.315,83dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2019 sebesar Rp125.232.086,26 terdapat kenaikan sebesar Rp3.058.229,57 atau 2,44%.
- e. Pendapatan lain-lain.
- Realisasi pendapatan lain lain terdiri dari atas
- Realisasi pendapatan lain-lain sebesar Rp1.220.393.268,95. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020. Pendapatan lain lain antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat.

- Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun anggaran 2020 sebesar Rp.40.278.790,00. Pendapatan ini merupakan pengembalian pajak dari belanja hibah untuk covid. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.
- f. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - Realisasi pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp3.782.676,00. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.

5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.
 - Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan sebesar Rp37.410.000,00 atau mencapai 149,64% yang berarti Rp.12.410.000,00 atau 49.64% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp25.000.000,00.
 Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.410.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2019 sebesar Rp Rp25.017.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp12.393.000,00 atau sebesar 49,54%.

6. Dinas Perdagangan

- a. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
 - Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp 21.387.200,00 atau mencapai 11,14% yang berarti Rp.170.612.800,00 atau 88,86% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp192.000.000,00.
 Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualatanahun anggaran 2020 sebesar Rp 21.387.200,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 83.502.300,00 terdapat penurunan sebesar Rp 62.115.100,00 atau 74,39%.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5

4.2.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	609.712.461.000,00	632.559.647.797,00	103,75%	681.537.181.650,00
----------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	---------------------------

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan terealisasi sebesar Rp632.559.647.797,00 mencapai 103,75% yang berarti Rp22.847.186.797,00 atau 3,75% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp609.712.461.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp632.559.647.797,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp681.537.181.650,00 terjadi penurunan sebesar Rp48.977.533.853,00 atau 7,19%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.
Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.1.01	24.444.091.000,00	25.788.438.430,00	105,50%	16.076.390.385,00
Bagi hasil pajak				
4.2.1.02	19.929.376.000,00	44.866.769.518,00	225,13%	52.685.578.633,00
Bagi hasil SDA				
4.2.2.	476.135.673.000,00	473.852.439.000,00	99,52%	522.596.024.000,00
DAU				
4.2.3.	72.857.808.000,00	72.596.481.424,00	99,64%	76.239.204.819,00
DAK				
4.2.4.	16.345.513.000,00	15.455.519.425,00	94,56%	13.939.983.813,00
Bagi hasil cukai				
Total	609.712.461.000,00	632.559.647.797,00	103.75 %	681.537.181.650,00

5.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.1.01	24.444.091.000,00	25.788.438.430,00	105,50%	16.076.390.385,00
Bagi Hasil Pajak				

Realisasi dana bagi hasil pajak adalah sebesar Rp25.788.438.430,00 atau mencapai 105,50% yang berarti Rp1.344.347.430,00 atau 5,50% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 24.444.091.000,00. Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp25.788.438.430,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2019 sebesar Rp16.076.390.385,00 terjadi peningkatan sebesar Rp9.712.048.045,00 atau 60,41%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2020. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.01.01 PBB	3.217.096.000,00	3.215.220.537,00	99,94%	3.507.795.600,00
4.2.1.01.02 PPh Pasal 21,25,29	21.226.995.000,00	22.573.217.893,00	106,34%	12.568.594.785,00
Total	24.444.091.000,00	25.788.438.430,00	105,50%	16.076.390.385,00

- Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp3.215.220.537,00 atau 99,94% yang berarti Rp1.875.463,00 atau 0,06% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020.
- Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 sebesar Rp22.573.217.893,00 atau 106,34% yang berarti Rp1.346.222.893,00 atau 6,34% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020.

5.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	19.929.376.000,00	44.866.769.518,00	225,13%	52.685.578.633,00

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak adalah sebesar Rp44.866.769.518,00 atau 225,13% yang berarti Rp24.937.393.518,00 atau 125,13% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp19.929.376.000,00. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp52.685.578.633,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.818.809.115,00 atau 14,84%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi sumber daya alam yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan realisasi dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2020.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.02.01				
Sumber daya hutan	282.743.000,00	89.390.094,00	31,62%	140.982.000,00
4.2.1.02.02				
Pungutan hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58%	590.155.800,00
4.2.1.02.04				
Pertambangan minyak & gas bumi	17.872.665.000,00	43.186.177.893,00	241,63%	51.351.710.360,00
4.2.1.02.05				
Bagi Hasil Minerba	315.387.000,00	771.296.492,00	244,56%	567.954.800,00
4.2.1.02.06				
SDA Panas Bumi	40.220.000,00	31.628.750,00	78,64%	34.775.673,00
Total	19.929.376.000,00	44.866.769.518,00	225,13%	52.685.578.633,00

- Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp 89.390.094,00 atau 31,62% yang berarti Rp193.352.906,00 atau 68,38% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 140.982.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp51.591.906,00 atau 36,89%. Pendapatan

yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrolable*.

- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp788.276.289,00 atau 55,58% yang berarti Rp630.084.711,00 atau 44,42% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Realisasi ini dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp590.155.800,00 terjadi kenaikan sebesar Rp198.120.489,00 atau 33,57%. Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrolable*.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum ,Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp43.186.177.893,00 atau 241,63% yang berarti Rp25.313.512.893,00 atau 141,63% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*. Realisasi bagi hasil dari pertambangan umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2019 sebesar Rp51.351.710.360,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.165.532.467,00 atau 8,16%.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil Minerba sebesar Rp771.296.492,00 atau 244,56% yang berarti Rp455.909.492,00 atau 144,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp315.387.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum Royalti merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp31.628.750,00 atau 78,64% yang berarti Rp8.591.250,00 atau 21,36% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp40.220.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.2 DAU	476.135.673.000,00	473.852.439.000,00	99,52%	522.596.024.000,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp473.852.439.000,00 yang mencapai 99,52% atau yang berarti Rp. 2.283.234.000,00 atau 0,48% lebih rendah dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp476.135.673.000,00 dikarenakan ada perubahan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid -19). Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp473.852.439.000,00 dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2019 sebesar Rp522.596.024.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp48.743.585.000,00 atau 9,33%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima.

5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.3. DAK	72.857.808.000,00	72.596.481.424,00	99,64%	76.239.204.819,00

Realisasi dana alokasi khusus adalah sebesar Rp72.596.481.424,00 yang berarti 99,64% yang berarti Rp261.326.576,00 atau 0,36% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp72.857.808.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp76.239.204.819,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.642.723.395,00 atau 4,78%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid -19).

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.3
Dana Alokasi Khusus**

4.2.3 DAK	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Reguler :				
Pendidikan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jalan	0,00	0,00	0,00%	8.953.419.000,00
Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	4.467.310.349,00
Air minum	0,00	0,00	0,00%	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Sanitasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Lingkungan hidup	0,00	0,00	0,00%	0,00
Keluarga berencana	736.900.000,00	227.800.400,00	30,91%	0,00
Transportasi darat	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kelautan & perikanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pertanian	0,00	0,00	0,00%	0,00
Rujukan	2.507.656.000,00	2.233.783.318,00	89,08%	0,00
Pelayanan Kesehatan Dasar	1.084.937.000,00	1.038.522.550,00	95,72%	0,00
Kedaulatan pangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Non Reguler :				
DAK Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00%	0,00
DAK Pengendalian Penyakit	2.058.533.000,00	1.938.909.900,00	94,19%	0,00
Non Fisik :				
BO P PAUD	4.306.200.000,00	3.930.092.890,00	91,27%	3.948.600.000,00
TPG	53.974.947.000,00	53.974.947.000,00	100%	54.369.533.120,00
Tunj.peng.guru	56.750.000,00	128.750.000,00	226,87%	142.850.000,00
TPG Non Profesi	0,00	0,00	0,00%	0,00
BOP Kesehatan	4.968.224.000,00	6.500.725.343,00	130,85%	2.678.626.700,00
Pengawasan Obat & Makanan	247.615.000,00	0,00	0,00%	0,00
BOP KB	940.904.000,00	665.356.623,00	70,71%	336.437.450,00
Kependudukan	831.532.000,00	814.083.400,00	97,90%	786.728.200,00
Bantuan OPS	652.600.000,00	652.500.000,00	49,98%	555.700.000,00
UKM	491.010.000,00	491.010.000,00	100%	0,00
Total	72.857.808.000,00	72.596.481.424,00	99,64%	76.239.204.819,00

5.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.4.	16.345.513.000,00	15.455.519.425,00	94,56%	13.939.983.813,00
Bagi hasil cukai				

Realisasi dana bagi hasil cukai adalah sebesar Rp15.445.519.425,00 atau mencapai 94,56% yang berarti Rp.889.993.575,00 atau lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.345.513.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.445.519.425,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai pada tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp1.515.535.612,00 atau 10,87%.

Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu

anggaran. Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2020.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	73.313.029.000,00	73.313.029.000,00	100%	55.542.726.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya adalah sebesar Rp.73.313.029.000,00 yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.73.313.029.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid -19).

Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

5.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.4.01 Dana penyesuaian	73.313.029.000,00	73.313.029.000,00	100%	55.542.726.000,00

Realisasi pendapatan dana penyesuaian adalah sebesar Rp73.313.029.000,00 mencapai 100% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.313.029.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan dana penyesuaian tahun anggaran 2020 sebesar Rp73.313.029.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp55.542.726.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp17.770.303.000,00 atau 31,09%.

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
--------	---------------	----------------	---	----------------

	1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi		65.383.693.000,00	85.066.731.855,00	130,10%	86.049.555.933,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi - dana perimbangan terealisasi sebesar Rp85.066.731.855,00 mencapai 130,10% yang berarti Rp19.683.038.855,00 atau 30,10% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp65.383.693.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp85.066.731.855,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp86.049.555.933,00 terjadi penurunan sebesar Rp982.824.078,00 atau 0,98% Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/495/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota berdasarkan realisasi penerimaan kas tahun tahun anggaran 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/254/KPTS/013/2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I tahun anggaran 2020.

5.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.3				
Dana bagi hasil pajak provinsi	64.366.614.000,00	84.049.652.855,00	130,58%	84.934.976.933,00

Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi adalah sebesar Rp84.049.652.855,00 mencapai 130,58% yang berarti Rp19.683.038.855,00 atau 30,58% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp64.366.614.000,00. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp84.049.652.855,00 dibandingkan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp84.934.976.933,00. atau terjadi penurunan sebesar Rp885.324.078,00 atau 1,04%.

Perincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.1
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. 4.3.3.01.01 PKB	16.600.776.000,00	27.263.977.323,00	164,23%	27.502.812.146,00
2. 4.3.3.01.02 BBNKB	8.188.188.000,00	12.318.198.181,00	150,44%	12.671.773.186,00
3. 4.3.3.01.03 PBBKB	15.745.593.000,00	14.408.023.859,00	91,51%	22.404.927.429,00
4. 4.3.3.01.04 Air Permukaan	163.486.000,00	200.953.509,00	122,92%	250.651.372,00
5. 4.3.3.01.05 Pajak Rokok	23.668.571.000,00	29.858.499.983,00	126,15%	22.104.812.800,00
Total	64.366.614.000,00	84.049.652.855,00	130,58%	84.934.976.933,00

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp27.263.977.323,00 atau mencapai 164,23% yang berarti Rp10.663.201.323,00 atau 64,23% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.600.776.000,00.

Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp27.263.977.323,00 dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2019 sebesar Rp27.502.812.146,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp238.834.823,00 atau 0,87%.

2. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp12.318.198.181,00 atau mencapai 150,44% yang berarti Rp4.130.010.181,00 atau 50,44% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp8.188.188.000,00.

Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.318.198.181,00 dibandingkan dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2019 sebesar Rp12.671.773.186,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp353.575.005,00 atau 2,79%.

3. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp14.408.023.859,00 atau mencapai 91,51% yang berarti Rp1.337.569.141,00 atau 8,49% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.745.593.000,00.

Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.408.023.859,00 dibandingkan dengan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor

tahun 2019 sebesar Rp22.404.927.429,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp7.996.903.570,00 atau 35,69%.

4. Realisasi pajak air permukaan sebesar Rp200.953.509,00 atau mencapai 122,92% yang berarti Rp37.467.509,00 atau 22,92% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp163.486.000,00.

Realisasi pajak air pemanfaatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp200.953.509,00 dibandingkan dengan realisasi pajak pemanfaatan air tahun 2019 sebesar Rp250.651.372,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp49.697.863,00 atau 80,17%.

5. Realisasi pajak rokok sebesar Rp29.858.499.983,00 atau mencapai 126,15% yang berarti Rp6.189.928.983,00 atau 26,15% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp23.668.571.000,00.

Realisasi pajak rokok per 31Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.858.499.983,00 dibandingkan dengan realisasi pajak rokok tahun 2019 sebesar Rp22.104.812.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7.753.687.183,00 atau 35,08%

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	1.017.079.000,00	1.017.079. 000,00	100%	1.114.579. 000,00

Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp1.017.079.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.017.079.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi per 31desember tahun aggaran 2020 sebesar Rp1.017.079.000,00 dibandingkan dengan realiasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.114.579.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp97.500.000,00 atau 8,75% Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 .

Perincian anggaran dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.2
Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00	100%	476.850.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
Puskesmas Rawat Inap standart	0,00	0,00	0%	30.000.000,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	100%	163.200.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	72.000.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	75.000.000,00	100%	75.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100%	50.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	48.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	12.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	55.000.000,00	100%	55.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	121.029.000,00	100%	121.029.000,00
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	1.500.000,00
Total	1.017.079.000,00	1.017.079.000,00	100%	1.114.579.000,00

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3				
Lain-lain pendapatan yang sah	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp.20.029.980.000,00 atau mencapai 103% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.399.600.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.029.980.000,00 dibandingkan dengan realiasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.189.280.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp840.700.000,00 atau 4,38%. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.1				
Pendapatan hibah	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00
Total	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.1				
Pendapatan Dana Hibah Dana Bos	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00

Penerimaan dari pendapatan dana hibah dana BOS terealisasi sebesar Rp.20.029.980.000,00 atau mencapai 112,68% yang berarti Rp.630.380.000,00 lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.399.600.000,00. Realisasi pendapatan dana hibah dana sebesar Rp 20.029.980.000,00 dibandingkan dengan realiasi pendapatan dana hibah dana bos tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.189.280.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp840.700.000,00 atau 4,38%.

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	508.839.805.584,56	441.740.830.119,00	86,81%	440.222.361.775,00

Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.740.830.119,00 atau 86,81% yang berarti Rp67.098.975.465,56 atau 15,19% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp508.839.805.584,56,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp1.518.468.344,00 atau sebesar 0,34 %.

Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1.1
Belanja Pegawai
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
BELANJA PEGAWAI	508.839.805.584,56	441.740.830.119,00	86,81%	440.222.361.775,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung	428.985.359.891,56	371.359.200.247,00	86,57%	375.303.304.387,00
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	260.227.047.549,00	221.623.558.333,00	85,17%	225.712.878.659,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS	92.771.688.814,00	82.277.750.079,00	88,69%	74.356.579.377,00
Tambahan Penghasilan PNS BLUD	9.350.708.000,00	7.200.702.042,00	77,01%	6.771.930.294,00
5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	4.701.600.000,00	4.545.272.900,00	96,68%	4.454.496.650,00
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.840.503.528,00	3.817.429.733,00	99,40%	3.992.809.987,00
5.1.1.07 Tunjangan Profesi Guru	58.093.812.000,00	51.894.487.160,00	89,33%	60.014.609.420,00
Belanja Pegawai Langsung	79.854.445.693,00	70.381.629.872,00	88,14%	64.919.057.338,00
5.2.1.01 Honorarium PNS	53.013.650.481,00	45.165.275.724,00	85,20%	40.433.695.030,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS	8.823.435.000,00	8.418.735.000,00	95,41%	8.394.345.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur	4.363.116.762,00	3.739.990.036,00	85,72%	4.233.107.325,00
5.2.1.05 Belanja Pegawai BLUD	11.068.945.400,00	10.792.245.862,00	97,50%	9.528.675.000,00
5.2.1.06 Belanja Pegawai BOS	2.585.298.050,00	2.265.383.250,00	87,63%	2.329.235.033,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1
Belanja Pegawai Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	190.096.592.738,00	174,792,378,157.00	91.95%	190.598.262.380,00
Dinas Kesehatan KB	39.811.396.840,00	37,008,693,188.00	92.96%	34.902.936.663,00
RSUD	31.301.626.854,00	28,400,006,313.00	90.73%	26.891.041.812,00
Dinas PU TR	9.644.952.463,00	8,744,217,456.00	90.66%	10.252.671.794,00
Dinas Perkim	5.945.800.100,00	5,633,900,438.00	94.75%	5.265.542.820,00
Satpol PP	8.832.021.925,00	8,151,783,648.00	92.30%	7.039.951.936,00

Belanja Pegawai Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
BPBD	1.424.251.964,00	1,367,637,708.00	96.02%	1.174.721.906,00
Dinas Sosial	6.369.241.533,00	4,526,201,295.00	71.06%	4.661.065.597,00
Dinas Tenaga Kerja	4.099.336.970,00	3,800,017,709.00	92.70%	3.448.385.833,00
Dinas LH	13.551.642.314,00	12,858,999,568.00	94.89%	12.669.999.211,00
Dispendukcapil	4.402.506.280,00	3,816,623,191.00	86.69%	4.045.559.954,00
Dinas Perhubungan	9.227.661.108,00	8,192,811,571.00	88.79%	7.593.403.732,00
Dinas Infokom	5.392.147.988,00	4,580,348,886.00	84.94%	4.910.728.226,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	4.480.437.270,00	4,090,955,679.00	91.31%	4.162.051.362,00
Dinas Budparpora	4.790.625.568,00	4,178,015,160.00	87.21%	3.347.198.454,00
Dinas Perpustakaan	3.534.824.270,00	3,303,713,338.00	93.46%	2.593.258.260,00
Walikota/Wakil/(Bagian Umum	802.579.300,00	705,267,744.00	87.88%	629.404.684,00
Bagian Pemerintahan	840.078.500,00	721,264,144.00	85.86%	894.705.554,00
Bagian Organisasi	841.214.220,00	780,725,486.00	92.81%	659.866.155,00
Bagian Umum	12.738.606.470,00	11,520,395,723.00	90.44%	12.362.238.497,00
Bagian Hukum	1.663.546.320,00	1,541,652,743.00	92.67%	817.869.796,00
Bagian Perekkesra	972.787.120,00	889,257,083.00	91.41%	707.565.503,00
Bagian Adbang	1.612.659.320,00	1,230,156,802.00	76.28%	1.579.669.572,00
Sekretariat DPRD	15.992.463.064,00	14,964,304,663.00	93.57%	15.084.343.422,00
BKD	5.585.895.085,00	5,108,831,947.00	91.46%	5.125.067.843,00
BPKAD	47.452.631.525,56	18,945,617,600.00	39.93%	13.277.159.465,00
Bependa	8.441.898.000,00	7,748,998,522.00	91.79%	8.222.472.358,00
Inspektorat	6.476.229.800,00	6,426,127,009.00	99.23%	4.873.610.991,00
BAPPEDA	6.806.303.870,00	5,762,592,782.00	84.67%	4.991.143.746,00
Kec Kartoharjo	11.872.143.370,00	11,133,506,105.00	93.78%	9.395.694.869,00
Kec Manguharjo	12.332.495.090,00	11,782,442,267.00	95.54%	9.606.829.953,00
Kec Taman	12.192.679.300,00	11,456,627,254.00	93.96%	10.740.745.115,00
Bakesbangpol	3.990.198.275,00	3,631,686,789.00	91.02%	3.238.532.219,00
Dinas Pertanian KP	5.367.006.360,00	5,021,091,735.00	93.55%	5.023.791.156,00
Dinas Perdagangan	9.953.324.410,00	8,923,980,416.00	89.66%	9.434.870.937,00
Total	508.839.805.584,56	441,740,830,119.00	86,81%	440.222.361.775,00

5.2.1.1.1 Belanja Pegawai Tidak Langsung (BTL)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
--------	---------------	----------------	---	----------------

	1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BTL		428.985.359.891,56	371.359.200.247,00	86,57%	375.303.304.387,00

Realisasi belanja pegawai tidak langsung Per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.359.200.247,00 atau 86,57% yang berarti Rp57.626.159.644,56 atau 15,52% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp428.985.359.891,56. Realisasi belanja pegawai tidak langsung Per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.359.200.247,00 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp375.303.304.387,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.944.104.140,00 atau sebesar 1,06%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1
Belanja Pegawai Tidak Langsung Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai BTL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	180.562.269.100,00	166,928,450,288.00	92.45%	181.739.167.319,00
Dinas Kesehatan KB	28.639.155.600,00	27,620,735,225.00	96.44%	26.786.820.062,00
RSUD	21.224.196.854,00	18,581,753,813.00	87.55%	18.091.001.812,00
Dinas PU TR	6.429.858.400,00	6,000,799,187.00	93.33%	6.757.047.780,00
Dinas Perkim	4.376.493.900,00	4,196,910,952.00	95.90%	3.977.391.721,00
Dinas Satpol PP	4.733.251.475,00	4,596,947,153.00	97.12%	3.903.725.038,00
BPBD	1.120.444.964,00	1,076,734,709.00	96.10%	933.623.301,00
Dinas Sosial	4.924.785.973,00	3,255,088,481.00	66.10%	3.395.295.024,00
Dinas Tenaga Kerja	3.095.955.650,00	2,938,570,520.00	94.92%	2.626.764.922,00
Dinas LH	10.510.039.944,00	10,054,790,625.00	95.67%	10.223.570.302,00
Dispendukcapil	3.420.562.000,00	2,977,977,157.00	87.06%	3.163.683.946,00
Dinas Perhubungan	6.080.956.028,00	5,416,467,650.00	89.07%	5.066.708.163,00
Dinas Infokom	3.993.960.000,00	3,372,570,050.00	84.44%	3.745.371.661,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	3.429.702.000,00	3,099,828,993.00	90.38%	3.166.902.864,00
Dinas Budparpora	3.132.991.248,00	2,670,121,681.00	85.23%	2.516.182.211,00
Dinas Perpustakaan	2.697.892.150,00	2,557,339,613.00	94.79%	2.088.357.987,00
Walikota/Wakil(Bagian Umum)	802.579.300,00	705,267,744.00	87.88%	629.404.684,00
Bagian Pemerintahan	486.370.000,00	427,965,313.00	87.99%	460.354.110,00
Bagian Organisasi	485.567.500,00	456,221,826.00	93.96%	389.533.694,00
Bagian Umum	9.469.998.750,00	8,725,911,972.00	92.14%	9.393.763.274,00
Bagian Hukum	1.114.730.000,00	1,016,399,520.00	91.18%	454.605.771,00

Belanja Pegawai BTL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagian Perekkesra	568.775.000,00	546,115,815.00	96.02%	445.001.266,00
Bagian Adbang	1.146.448.500,00	837,142,219.00	73.02%	1.145.681.920,00
Sekretariat DPRD	15.010.803.050,00	14,183,202,117.00	94.49%	14.328.434.142,00
BKD	4.033.814.400,00	3,738,470,067.00	92.68%	3.890.320.610,00
BPKAD	45.946.705.805,56	17,843,101,368.00	38.83%	12.337.614.854,00
Bependa	8.293.708.000,00	7,603,443,522.00	91.68%	8.068.302.358,00
Inspektorat	4.723.068.800,00	4,725,855,650.00	100.06%	3.553.274.630,00
BAPPEDA	5.472.256.750,00	4,525,437,096.00	82.70%	3.853.818.315,00
Kec Kartoharjo	9.212.990.450,00	8,709,455,036.00	94.53%	7.587.014.484,00
Kec Manguharjo	9.490.244.550,00	9,284,345,202.00	97.83%	7.870.436.000,00
Kec Taman	9.395.622.500,00	8,893,390,558.00	94.65%	8.424.220.416,00
Bakesbangpol	3.023.534.500,00	2,885,714,480.00	95.44%	2.631.302.205,00
Dinas Pertanian KP	4.075.432.700,00	3,777,454,123.00	92.69%	3.883.476.307,00
Dinas Perdagangan	7.860.194.050,00	7,129,220,522.00	90.70%	7.775.131.234,00
Total	428.985.359.891,56	371,359,200,247.00	86.57%	375.303.304.387,00

5.2.1.1.2 Belanja Pegawai Langsung (BL)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BL	79.854.445.693,00	70.381.629.872,00	88,14%	64.919.057.388,00

Realisasi belanja pegawai langsung per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.381.629.872,00 atau 88,14% yang berarti Rp9.472.815.821,00 atau 13,46% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp79.854.445.693,00. Realisasi belanja pegawai langsung Per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.381.629.872,00 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp64.919.057.388,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.462.572.484,00 atau sebesar 7,76%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.2
Belanja Pegawai Langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai BL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	9.534.323.638,00	7,863,927,869.00	82.48%	8.859.095.061,00
Dinas Kesehatan KB	11.172.241.240,00	9,387,957,963.00	84.03%	8.116.116.601,00
RSUD	10.077.430.000	9,818,252,500.00	97.43%	8.800.040.000,00
Dinas PU TR	3.215.094.063,00	2,743,418,269.00	85.33%	3.495.624.014,00
Dinas Perkim	1.569.306.200,00	1,436,989,486.00	91.57%	1.288.151.099,00
Dinas Satpol PP	4.098.770.450,00	3,554,836,495.00	86.73%	3.136.226.898,00
BPBD	303.807.000,00	290,902,999.00	95.75%	241.098.605,00
Dinas Sosial	1.444.455.560,00	1,271,112,814.00	88.00%	1.265.770.573,00
Dinas Tenaga Kerja	1.003.381.320,00	861,447,189.00	85.85%	821.620.911,00
Dinas LH	3.041.602.370,00	2,804,208,943.00	92.20%	2.446.428.909,00
Dispendukcapil	981.944.280,00	838,646,034.00	85.41%	881.876.008,00
Dinas Perhubungan	3.146.705.080,00	2,776,343,921.00	88.23%	2.526.695.569,00
Dinas Infokom	1.398.187.988,00	1,207,778,836.00	86.38%	1.165.356.565,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	1.050.735.270,00	991,126,686.00	94.33%	995.148.498,00
Dinas Budparpora	1.657.634.320,00	1,507,893,479.00	90.97%	831.016.243,00
Dinas Perpustakaan	836.932.120,00	746,373,725.00	89.18%	504.900.273,00
Bagian Pemerintahan	353.708.500,00	293,298,831.00	82.92%	434.351.444,00
Bagian Organisasi	355.646.720,00	324,503,660.00	91.24%	270.332.461,00
Bagian Umum	3.268.607.720,00	2,794,483,751.00	85.49%	2.968.475.223,00
Bagian Hukum	548.816.320,00	525,253,223.00	95.71%	363.264.025,00
Bagian Perekkesra	404.012.120,00	343,141,268.00	84.93%	262.564.237,00
Bagian Adbang	466.210.820,00	393,014,583.00	84.30%	433.987.652,00
Sekretariat DPRD	981.660.014,00	781,102,546.00	79.57%	755.909.280,00
BKD	1.552.080.685,00	1,370,361,880.00	88.29%	1.234.747.233,00
BPKAD	1.505.925.720,00	1,102,516,232.00	73.21%	939.544.611,00
Bependa	148.190.000,00	145,555,000.00	98.22%	154.170.000,00
Inspektorat	1.753.161.000,00	1,700,271,359.00	96.98%	1.320.336.361,00
BAPPEDA	1.334.047.120,00	1,237,155,686.00	92.74%	1.137.325.431,00
Kec Kartoharjo	2.659.152.920,00	2,424,051,069.00	91.16%	1.808.680.385,00
Kec Manguharjo	2.842.250.540,00	2,498,097,065.00	87.89%	1.736.393.953,00

Belanja Pegawai BL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Kec Taman	2.797.056.800,00	2,563,236,696.00	91.64%	2.316.524.699,00
Bakesbangpol	966.663.775,00	745,972,309.00	77.17%	607.230.014,00
Dinas Pertanian KP	1.291.573.660,00	1,243,637,612.00	96.29%	1.140.314.849,00
Dinas Perdagangan	2.093.130.360,00	1,794,759,894.00	85.75%	1.659.739.703,00
Total	79.854.445.693,00	70,381,629,872.00	88.14%	64.919.057.388,00

5.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Barang Jasa	379.571.611.527,00	350.024.036.581,10	92,22%	369.278.712.052,86

Realisasi belanja barang jasa Per 31 Desember 2020 sebesar Rp350.024.036.581,10 atau 92,22% yang berarti Rp29.547.574.945,90 atau 7,78% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp379.571.611.527,00. Selain itu juga silakukan reklas atas alokasi anggaran yang terkait dengan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta terkait pembangunan lapak pedagang di 3 Kecamatan yang didistribusikan menjadi asset tetap.

Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebelum dilakukan reklas tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Barang dan Jasa	379.571.611.527,00	350.024.036.581,10	92,22%	369.278.712.052,86
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	23.966.777.859,00	20.073.063.974,20	83,75%	19.937.173.455,00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material	11.987.009.226,00	10.519.865.275,00	87,76%	6.148.942.644,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	112.716.092.691,00	106.400.462.468,00	94,40%	92.731.559.090,22
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi	973.466.108,00	531.407.492,00	54,59%	3.025.083.052,26
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.619.398.470,00	6.235.084.582,00	81,83%	6.217.236.004,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	9.644.092.733,00	8.831.628.321,00	91,58%	16.180.867.596,50

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.267.163.160,00	861.995.700,00	68,03%	2.873.502.980,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	521.322.850,00	279.105.000,00	53,54%	1.546.659.445,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.058.487.500,00	1.283.118.380,00	62,33%	5.351.005.462,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	24.673.169.008,00	21.313.929.710,00	86,39%	30.167.721.294,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	914.832.250,00	845.440.900,00	92,41%	1.079.377.963,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	462.226.000,00	456.891.900,00	98,85%	326.087.678,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.408.186.983,00	5.032.377.282,00	93,05%	4.956.881.212,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	29.873.243.524,00	23.974.388.194,00	80,25%	40.205.255.910,00
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	00,00%	48.000.000,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.081.336.000,00	851.170.000,00	78,71%	2.655.555.800,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan	20.115.355.533,00	19.383.968.120,15	96,36%	22.696.464.521,54
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi	7.358.218.370,00	6.512.191.250,00	88,50%	5.843.835.523,00
5.2.2.22 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	23.964.447.185,00	22.648.150.123,21	94,51%	3.344.642.204,00
5.2.2.24 Belanja Software / Aplikasi Komputer	0,00	0,00	00,00%	98.060.000,00
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.282.970.150,00	79.739.512.222,00	100,58%	87.983.714.667,15
5.2.2.27 Belanja uang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	425.453.000,00	286.200.000,00	67,27%	3.197.060.000,00
5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS	15.258.362.427,00	13.964.085.687,54	91,52%	12.664.025.551,19

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Kartoharjo	193,239,995.00	188,974,900.00	97.79%	175.994.405,42
SDN 02 Kartoharjo	34,122,925.00	31,421,925.00	92.08%	35.574.871,17
SDN 03 Kartoharjo	42,635,599.00	40,188,400.00	94.26%	40.325.394,85
SDN 01 Klegen	183,698,164.00	183,060,000.00	99.65%	175.618.670,37

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 02 Klegen	79,255,092.00	76,938,384.00	97.08%	64.277.804,75
SDN 03 Klegen	172,578,671.00	172,245,981.00	99.81%	157.555.364,42
SDN 04 Klegen	43,418,735.00	41,018,490.00	94.47%	49.648.217,02
SDN Oro Oro Ombo	150,791,500.00	147,442,400.00	97.78%	121.018.337,68
SDN 01 Rejomulyo	52,872,955.00	51,852,955.00	98.07%	45.236.731,54
SDN 02 Rejomulyo	28,018,784.00	27,649,900.00	98.68%	27.367.791,17
SDN 01 Kanigoro	50,171,657.00	48,990,500.00	97.65%	65.124.033,60
SDN 02 Kanigoro	82,441,856.00	78,765,000.00	95.54%	69.267.733,10
SDN 03 Kanigoro	57,246,251.00	53,216,251.13	92.96%	80.960.391,18
SDN Sukosari	15,057,140.00	15,056,180.00	99.99%	9.911.541,28
SDN Pilangbango	122,560,321.00	117,035,576.00	95.49%	110.078.249,28
SDN 01 Tawangrejo	95,901,312.00	95,901,312.00	100.00%	93.577.493,71
SDN 02 Tawangrejo	48,543,819.00	48,511,819.00	99.93%	50.875.438,49
SDN Kelun	93,963,915.00	93,693,915.12	99.71%	82.497.541,93
SDN 01 Manguharjo	228,198,616.00	220,202,200.00	96.50%	183.658.375,95
SDN 01 Nambangan Lor	170,083,461.00	161,656,530.00	95.05%	159.853.825,32
SDN 02 Nambangan Lor	67,855,616.00	65,974,350.00	97.23%	77.556.233,78
SDN 01 Madiun Lor	84,845,843.00	81,114,220.00	95.60%	74.481.090,80
SDN 02 Madiun Lor	90,978,832.00	83,958,200.00	92.28%	80.614.555,45
SDN 03 Madiun Lor	266,584,900.00	256,533,025.00	96.23%	212.777.904,49
SDN 04 Madiun Lor	204,017,104.00	201,606,470.00	98.82%	198.358.190,06
SDN 05 Madiun Lor	243,212,888.00	240,791,497.00	99.00%	215.729.506,34
SDN 01 Nambangan Kidul	74,395,000.00	71,545,000.00	96.17%	70.017.561,34
SDN 02 Nambangan Kidul	55,389,948.00	55,389,948.00	100.00%	56.936.987,22
SDN 03 Nambangan Kidul	198,990,000.00	198,989,668.00	100.00%	160.646.740,27
SDN 04 Nambangan Kidul	85,704,663.00	82,651,400.00	96.44%	71.407.022,05
SDN 01 Winongo	190,681,404.00	190,681,370.00	100.00%	154.475.941,43
SDN 02 Winongo	53,404,314.00	50,403,900.00	94.38%	34.678.603,52
SDN Ngegong	123,728,700.00	120,884,625.00	97.70%	82.355.188,79
SDN Patihan	214,049,251.00	191,097,250.00	89.28%	197.116.191,26
SDN 01 Pangongangan	35,611,011.00	33,200,600.00	93.23%	33.450.673,98
SDN 02 Pangongangan	142,876,287.00	137,748,987.00	96.41%	145.029.903,12
SDN Sogaten	90,956,808.00	90,297,954.00	99.28%	77.001.302,62
SDN 01 Taman	282,307,000.00	282,227,456.00	99.97%	223.144.747,00

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 02 Taman	52,277,613.00	49,844,709.77	95.35%	43.814.565,23
SDN 03 Taman	52,915,395.00	49,800,800.00	94.11%	58.638.100,75
SDN 01 Pandean	171,187,093.00	160,999,790.00	94.05%	160.703.698,76
SDN 02 Pandean	160,720,352.00	132,257,500.00	82.29%	170.014.392,89
SDN Banjarejo	271,535,250.00	264,809,562.00	97.52%	220.150.429,35
SDN 01 Mojorejo	53,563,000.00	48,113,185.19	89.83%	45.043.881,71
SDN 02 Mojorejo	289,015,874.00	283,401,893.00	98.06%	226.146.808,74
SDN 01 Manisrejo	187,228,933.00	180,795,450.00	96.56%	136.941.343,63
SDN 02 Manisrejo	129,609,900.00	129,506,475.00	99.92%	130.131.796,95
SDN 03 Manisrejo	95,711,437.00	91,734,650.00	95.85%	86.264.337,97
SDN 04 Manisrejo	117,314,189.00	114,594,050.00	97.68%	101.257.898,23
SDN 01 Demangan	100,561,641.00	95,969,400.00	95.43%	71.553.920,77
SDN 02 Demangan	103,247,665.00	102,871,800.00	99.64%	95.706.019,41
SDN 01 Josenan	109,541,076.00	106,986,478.00	97.67%	94.826.691,83
SDN 02 Josenan	86,974,287.00	86,803,390.00	99.80%	88.740.332,91
SDN 03 Josenan	51,110,738.00	48,007,039.00	93.93%	37.312.575,63
SDN Kejuron	37,026,037.00	34,915,900.00	94.30%	5.025.328,44
SDN Kuncen	26,008,359.00	25,198,600.00	96.89%	35.380.897,27
SMP NEGERI 1	990,974,875.00	937,274,886.00	94.58%	649.709.388,08
SMP NEGERI 2	680,446,009.00	377,337,077.00	55.45%	543.747.694,28
SMP NEGERI 3	470,753,881.00	453,407,000.00	96.32%	496.044.531,24
SMP NEGERI 4	823,716,802.00	709,034,940.00	86.08%	682.006.580,78
SMP NEGERI 5	389,844,096.00	327,621,254.00	84.04%	366.796.834,08
SMP NEGERI 6	602,831,518.00	569,564,517.87	94.48%	475.957.762,43
SMP NEGERI 7	784,146,332.00	722,257,854.00	92.11%	535.371.966,92
SMP NEGERI 8	478,478,287.00	468,244,587.46	97.86%	427.748.196,98
SMP NEGERI 9	611,386,505.00	530,522,700.00	86.77%	284.933.515,33
SMP NEGERI 10	532,087,324.00	520,491,201.00	97.82%	489.672.992,65
SMP NEGERI 11	660,105,499.00	654,623,000.00	99.17%	556.645.767,13
SMP NEGERI 12	670,632,804.00	603,910,577.00	90.05%	588.938.932,75
SMP NEGERI 13	652,713,247.00	412,270,933.00	63.16%	532.834.339,44
SMP NEGERI 14	364,306,072.00	341,995,950.00	93.88%	261.763.472,88
Total	14,072,813,103.00	12,807,264,421.41	91.01%	12.664.025.551,19

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.2
Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
PUSKESMAS TAWANGREJO			
Belanja Barang dan Jasa	1,309,562,000.00	1,079,841,966.00	82.46%
Belanja Persediaan	802,531,200.00	614,667,523.00	76.59%
Belanja Alat Tulis Kantor	31,674,600.00	31,601,100.00	99.77%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12,234,050.00	11,150,000.00	91.14%
Belanja Materai dan Benda Pos	1,950,000.00	689,500.00	35.36%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	44,324,640.00	43,094,474.00	97.22%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20,691,000.00	17,859,805.00	86.32%
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	47,639,800.00	46,361,695.00	97.32%
Belanja Cetak	38,481,000.00	32,647,181.00	84.84%
Belanja Penggandaan	7,158,000.00	5,401,500.00	75.46%
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	348,700,000.00	254,705,500.00	73.04%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,595,000.00	5,103,000.00	44.01%
Belanja makanan dan Minuman Tamu	4,500,000.00	280,500.00	6.23%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	46,488,000.00	17,650,000.00	37.97%
Belanja Perbekalan Kesehatan Pakai Habis/Obat	149,745,110.00	110,973,268.00	74.11%
Belanja Kegiatan senam Prolanis	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00%
Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	13,800,000.00	11,200,000.00	81.16%
Belanja Rompi Penanganan Covid 19	21,600,000.00	24,000,000.00	111.11%
Belanja Jasa	371,590,000.00	354,729,091.00	95.46%
Belanja Jasa kantor	116,400,000.00	108,393,013.00	93.12%
Belanja telepon	12,000,000.00	11,707,666.00	97.56%
Belanja air	9,600,000.00	7,282,320.00	75.86%
Belanja listrik	90,000,000.00	86,823,027.00	96.47%
Belanja surat kabar	3,600,000.00	1,800,000.00	50.00%
Belanja TV kabel	1,200,000.00	780,000.00	65.00%
Belanja Kerjasama Pihak Ketiga	14,880,000.00	9,764,078.00	65.62%
Pembakaran limbah dan pengangkutan abu	11,880,000.00	7,857,578.00	66.14%
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2,000,000.00	1,906,500.00	95.33%
Pengisian APAR	1,000,000.00	-	0.00%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	102,110,000.00	100,810,000.00	98.73%
Upah Tenaga Penjaga dan Kebersihan Puskesmas Induk	48,750,000.00	48,750,000.00	100.00%
Upah Petugas parkir Puskesmas Induk	9,100,000.00	9,100,000.00	100.00%
Upah Tenaga Penjaga dan Kebersihan Puskesmas Pembantu	31,200,000.00	31,200,000.00	100.00%
Upah Tenaga Cuci Puskesmas	9,860,000.00	9,860,000.00	100.00%
Upah Instruktur Senam Prolanis	600,000.00	600,000.00	100.00%
Upah Instruktur Senam Jumat Sehat	2,000,000.00	700,000.00	35.00%
Upah Pengangkut Sampah	600,000.00	600,000.00	100.00%
Belanja Jasa Pelayanan Non PNS :	125,700,000.00	123,850,000.00	98.53%
Dokter PTT	15,000,000.00	13,750,000.00	91.67%
Tenaga Kontrak BLUD Analis Keuangan	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD perawat	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD bidan	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD asisten apoteker	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Tenaga Kontrak BLUD rekam medis	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak Kegiatan Promosi Kesehatan	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD Administrator Kesehatan	7,200,000.00	6,600,000.00	91.67%
Tenaga Kontrak Pemkot Pengemudi Dokter Internship	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%	
Belanja Uang Overtime Tenaga Upahan hari Libur	12,000,000.00	11,800,000.00	98.33%
Belanja Perijinan Puskesmas	500,000.00	112,000.00	22.40%
Belanja Pemeliharaan :	107,250,800.00	91,056,805.00	84.90%
Belanja Pemeliharaan Gedung	60,232,700.00	53,656,000.00	89.08%
Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	22,018,100.00	17,791,705.00	80.80%
Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000.00	4,499,500.00	89.99%
Belanja Pemeliharaan Printer	4,500,000.00	2,548,000.00	56.62%
Belanja Pemeliharaan AC	5,000,000.00	4,115,200.00	82.30%
Belanja Pemeliharaan Genset	6,000,000.00	5,655,000.00	94.25%
Belanja Sarana Prasarana	4,500,000.00	2,791,400.00	62.03%
Belanja Perjalanan Dinas	28,190,000.00	19,388,547.00	68.78%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (Surabaya)	10,440,000.00	4,620,000.00	44.25%
Belanja Perjalanan Dinas Rujukan Luar daerah	2,750,000.00	0,00	0.00%
Belanja Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pegawai	15,000,000.00	14,768,547.00	98.46%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,309,562,000.00	1,079,841,966.00	82.46%
PUSKESMAS BANJAREJO			
Belanja Persediaan	1,150,387,450.00	1,047,002,138.00	91.01%
Belanja Alat Tulis Kantor	68,641,900.00	68,641,000.00	100.00%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17,618,250.00	17,618,000.00	100.00%
Belanja Materai dan Benda Pos	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	63,060,650.00	68,991,000.00	109.40%
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	14,661,250.00	17,664,082.00	120.48%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,691,900.00	3,616,109.00	97.95%
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	334,825,500.00	336,916,317.00	100.62%
Belanja Cetak	79,678,000.00	42,092,740.00	52.83%
Belanja Penggandaan	7,500,000.00	7,724,350.00	102.99%
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	468,825,000.00	399,715,840.00	85.26%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,125,000.00	31,499,500.00	112.00%
Belanja makanan dan Minuman Tamu	1,500,000.00	1,849,700.00	123.31%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	27,510,000.00	16,217,000.00	58.95%
Belanja Pakaian Seragam Dinas	32,500,000.00	32,206,500.00	99.10%
Belanja Jasa	356,325,000.00	332,330,579.00	93.27%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	105,350,000.00	104,122,000.00	98.83%
Belanja Jasa Pelayanan Non Medis	121,800,000.00	110,310,500.00	90.57%
Belanja Jasa Kantor	124,000,000.00	113,281,579.00	91.36%
Belanja Jasa Pembuatan Materi Multimedia	4,500,000.00	4,506,500.00	100.14%
Belanja Jasa Pengiriman	675,000.00	110,000.00	16.30%
Belanja Pemeliharaan	115,759,400.00	115,441,071.00	99.73%
Belanja Pemeliharaan dan Gedung	24,709,250.00	23,425,800.00	94.81%
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	39,911,250.00	40,196,406.00	100.71%
Belanja Saran dan Prasarana	41,138,900.00	41,817,350.00	101.65%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	10,000,000.00	10,001,515.00	100.02%
Belanja Perjalanan Dinas	68,750,000.00	32,773,200.00	47.67%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,750,000.00	4,868,000.00	35.40%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Kursus	5,000,000.00	-	0.00%
Belanja kerjasama dengan pihak ketiga	50,000,000.00	27,905,200.00	55.81%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,691,221,850.00	1,527,546,988.00	90.32%
PUSKESMAS ORO-ORO OMBO			
BELANJA PERSEDIAAN	935,922,000.00	889,299,075.00	95.02%
Belanja ATK	45,616,000.00	41,766,136.00	91.56%
Belanja Alat Listrik & Elektronika	6,305,500.00	6,329,000.00	100.37%
Belanja Materai	4,050,000.00	4,170,000.00	102.96%
Belanja Peralatan Kebersihan	51,684,000.00	64,025,820.00	123.88%
Belanja BBM dan Gas	2,612,500.00	2,400,000.00	91.87%
Belanja BHP dan Obat	114,629,000.00	114,968,031.00	100.30%
Pengelolaan Obat dan Embalage	3,013,500.00	209,000.00	6.94%
Biaya Cetak dan Penggandaan	136,523,500.00	135,549,705.00	99.29%
Belanja Rumah Tangga	45,929,000.00	64,058,103.00	139.47%
Belanja Makanan dan Minuman	54,045,000.00	53,681,500.00	99.33%
Belanja Seragam	13,200,000.00	17,329,200.00	131.28%
Belanja Alat dan Bahan Penanggulangan KLB COVID-19 :	458,314,000.00	384,812,580.00	83.96%
BELANJA JASA	301,950,000.00	277,031,635.00	91.75%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	147,700,000.00	136,882,500.00	92.68%
Belanja Jasa Pemusnahan Limbah Medis	16,000,000.00	18,183,000.00	113.64%
Belanja Jasa Kantor	10,800,000.00	10,468,629.00	96.93%
Belanja Media Promkes	22,500,000.00	6,650,000.00	29.56%
Belanja Jasa Retribusi Sampah	150,000.00	72,000.00	48.00%
Belanja Instruktur Senam	1,600,000.00	2,500,000.00	156.25%
Belanja Jasa Pelayanan Non ASN	97,200,000.00	96,050,000.00	98.82%
Biaya Berlangganan Jaringan	6,000,000.00	6,225,506.00	103.76%
Belanja Pemeliharaan	163,082,000.00	155,340,397.00	95.25%
Pemeliharaan Gedung	40,000,000.00	31,948,200.00	79.87%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas :	50,582,000.00	48,438,747.00	95.76%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana :	72,500,000.00	74,953,450.00	103.38%
Belanja Perjalanan Dinas	54,000,000.00	37,621,500.00	69.67%
Bantuan Transport	2,000,000.00	830,000.00	41.50%
UHK	15,600,000.00	14,135,000.00	90.61%
Kontribusi Pelatihan	32,000,000.00	22,656,500.00	70.80%
Rujukan Luar Kota	4,400,000.00	-	0.00%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,454,954,000.00	1,359,292,607.00	93.43%
PUSKESMAS MANGUHARJO			
Belanja Persediaan	950,424,000.00	934,848,098.00	98.36%
Biaya Obat dan Embalance	286,740,000.00	285,253,023.00	99.48%
Biaya ATK	49,314,700.00	49,180,700.00	99.73%
Biaya Cetak dan Penggandaan	43,988,000.00	40,891,925.00	92.96%
Biaya Konsumsi	354,815,000.00	351,184,900.00	98.98%
Biaya Peranko, Matrei, dan Benda Pos Lainnya	1,650,000.00	1,232,000.00	74.67%
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas	37,982,200.00	37,960,000.00	99.94%
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	66,785,600.00	66,735,950.00	99.93%
Biaya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	33,450,000.00	27,241,500.00	81.44%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Biaya Peralatan Listrik dan Elektronik	11,613,000.00	11,567,600.00	99.61%
Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	51,820,000.00	51,335,000.00	99.06%
Biaya Sewa Peralatan	3,265,500.00	3,265,500.00	100.00%
Biaya Promosi	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
Belanja Jasa	319,750,000.00	298,544,558.00	93.37%
Biaya Jasa Kantor	77,650,000.00	67,781,708.00	87.29%
Kerjasama Pihak Ke Tiga	23,450,000.00	21,384,800.00	91.19%
Tenaga Upahan	84,850,000.00	84,850,000.00	100.00%
Jasa Pelayanan	133,800,000.00	124,528,050.00	93.07%
Belanja Pemeliharaan	328,380,000.00	321,279,766.00	97.84%
Pemeliharaan Gedung	170,000,000.00	167,309,766.00	98.42%
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor	23,000,000.00	19,945,000.00	86.72%
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	86,380,000.00	85,865,500.00	99.40%
Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik	5,500,000.00	5,437,500.00	98.86%
Biaya Pemeliharaan AC	13,500,000.00	12,859,000.00	95.25%
Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop	30,000,000.00	29,863,000.00	99.54%
Belanja Perjalanan Dinas	19,730,000.00	17,476,500.00	88.58%
Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,180,000.00	6,570,000.00	80.32%
Kontribusi Pelatihan	11,550,000.00	10,906,500.00	94.43%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,618,284,000.00	1,572,148,922.00	97.15%
PUSKESMAS PATIHAN			
Belanja Persediaan	709,764,600.00	666,726,808.00	93.94%
Belanja Alat Tulis Kantor	24,523,050.00	24,402,300.00	99.51%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6,836,250.00	6,836,250.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	18,421,800.00	18,421,800.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	59,755,000.00	57,206,000.00	95.73%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37,658,000.00	24,900,200.00	66.12%
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	79,731,000.00	80,823,458.00	101.37%
Belanja Cetak	133,934,000.00	129,661,000.00	96.81%
Belanja Penggandaan	9,055,500.00	9,931,800.00	109.68%
PMT Pegawai	269,040,000.00	252,570,000.00	93.88%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,975,000.00	3,225,000.00	81.13%
Belanja makanan dan Minuman Tamu	2,355,000.00	3,075,000.00	130.57%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	18,000,000.00	16,500,000.00	91.67%
Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1,800,000.00	1,500,000.00	83.33%
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	31,680,000.00	25,074,000.00	79.15%
Belanja Makanan dan Minuman Senam LANSIA	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Belanja Pakaian Dinas	10,000,000.00	9,600,000.00	96.00%
Belanja Jasa	270,225,000.00	250,376,082.00	92.65%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	102,425,000.00	101,830,000.00	99.42%
Belanja Jasa Non PNS	63,300,000.00	61,868,500.00	97.74%
Belanja Jasa Kantor	57,900,000.00	54,622,632.00	94.34%
Belanja Jasa Narasumber LANSIA	400,000.00	200,000.00	50.00%
Belanja Jasa Senam LANSIA	2,400,000.00	1,600,000.00	66.67%
Belanja Jasa PME	10,900,000.00	-	0.00%
Belanja Jasa Limbah Medis	24,900,000.00	23,254,950.00	93.39%
Belanja Jasa IPAL	1,000,000.00	-	0.00%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Jasa Laundry	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%
Belanja Pemeliharaan	82,532,500.00	81,511,650.00	98.76%
Belanja Pemeliharaan dan Gedung	48,100,000.00	44,625,500.00	92.78%
Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	6,932,500.00	5,156,150.00	74.38%
Belanja Sarana Prasarana Komputer dan Printer	22,500,000.00	24,500,000.00	108.89%
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana AC	5,000,000.00	7,230,000.00	144.60%
Belanja Perjalanan Dinas	48,906,500.00	41,788,000.00	85.44%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,400,000.00	10,089,000.00	65.51%
Belanja Kapasitas Pegawai	33,506,500.00	31,699,000.00	94.61%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,111,428,600.00	1,121,225,998.00	100.88%
PUSKESMAS DEMANGAN			
Belanja Persediaan	662,138,000.00	503,111,618.00	75.98%
Belanja Alat Tulis Kantor	50,689,000.00	44,370,000.00	87.53%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	20,194,000.00	18,798,200.00	93.09%
Belanja Materai dan Benda Pos	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720,000.00	720,000.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	75,171,000.00	58,593,200.00	77.95%
Belanja Makanan dan Minuman	172,365,000.00	129,974,900.00	75.41%
Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	36,300,000.00	36,300,000.00	100.00%
Belanja Bahan Obat Kimia	125,097,000.00	82,656,040.00	66.07%
Belanja Perlengkapan	20,200,000.00	16,569,500.00	82.03%
Belanja Alat Pelindung Diri	50,000,000.00	29,720,513.00	59.44%
Belanja Cetak dan Penggandaan	109,752,000.00	83,759,265.00	76.32%
Belanja Jasa	380,306,000.00	359,370,014.00	94.49%
Tagihan Telepon	4,800,000.00	812,434.00	16.93%
Tagihan air	5,400,000.00	4,321,860.00	80.03%
Tagihan listrik	48,000,000.00	45,433,120.00	94.65%
Surat kabar	2,400,000.00	1,440,000.00	60.00%
Jasa Pos Luar Kota Luar Propinsi	256,000.00	29,500.00	11.52%
Tenaga kebersihan sekaligus pengamanan pustu (2 org x 13 bulan)	24,700,000.00	24,700,000.00	100.00%
Tenaga kebersihan sekaligus pengamanan pustu taman (1 org x 13 bulan)	17,550,000.00	17,550,000.00	100.00%
Tenaga kebersihan sekaligus pengamanan induk (2 org x 13 bulan)	35,100,000.00	35,100,000.00	100.00%
Jasa laundry	24,000,000.00	19,373,000.00	80.72%
Jasa pengangkutan dan pemusnahan limbah medis	15,000,000.00	13,707,600.00	91.38%
Upah instruktur senam prolanis BPJS (1 org x 12 bulan)	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
Upah narasumber penyuluh prolanis BPJS Non PS (1 org x 12 bulan)	1,000,000.00	600,000.00	60.00%
Upah petugas parkir (1 org x 13 bulan)	9,100,000.00	9,100,000.00	100.00%
Upah instruktur senam hari jumat (2 kali x 11 bulan)	8,800,000.00	6,350,000.00	72.16%
Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Upahan BLUD	175,200,000.00	173,758,000.00	99.18%
Belanja Video Promkes	6,000,000.00	5,088,000.00	84.80%
Pemeriksaan Untuk Program PME Laboratorium (Sesuai Penawaran BBLK)	2,000,000.00	1,906,500.00	95.33%
Belanja Pemeliharaan	209,548,000.00	156,546,384.00	74.71%
Belanja Perjalanan Dinas	43,774,000.00	29,333,500.00	67.01%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Total Belanja Barang dan Jasa	1,295,766,000.00	1,048,361,516.00	80.91%
-------------------------------	------------------	------------------	--------

Tabel 5.2.1.2.3
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
Belanja Barang dan Jasa RSUD	70,810,553,700.00	72,111,917,683.00	101.84%
5.2.2.01 Belanja Alat Tulis Kantor	180,009,000.00	264,565,850.00	146.97%
5.2.2.02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	120,193,263.00	138,124,800.00	114.92%
5.2.2.03 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1,950,000.00	2,593,000.00	132.97%
5.2.2.04 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih	1,005,764,612.00	988,845,585.00	98.32%
5.2.2.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15,754,200.00	8,315,129.00	52.78%
5.2.2.06 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20,870,000.00	20,665,000.00	99.02%
5.2.2.07 Belanja Peralatan dan Perlengkapan RT	111,355,000.00	24,439,758.00	21.95%
5.2.2.08 Belanja Bahan Kimia dan Obat-obatan	25,696,170,500.00	29,246,005,788.00	113.81%
5.2.2.09 Belanja Darah	1,224,000,000.00	1,051,920,000.00	85.94%
5.2.2.10 Belanja Linen	520,232,000.00	512,942,000.00	98.60%
5.2.2.11 Belanja Jasa Kantor	1,052,100,000.00	892,812,917.00	84.86%
5.2.2.12 Belanja Perpanjangan Ijin Radiologi	4,000,000.00	1,550,000.00	38.75%
5.2.2.13 Belanja Telepon	39,900,000.00	26,107,921.00	65.43%
5.2.2.14 Belanja Air	9,000,000.00	2,485,520.00	27.62%
5.2.2.15 Belanja Listrik	1,596,000,000.00	1,508,556,228.00	94.52%
5.2.2.16 Belanja Jasa Publikasi	200,400,000.00	189,511,185.00	94.57%
5.2.2.17 Belanja Surat Kabar/ Majalah/Televisi	15,120,000.00	11,565,000.00	76.49%
5.2.2.18 Belanja Kawat/Faximil/ Internet	36,000,000.00	0.00	0.00%
5.2.2.19 Belanja Paket/Pengiriman	5,000,000.00	1,130,100.00	22.60%
5.2.2.20 Belanja Pembayaran Pajak dan luran	6,310,000.00	6,306,400.00	99.94%
5.2.2.21 Belanja Uji Laboratorium	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.22 Belanja Jasa Sanitasi Lingkungan	1,450,512,000.00	1,647,191,608.00	113.56%
5.2.2.23 Belanja Jasa Pelayanan Medis	28,500,000,000.00	28,491,249,873.00	99.97%
5.2.2.24 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)	30,000,000.00	10,450,000.00	34.83%
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	630,100,000.00	567,126,700.00	90.01%
5.2.2.26 Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan	735,264,000.00	415,093,916.00	56.46%
5.2.2.27 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	11,825,000.00	8,912,000.00	75.37%
5.2.2.28 Belanja Penggantian Suku Cadang	64,590,000.00	44,602,813.00	69.06%
5.2.2.29 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Bermotor	60,538,400.00	35,537,792.00	58.70%
5.2.2.30 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor	13,550,000.00	12,268,400.00	90.54%
5.2.2.31 Belanja Cetak dan Penggandaan	813,958,000.00	775,616,271.00	95.29%
5.2.2.32 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	60,500,000.00	62,278,200.00	102.94%
5.2.2.33 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	391,140,000.00	277,030,404.00	70.83%
5.2.2.34 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	310,446,000.00	297,140,900.00	95.71%
5.2.2.35 Belanja Makanan dan Minuman Pasien	2,796,924,000.00	1,835,112,730.00	65.61%
5.2.2.36 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	91,359,000.00	90,519,000.00	99.08%
5.2.2.37 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	246,680,000.00	240,057,074.00	97.32%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

5.2.2.38 Belanja Bantuan Transport	18,542,000.00	4,863,408.00	26.23%
5.2.2.39 Belanja Akomodasi	5,718,000.00	383,500.00	6.71%
5.2.2.40 Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	189,500,000.00	166,317,835.00	87.77%
5.2.2.41 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	645,954,600.00	682,915,225.00	105.72%
5.2.2.42 Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.43 Belanja Pemeliharaan Saluran/Drainase/ Gorong-Gorong (Pematuan Air Hujan)	31,075,000.00	0.00	0.00%
5.2.2.44 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	250,144,125.00	227,077,870.00	90.78%
5.2.2.45 Belanja Pemeliharaan Mesin	245,009,000.00	116,096,000.00	47.38%
5.2.2.46 Belanja Pemeliharaan Alat Pertamanan	150,000,000.00	195,035,600.00	130.02%
5.2.2.47 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	580,230,000.00	620,677,747.00	106.97%
5.2.2.48 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolah Limbah Cair	66,200,000.00	31,193,000.00	47.12%
5.2.2.49 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih	157,210,000.00	115,254,680.00	73.31%
5.2.2.50 Belanja Pemeliharaan Laundry	237,286,000.00	107,692,256.00	45.39%
5.2.2.51 Belanja Pemeliharaan Instalasi Gizi	32,165,000.00	2,475,400.00	7.70%
5.2.2.52 Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	120,000,000.00	129,870,100.00	108.23%
5.2.2.53 Belanja Pemeliharaan Hydran	5,000,000.00	2,800,000.00	56.00%
5.2.2.54 Belanja Souvenir	5,000,000.00	0,00	0.00%
5.2.2.55 Belanja KIR	765,000.00	635,200.00	83.03%
5.2.2.56 Belanja Pemeliharaan Software	3,240,000.00	0,00	0.00%

5.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	16.145.485.000,00	11.938.091.671,53	74,30%	15.422.819.810,08

Realisasi belanja hibah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.938.091.671,53 atau 74,30% yang berarti Rp4.207.393.328,47 atau 25,70% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.145.485.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor ; 400-401.202/245/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan naskah perjanjian Hibah daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari belanja tidak langsung pada BPKAD selaku SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.3
Belanja Hibah
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Hibah OPD BPKAD SKPKD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.4.05.01 Hibah kepada KORPRI	168.250.000,00	168.250.000,00	100,00%	168.250.000,00
5.1.4.05.03 Hibah kepada KONI	1.000.000.000,00	495.444.189,53	49,54%	5.606.792.820,08
5.1.4.05.04 Hibah kepada Pramuka	308.050.000,00	307.507.500,00	99,82%	305.462.750,00
5.1.4.05.05 Hibah kepada PMI	2.348.054.000,00	2.234.224.982,00	95,15%	968.116.250,00
5.1.4.05.06 Hibah kepada MUI	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00
5.1.4.05.07 Hibah kepada BAZ	388.615.000,00	388.615.000,00	100,00%	388.615.000,00
5.1.4.05.11 Hibah kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.15 Hibah kepada GOW	15.000.000,00	0,00	00,00%	808.550.000,00
5.1.4.05.16 Hibah kepada Dewan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.17 Hibah kepada GOPTKI	15.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.19 Hibah Pengamanan Kepada Polresta	850.000.000,00	850.000.000,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.20 Hibah Pengamanan kepada Kodim	179.955.000,00	179.955.000,00	100,00%	179.955.000,00
5.1.4.05.28 Bantuan Operasional PAUD (DAK)	4.685.400.000,00	3.692.100.000,00	78,80%	4.019.720.990,00

Hibah OPD BPKAD SKPKD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.4.05.34 Hibah kepada ORKEMAS/LSM	89.500.000,00	0,00	00,00%	35.000.000,00
5.1.4.05.35 Hibah kepada Den POM Pengamanan Terpadu	129.409.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.41 Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah madrasah Diniyah (BOSDA Madin)	1.086.240.000,00	953.640.000,00	87,79%	0,00
5.1.4.05.44 Hibah kepada PGRI	142.000.000,00	0,00	00,00%	100.000.000,00
5.1.4.05.48 Hibah kepada Persatuan Purnawirawan	0,00	0,00	00,00%	10.000.000,00
5.1.4.05.50 Hibah kepada LKP2 TPA/TPQ	1.586.400.000,00	1.586.400.000,00	100,00%	1.586.400.000,00
5.1.4.05.54 Hibah kepada Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	0,00	0,00	00,00%	10.000.000,00
5.1.4.05.55 Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.000.000,00	0,00	00,00%	100.000.000,00
5.1.4.05.56 Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	200.357.000,00	0,00	00,00%	200.357.000,00
5.1.4.05.57 Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia	196.855.000,00	196.855.000,00	100,00%	130.000.000,00
5.1.4.05.59 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	676.400.000,00	326.200.000,00	48,23%	555.600.000,00
5.1.4.05.60 Hibah kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Madiun	1.389.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.61 Hibah kepada Perkumpulan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (PGPS)	151.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
TOTAL	16.145.485.000,00	11.938.091.671,53	73,94%	15.422.819.810,08

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	21.045.508.000,00	12.854.873.000,00	61,08%	15.001.277.870,00

Realisasi belanja bantuan sosial Per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.854.873.000,00 atau 61,08% yang berarti Rp8.190.635.000,00 atau 38,91% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp21.045,508.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Badan/ Lembaga/ Organisasi/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Bantuan Sosial OPD BPKAD SKPKD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	9.095.284.000,00	6.732.010.000,00	74,02%	7.841.779.870,00
5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	11.670.224.000,00	6.036.763.000,00	51,73%	7.092.630.000,00
5.1.5.04 Bantuan Sosial yang tidak dapat di rencanakan	280.000.000,00	86.100.000,00	30,75%	66.868.000,00
Total	21.045.508.000,00	12.854.873.000,00	61,08%	15.001.277.870,00

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada anggota masyarakat terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, jambanisasi, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan terdiri dari bantuan sosial untuk orang lanjut usia dan bantuan sosial untuk orang terlantar.

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal	200.671.333.488,41	191.011.897.074,57	95,19%	307.800.742.344,06

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal Per 31 Desember 2020 sebesar Rp191.011.897.074,57 atau 95,19% yang berarti Rp9.659.436.413,84 atau 4,81% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp200.671.333.488,41. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja Modal Per 31 Desember 2020 sebesar Rp191.011.897.074,57 dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp307.800.742.344,06 terjadi penurunan sebesar Rp116.778.845.269,49 atau terjadi penurunan sebesar 61,14%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2
Belanja Modal
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.01 Tanah	3.585.000.000,00	1.972.500.000,00	55,02%	0,00
5.2.3.02 Peralatan & mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,75
5.2.3.03 Gedung & bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26
5.2.3.04 Jalan, irigasi, jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80
5.2.3.05 Aset tetap lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00
5.2.3.06 Aset lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00
Total	200.671.333.488,41	191.011.897.074,57	95,19 %	307.800.742.344,06

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	3.585.000.000,00	1.972.500.000,00	55,02%	0,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp1.972.500.000 atau 55,02% yang berarti Rp1.612.500.000,00 atau 44,97% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.585.000.000,00. Realisasi belanja modal Tanah APBD sebesar Rp1.972.500.000,00 pada BPKAD berupa pembelian tanah seluas ±3.550 m² dari kepemilikan Hak Milik atas nama Bok Somoprawiro yang terletak di Jl. Manis Raya, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo. Pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembelian tanah dimaksudkan untuk kepentingan umum yaitu bangunan Rusunawa di Kota Madiun.

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.549.937.238,00 atau 94,85% yang berarti Rp3.718.873.338,00 atau 5,15% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.268.810.576,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.549.937.238,00 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp68.460.669.520,00 terjadi penurunan sebesar Rp89.267.718,00 atau 0,13%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00
5.2.3.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	1.007.500.000,00	933.680.000,00	92,67%	202.260.000,00
5.2.3.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	10.868.276.920,00	10.668.319.150,00	98,16%	9.432.965.880,00
5.2.3.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	77.150.000,00	0,00	00,00%	248.501.000,00
5.2.3.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	149.855.000,00	148.807.110,00	99,30%	345.850.330,00
5.2.3.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	50.696.922.256,00	49.803.401.068,00	98,24%	32.350.751.490,00
Belanja Modal Alat Kantor BOS	0,00	0,00	00,00%	1.271.763.615,00
5.2.3.02.06 Belanja Modal Peralatan Studio/ Komunikasi	210.200.000,00	205.850.000,00	97,93%	6.432.321.210,00
5.2.3.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	8.067.769.000,00	5.508.583.213,00	68,28%	16.184.556.695,00
5.2.3.02.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium	81.400.000,00	73.560.000,00	90,37%	27.321.300,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas	1.109.737.400,00	1.098.713.900,00	99,01%	1.964.378.000,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.2.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	44.607.526.956,00	44.489.436.610,00	99.74%	6.251.611.673,00
Dinas Kesehatan KB	4.851.069.150,00	2.433.909.077,00	50.17%	5.136.996.033,00
RSUD	6.498.769.500,00	5.659.828.136,00	87.09%	14.744.259.150,00
Dinas PU TR	1.156.300.000,00	1.081.827.797,00	93.56%	601.561.000,00
Dinas Perkim	3.142.234.000,00	3.128.493.500,00	99.56%	3.390.616.400,00
Dinas Satpol PP	189.500.000,00	185.460.000,00	97.87%	0,00
BPBD	450.800.000,00	435.354.227,00	96.57%	580.973.270,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00%	288.524.500,00
Dinas Tenaga Kerja	0	0,00	0,00%	104.777.000,00
Dinas LH	648.171.000,00	519.383.000,00	80.13%	488.832.600,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00%	573.160.984,00
Dinas Perhubungan	3.701.187.400,00	3.686.891.700,00	99.61%	3.968.915.500,00
Dinas Infokom	1.299.450.000,00	1.281.689.900,00	98.63%	11.751.952.430,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00%	166.169.000,00
Dinas Budparpora	161.339.920,00	159.815.000,00	99.05%	207.943.000,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00%	492.143.540,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	29.409.500,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00%	66.600.000,00
Bagian Umum	2.614.570.000,00	2.612.245.000,00	99.91%	3.229.352.702,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00%	2.500.000,00
Bagian Perekkesra	25.000.000,00	24.279.000,00	97.12%	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00%	230.628.000,00
Sekretariat DPRD	316.809.900,00	313.777.808,00	99.04%	12.324.785.235,00
BKD	82.800.000,00	81.564.000,00	98.51%	190.749.850,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00%	88.269.000,00
Bependa	632.125.000,00	625.250.400,00	98.91%	139.076.160,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	109.275.000,00
BAPPEDA	198.000.000,00	196.700.000,00	99.34%	408.943.600,00
Kec Kartoharjo	197.300.000,00	196.350.000,00	99.52%	962.295.813,00
Kec Manguharjo	225.650.000,00	180.946.500,00	80.19%	507.082.230,00
Kec Taman	1.105.507.750,00	1.093.635.073,00	98.93%	1.091.436.850,00
Bakesbangpol	90.000.000,00	89.650.000,00	99.61%	0,00
Dinas Pertanian KP	44.700.000,00	44.350.010,00	99.22%	239.231.500,00
Dinas Perdagangan	30.000.000,00	29.100.000,00	97.00%	92.598.000,00

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Total	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.326.461.602,57 atau 97,65% yang berarti Rp849.850.866,64 atau 2,35% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp36.176.312.469,21.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 OPD Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.3.1
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Pendidikan	23.439.629.792,21	23,255,987,832.21	99.22%	29.005.304.970,12
Dinas Kesehatan KB	257.000.000,00	249,660,900.00	97.14%	1.335.076.743,88
RSUD	381.275.325,00	353,395,960.00	92.69%	2.288.896.366,75
Dinas PU TR	2.954.750.000,00	2,826,637,260.00	95.66%	2.882.629.500,00
Dinas Perkim	4.989.396.000,00	4,582,059,347.64	91.84%	8.073.486.219,51
Dinas Satpol PP	187.150.000,00	186,791,000.00	99.81%	172.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00		0.00%	85.940.000,00
Dinas LH	201.050.000,00	187,947,000.00	93.48%	697.636.000,00
Dispendukcapil	0,00		0.00%	23.650.000,00
Dinas Perhubungan	264.200.000,00	253,530,000.00	95.96%	
Bagian Umum	195.927.230,00	190,650,000.00	97.31%	0,00
Sekretariat DPRD	0,00		0.00%	378.536.561,00
BKD	0,00		0.00%	3.203.796.978,00
Kec Kartoharjo	2.015.584.122,00	1,998,621,825.00	99.16%	211.150.000,00
Kec Manguharjo	587.350.000,00	545,665,000.00	92.90%	311.333.146,00
Kec Taman	703.000.000,00	695,515,477.72	98.94%	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0.00	00,00%	88.275.000,00
Total	36.176.312.469,21	35,326,461,602.57	97.65%	48.758.211.485,26

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp80.833.932.839,20 atau 96,71% yang berarti Rp2.747.870.070,20 atau 3,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp83.581.802.909,20. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.04. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80
5.2.3.04.01 Belanja Jalan	53.246.289.636,60	50.972.703.200,00	95,73%	93.277.992.490,46
5.2.3.04.02 Belanja Modal Jembatan	60.000.000,00	46.760.000,00	77,93%	349.934.960,00
5.2.3.04.03 Belanja Modal Bangunan Air/ Irigasi	28.371.426.772,00	28.006.544.520,00	98,71%	87.920.138.780,34
5.2.3.04.04 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan	1.904.086.500,00	1.807.925.119,00	94,95%	2.474.475.705,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.4.1
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	16.500.000,00	10.736.000,00	65,07%	170.899.452.331,74
Dinas PU TR	81.826.956.409,20	79.173.468.520,00	96,76%	8.120.038.323,21

Dinas Perkim	1.633.077.500,00	1.546.529.319,00	94,70%	0,00
Dinas LH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	307.791.141,85
Kecamatan Kartoharjo	68.509.000,00	66.659.800,00	97,30%	1.631.388.352,00
Dinas Pertanian KP	31.760.000,00	31.539.200,00	99,30%	3.063.871.787,00
Total	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.521.068.895,00 atau 83,99% yang berarti Rp290.022.889,00 atau 16,01% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.811.091.784,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.05. Belanja modal Aset Tetap lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	495.052.824,00
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan BOS	0,00	0,00	00,00%	2.393030.052,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.5.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.650.229.476,00
Dinas Perumahan	0,00	0,00	00,00%	49.853.400,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	00,00%	188.000.000,00
Total	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

Realisasi belanja modal aset lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.807.996.500,00 atau 86,44% yang berarti Rp440.319.250,00 atau 13,56% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.248.315.750,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Aset lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.06 Belanja modal Aset Lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00
5.2.3.06.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	903.315.500,00	699.109.490,00	77,39%	1.245.371.905,00
5.2.3.06.02 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud DED	1.200.000.000,00	972.025.040,00	81,00%	1.096.295.060,00
5.2.3.06.03 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Studi Kelayakan (FS)	650.000.000,00	647.132.000,00	99,56%	147.350.000,00
5.2.3.06.04 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rencana Induk/ Master Plan	145.000.250,00	139.930.000,00	96,50%	499.999.562,00

5.2.3.06.05 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Hasil Kajian	350.000.000,00	349.799.970,00	99,94%	682.220.000,00
Total	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.6.1
Belanja Modal Aset Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Aset Lainnya OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas PU TR	1.700.000.000,00	1.472.025.040,00	86,59%	849.826.560,00
Dinas Perkim	150.000.000,00	147.137.000,00	98,09%	369.320.000,00
Dinas Tenaga Kerja	152.490.500,00	152.360.500,00	99,91%	0,00
Dinas LH	50.000.000,00	49.799.970,00	99,60%	320.375.000,00
Dinas Infokom	200.000.000,00	197.197.000,00	98,60%	1.076.999.562,00
Dinas Budparpora	145.000.250,00	139.930.000,00	96,50%	0,00
Dinas Perpustakaan	253.300.000,00	252.976.990,00	99,87%	98.739.905,00
BKD	0,00	0,00	00,00%	115.250.000,00
BAPENDA	200.000.000,00	0,00	0,00%	
BAPPEDA	397.525.000,00	396.575.000,00	99,76%	693.007.000,00
Total	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	87.250.474.139,84	6.361.433.706,00	7,29%	118.877.262,00

Realisasi belanja tidak terduga Per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.361.433.706,00 atau 7,29% yang berarti Rp80.889.040.433,84 atau 92,71% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87.250.474.139,84.

Perincian realiasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.3.1
Belanja Tidak Terduga Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

OPD	Uraian	Jumlah
Dinas Kesehatan		3.959.737.264,00
	belanja mamin	1.152.635.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	belanja reagen rapid tes	2.160.327.264,00	
	belanja upah	167.750.000,00	
	belanja desinfektan	307.575.000,00	
	belanja mamin	2.700.000,00	
RSUD			1.646.174.990,00
	belanja mamin	187.570.000,00	
	belanja desinfektan	23.750.000,00	
	belanja pengadaan APD Gown Reuse dan balaclava	175.725.000,00	
	belanja alat kebersihan	475.401.690,00	
	belanja alat kesehatan	76.472.000,00	
	belanja pengadaan bahan medis habis pakai	198.538.400,00	
	belanja bahan pembersih	291.405.900,00	
	belanja jasa konstruksi ruang tunggu physical distancing klinik	198.721.000,00	
	belanja perencanaan dan pembangunan ruang tunggu physical distancing klinik	9.858.000,00	
	belanja pengawasan pembangunan ruang tunggu physical distancing klinik	8.733.000,00	
BPBD			256.511.575,00
	belanja upah	24.000.000,00	
	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor /rumah tangga	65.967.200,00	
	belanja upah	58.141.375,00	
Dinas Sosial			26.250.000,00
	bantuan transport	26.250.000,00	
SKPKD	pengembalian bantuan keuangan terkait keg peringatan hari jadi ke 75 propinsi Jawa timur	3.607.900,00	3.607.900,00
Dinas Kebudayaan			31.650.000,00
	penarikan kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah, uang sewa gedung wisma haji kota madiun	31.650.000,00	
Dinas Komunikasi dan Informasi			79.151.977,00
	belanja mamin	153.171.000,00	
	pengembalian belanja mamin	(3.732.723,00)	
	pengembalian btt dinas kominfo	(30.638.800,00)	
	pengembalian btt dinas kominfo	(39.647.500,00)	
Kecamatan Kartoharjo			123.600.000,00
	Belanja Upah	123.600.000,00	
Kecamatan Manguharjo			131.085.000,00
	Belanja Upah	131.085.000,00	
Kecamatan Taman			103.665.000,00
	Belanja Upah	103.665.000,00	
	Jumlah Total		6.361.433.706,00

5.2.4. BELANJA TRANSFER**5.2.4.1. Belanja Transfer Bantuan
Keuangan Lainnya**

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	651.920.000,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2020 merealisasi belanja transfer bantuan keuangan tahun anggaran 2020 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp700.062.000,00 yang digunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik, Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 34 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Perincian realiasi belanja transfer bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.4.1
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.7.05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	651.920.000,00
5.1.7.05.01 Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	91.984.000,00	91.984.000,00	100,00%	133.271.000,00
5.1.7.05.02 Belanja Bantuan kepada Partai PDIP	144.969.000,00	144.969.000,00	100,00%	133.697.000,00
5.1.7.05.03 Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	72.096.000,00	72.096.000,00	100,00%	81.228.000,00
5.1.7.05.04 Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	72.522.000,00	72.522.000,00	100,00%	66.496.000,00
5.1.7.05.05 Belanja Bantuan kepada Partai Nasdem	48.728.000,00	48.728.000,00	100,00%	43.858.000,00
5.1.7.05.06 Belanja Bantuan kepada Partai Golkar	54.199.000,00	54.199.000,00	100,00%	42.568.000,00

5.1.7.05.07	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	15.832.000,00	15.832.000,00	100,00%	26.102.000,00
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	45.329.000,00	45.329.000,00	100,00%	32.943.000,00
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan kepada Partai Hanura	0,00	0,00	00,00%	27.936.000,00
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	22.079.000,00	22.079.000,00	100,00%	19.713.000,00
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	80.128.000,00	80.128.000,00	100,00%	26.709.000,00
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	52.196.000,00	52.196.000,00	100,00%	17.399.000,00

5.3. PEMBIAYAAN

5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	223.649.613.318,81	223.649.613.313,81	100,00%	279.278.826.431,22

Anggaran dan realisasi tahun anggaran 2020 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 sebesar Rp223.649.613.318,81 . Sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2020 adalah sebesar realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp223.649.613.313,81 dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp279.278.826.431,22 terjadi penurunan sebesar Rp55.629.213.117,41 atau 19,91%.

5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat realisasi penerimaan pinjaman Daerah.

5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2020 terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Penanaman Modal , PTSP,Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.000.000,00 yang diperoleh dari setoran angsuran dari dana bergulir an. Sumira



PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

6.1. SAL Awal

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	223.649.613.313,81	279.278.826.431,22

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2019.

6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(223.649.613.313,81)	279.278.826.431,22

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sisalebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	268.933.182.301,20	223.649.613.313,81

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto tahun berjalan.

6.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	31 Desember2020	31 Desember2019
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

6.5. SAL Akhir

Uraian	31 Desember2020	31 Desember2019
SAL Akhir	268.933.182.301,20	223.649.613.313,81

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. SAL akhir diperoleh dari SAL awal, penggunaan SAL, Sisa lebih//kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan lain-lain.

BAB 7

PENJELASAN POS-POS NERACA

7.1. ASET

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset	2.748.491.955.577,70	2.658.741.300.273,45

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Apabila dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp89.750.655.304,25.

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Aset Pemerintah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset lancar	299.326.026.589,46	285.335.480.231,43
Investasi	154.319.701.895,23	149.291.587.947,91
Aset Tetap	2.158.740.823.172,04	2.090.514.505.680,71
Aset Lainnya	136.105.403.920,97	133.599.726.413,40
Total	2.748.491.955.577,70	2.658.741.300.273,45

7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Lancar	299.326.026.589,46	285.335.480.231,43

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp13.990.546.358,03.

Perincian aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1
Aset Lancar
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Lancar	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Kas di kas daerah	230.933.573.980,02	203.192.165.987,48
2. Deposito Berjangka 1 Bulan	0,00	0,00
3. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
4. Kas di bendahara penerimaan	1.810.000,00	2.117.000,00
5. Kas di BLUD RSUD	29.262.961.668,85	11.466.239.616,67
6. Kas di BLUD Puskesmas	6.899.779.814,16	7.160.289.222,91
7. Kas Lainnya	1.835.056.838,17	1.877.793.227,75
8. Piutang Pajak Daerah	8.748.314.188,00	9.834.978.010,82
9. Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.863.218.384,20)	(2.265.434.062,70)
10. Piutang Retribusi Daerah	5.543.993.242,83	3.051.850.565,50
11. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.099.675.927,06)	(817.880.715,24)
12. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	248.340.703,00	269.727.903,00
13. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(124.170.351,50)	(134.863.951,50)
14. Piutang Lain-lain	1.224.205.726,00	32.375.469.789,00
15. Penyisihan Piutang Lain-Lain	(56.014.884,26)	(336.332.858,40)
16. Persediaan	17.752.061.975,45	17.001.493.608,00
17. Belanja Dibayar Dimuka	19.008.000,00	2.657.866.888,14
Total	299.326.026.589,46	285.335.480.231,43

7.1.1.1. Kas dan Bank

7.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas di Kas Daerah	230.933.573.980,02	203.192.165.987,48

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Kas di kas daerah terdiri dari rekening giro pada Bank Jatim 0051021333 Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun dan rekening giro pada Bank Jatim 0051028111 Rekening Penampungan BPHTB.

Perincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.1
Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kas di Kas Daerah	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Bank Jatim 0051021333	230.933.573.980,02	203.192.165.987,48
2. Bank Jatim 0051028111	0,00	0,00
Total	230.933.573.980,02	203.192.165.987,48

7.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas di Bendahara Penerimaan	1.810.000,00	2.117.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara penerimaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.2
Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kas di bendahara penerimaan per OPD	2020	2019
1	2	3
Dinas Perhubungan	1.810.000,00	2.117.000,00
Total	1.810.000,00	2.117.000,00

7.1.1.1.3. Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas di BLUD RSUD	29.262.961.668,85	11.466.239.616,67

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD milik Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari saldo tunai dan saldo bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2019.

Perincian kas di kas BLUD RSUD milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.3
Kas BLUD RSUD
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kas di Kas BLUD RSUD	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Giro Bank Jatim	29.023.735.139,92	2.530.080.689,15
2. Tabungan PD Bank Daerah	0,00	0,00
3. Tabungan Bank Mandiri	62.413.792,13	49.505.362,60
4. Tabungan BNI	51.095.922,00	50.755.550,00
5. Tabungan BRI	100.533.000,80	55.751.091,80
6. Deposito Bank Jatim	0,00	2.000.000.000,00
7. Deposito Bank Mandiri	0,00	2.250.000.000,00
8. Deposito Bank BRI	0,00	2.000.000.000,00
9. Deposito Bank BNI	0,00	1.000.000.000,00
10. Deposito Bank BTN	0,00	1.526.308.323,12
11. Kas di bendahara penerimaan	25.183.814,00	0,00
Total	29.262.961.668,85	11.466.239.616,67

7.1.1.1.4. Kas di BLUD Puskesmas/JKN

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas di BLUD	6.899.779.814,16	7.160.289.222,91

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas/JKN di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang terdiri dari saldo tunai dan saldo bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2019. Perincian kas di kas BLUD Puskesmas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.4
Kas BLUD Puskesmas
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kas di Kas BLUD Puskesmas/JKN	Tahun 2020	Tahun 2019
1. BLUD Puskesmas Patihan	755.661.189,35	847.739.247,27
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	1.120.045.565,06	1.262.864.973,86
3. BLUD Puskesmas Banjarejo	2.310.777.279,96	2.187.428.610,07
4. BLUD Puskesmas Demangan	653.863.684,49	604.305.841,56
5. BLUD Puskesmas Oro-Oro Ombo	1.195.683.581,07	1.406.419.457,24
6. BLUD Puskesmas Tawangrejo	863.748.514,23	851.531.092,91
Total	6.899.779.814,16	7.160.289.222,91

7.1.1.1.5. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas Lainnya	1.835.056.838,17	1.877.793.227,75

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas lainnya berupa sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN, SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan saldo kas atas jasa giro rekening BTT pada kecamatan Kartoharjo sebesar Rp.539,72 yang belum dipindahbukukan ke Kasda pada akhir tahun 2020. Sisa dana BOS SDN dan SMPN serta bunga bank atas rekening BOS merupakan sisa kas yang dapat dipergunakan untuk operasional sekolah pada tahun berikutnya.

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian kas di kas lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.5
Kas Lainnya
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kas Lainnya	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Sisa Dana BOS SDN	257.869.574,08	288.245.485,05
2. Sisa Dana BOS SMPN	1.577.186.724,36	1.540.556.001,70
3. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	48.991.741,00
4. Jasa Giro rekening BTT	539,72	0,00
Total	1.835.056.838,17	1.877.793.227,75

7.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Piutang Pajak Daerah	8.748.314.188,00	9.834.978.010,82

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.2.a
Piutang Pajak Daerah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
Pajak hotel	21.605.560,00	4.081.182.211,20	4.086.959.271,20	15.828.500,00
Pajak rumah kos	3.160.000,00	284.171.400,00	285.574.400,00	1.757.000,00
Pajak restoran	93.601.832,00	11.479.057.802,8	11.403.756.266,8	168.903.368,00
Pajak hiburan	36.287.250,00	824.724.008,00	836.732.808,00	24.278.450,00
Pajak reklame	108.259.580,00	1.897.880.168,00	1.928.783.033,00	77.356.715,00
Pajak penerangan jalan	1.916.114.552,82	18.748.725.026,6	20.664.839.579,4	0,00
Pajak parkir	750.000,00	809.511.637,00	808.361.637,00	1.900.000,00
Pajak air tanah	29.180,00	329.460.686,60	329.465.566,60	24.300,00
PBB	7.655.170.056,00	24.732.653.246,0	23.929.557.447,0	8.458.265.855,00
BPHTB	0,00	27.567.526.535,0	27.567.526.535,0	0,00
	9.834.978.010,82	90.754.892.721	91.841.556.544	8.748.314.188,00
		Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2020		1.863.218.384,20
		Piutang Pajak Daerah Neto 2020		6.885.095.803,80

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.2.b
Umur Piutang Pajak Daerah
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak hotel	3.010.000,00	0	12.818.500,00	24.597.979,20
Pajak rumah kos	1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00

Pajak restoran	98.112.868,00	50.000,00	70.740.500,00	168.903.368,00
Pajak hiburan	9.713.450,00	0,00	14.565.000,00	24.278.450,00
Pajak reklame	25.991.255,00	17.204.655,00	34.160.805,00	77.356.715,00
Pajak penerangan jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak parkir	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Pajak air tanah	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
PBB	3.689.391.467,00	1.568.464.203,00	3.200.410.185,00	8.458.265.855,00
BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.829.900.340,00	1.585.718.858,00	3.332.694.990,00	8.748.314.188,00
Penyisihan Piutang	1%	10%	50%	
Penyisihan pajak	38.299.003,40	158.571.885,80	1.666.347.495,00	1.863.218.384,20
	3.791.601.336,60	1.427.146.972,20	1.666.347.495,00	6.885.095.803,80

7.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Piutang Retribusi Daerah	5.543.993.242,83	3.051.850.565,50

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian perubahan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.3.a
Piutang Retribusi
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dinas PU dan TR	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dinas Perhubungan	10.989.500,00	349.353.795,83	0,00	360.343.295,83
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	10.989.500,00	349.353.795,83	0,00	360.343.295,83
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

4. Dinas Budparpora	42.289.790,50	184.591.936,00	42.289.790,50	184.591.936,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	42.289.790,50	184.591.936,00	42.289.790,50	184.591.936,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. BPKAD	510.579.515,00	1.718.746.171,00	510.579.515,00	1.718.746.171,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	510.579.515,00	1.718.746.171,00	510.579.515,00	1.718.746.171,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dinas Pertanian & KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dinas Perdagangan	2.487.991.760,00	3.280.311.840,00	2.487.991.760,00	3.280.311.840,00
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	2.487.991.760,00	3.280.311.840,00	2.487.991.760,00	3.280.311.840,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah 2020	3.051.850.565,50	5.543.993.242,83	3.051.850.565,50	5.543.993.242,83
		Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2020		(1.099.675.927,06)
		Piutang Retribusi Daerah Netto 2020		4.444.317.315,77

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.3.b
Umur Piutang Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang Retribusi Daerah				
1. Dinas Perhubungan	349.353.795,83	0,00	10.989.500,00	360.343.295,83
2. Dinas Budparpora	184.591.936,00	0,00	0,00	184.591.936,00
3. BPKAD	1.324.644.320,00	38.983.520,00	355.118.331,00	1.718.746.171,00
4. Dinas Perdagangan	1.107.556.080,00	499.555.360,00	1.673.200.400,00	3.280.311.840,00
Total Piutang Retribusi 2020	2.966.146.131,83	538.538.880,00	2.039.308.231,00	5.543.993.242,83
Penyisihan Piutang Retribusi 2020	1%	10%	50%	
Penyisihan Piutang Retribusi 2020	26.167.923,36	53.853.888,00	1.019.654.115,50	(1.099.675.927,06)
Piutang Retribusi Netto 2020	2.590.624.412,64	484.684.992,00	1.019.654.115,50	4.444.317.315,97

7.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	248.340.703,00	269.727.903,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2020.

Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.4.a
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2020	269.727.903,00	0,00	21.387.200,00	248.340.703,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2020	(134.863.951,50)	0,00	(10.693.600,00)	(124.170.351,50)
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2020			124.170.351,50

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.4.b
Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2020

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pasar Logam	0,00	0,00	66.767.400,00	66.767.400,00
Pasar Mojorejo Lama	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Mojorejo Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Srijaya I	0,00	0,00	1.067.130,00	1.067.130,00
Pasar Srijaya II	0,00	0,00	77.743.000,00	77.743.000,00
Pasar Kawak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Sleko	0,00	0,00	26.622.000,00	26.622.000,00
Pasar Jalan Opak	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00
Pasar Kanigoro	0,00	0,00	40.741.173,00	40.741.173,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2020	0,00	0,00	248.340.703,00	248.340.703,00
Penyisihan 2020	1%	10%	50%	50%

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2020	0,00	0,00	124.170.352,00	(124.170.351,50)
<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2020</i>	0,00	0,00	124.170.352,00	124.170.351,50

7.1.1.5. Piutang Lain-lain

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Piutang Lain-lain	1.224.205.726,00	32.375.469.789,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Piutang lain-lain terdiri dari piutang bagian lancar investasi dana bergulir, piutang DBH pajak dan SP III dan piutang atas klaim BLUD RSUD. Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.a
Piutang Lain Lain
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Piutang Lain-Lain	1	2	3	4 = (1 + 2 -3)
Bagian lancar investasi dana bergulir	90.332.300,00	0,00	1.000.000,00	89.332.300,00
Piutang DBH pajak & SP III	3.206.561.049,00	0,00	3.206.561.049,00	0,00
Piutang Klaim BLUD Dinkes	0,00	16.806.300,00	0,00	16.806.300,00
Piutang Klaim Blud RSUD	29.078.586.440,00	1.118.067.126,00	29.078.586.440,00	1.118.067.126,00
Piutang Lain-Lain 2020	32.375.469.789,00	1.134.873.426,00	32.286.137.489,00	1.224.205.726,00
		Penyisihan Piutang lain lain 2020		(56.014.884,26)
		Piutang Lain-Lain Netto 2020		1.168.190.841,74

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.b
Umur Piutang Lain Lain
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang lain-lain				
Bagian lancar investasi dana bergulir	0,00	0,00	89.332.300,00	89.332.300,00
Piutang Klaim BLUD Dinkes	16.806.300,00	0,00	0,00	16.806.300,00
Piutang Klaim Blud RSUD	1.118.067.126,00	0,00	0,00	1.118.067.126,00
Jumlah Piutang Lain-lain 2020	1.134.873.426,00	0,00	89.332.300,00	1.224.205.726,00
Penyisihan 2020	1%	10%	50%	
Penyisihan Piutang Lain-lain 2020	11.348.734,26	0,00	44.666.150,00	(56.014.884,26)
Piutang Lain-Lain Netto 2020	1.123.524.691,74	0,00	44.666.150,00	1.168.190.841,74

7.1.1.5.1. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir	89.332.300,00	90.332.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo jumlah bagian lancar investasi dana bergulir yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari investasi dana bergulir tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian perubahan investasi dana bergulir per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.1.a
Investasi Dana Bergulir
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	3.760.000,00	0,00	300.000,00	3.460.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	51.320.100,00	0,00	400.000,00	50.920.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	14.440.000,00	0,00	300.000,00	14.140.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	20.812.200,00	0,00	0,00	20.812.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2020	90.332.300,00	0,00	1.000.000,00	89.332.300,00
Penyisihan Bagian Lancar Invstasi Dana Bergulir 2020				(44.666.150,00)
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2020				44.666.150,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.1.b
Umur Piutang Investasi Dana Bergulir
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	0,00	0,00	50.920.100,00	50.920.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	0,00	0,00	14.140.000,00	14.140.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	0,00	0,00	20.812.200,00	20.812.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2020	0,00	0,00	89.332.300,00	89.332.300,00
Penyisihan 2020	1%	10%	50%	
Penyisihan bagian lancar investasi dana bergulir 2020	0,00	0,00	44.666.150,00	44.666.150,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2020	0,00	0,00	44.666.150,00	44.666.150,00

7.1.1.5.2. Piutang BLUD

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Piutang BLUD	1.134.873.426,00	29.078.586.440,00

Jumlah saldo piutang BLUD tersebut merupakan jumlah tagihan piutang BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019. Piutang BLUD terdiri dari Piutang BLUD pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

Perincian perubahan Piutang BLUD per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.2.a
Piutang BLUD
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Piutang BLUD				
Dinas Kesehatan				
Blud Puskesmas	67.805.000,00	16.806.300,00	67.805.000,00	16.806.300,00
RSUD				
BPJS Kesehatan	28.979.007.636,00	1.098.680.666,00	28.979.007.636,00	1.098.680.666,00
Sewa Ruang Cafeteria	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Inhealth	868.000,00	186.460,00	868.000,00	186.460,00
INKA	2.910.672,00	0,00	2.910.672,00	0,00
KAI	0,00	0,00	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan	21.204.809,00	0,00	21.204.809,00	0,00
Jasa Raharja	9.210.723,00	0,00	9.210.723,00	0,00
Piutang Pasien Bayar	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang BPJS 2018 blm dibayar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sewa ATM dan Kantor Kas Bank Jatim		19.200.000,00		19.200.000,00
Koreksi Kurang Saldo Piutang lain2 RSUD	(4.220.400,00)		(4.220.400,00)	
Piutang BLUD 2020	29.078.586.440,00	1.134.873.426,00	29.078.586.440,00	1.134.873.426,00
		Penyisihan Piutang BLUD 2020		(11.348.734,26)
		Piutang BLUD Netto 2020		1.123.524.691,74

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang BLUD per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.2.b
Umur Piutang BLUD
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th< 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang lain-lain				
Piutang Klaim BLUD Dinas Kesehatan	16.806.300,00			16.806.300,00
Piutang Klaim BLUD	1.118.067.126,00	0,00	0,00	1.118.067.126,00
	1.134.873.426,00	0,00	0,00	1.134.873.426,00
Penyisihan 2020	1%	10%	50%	
Penyisihan piutang lain-lain	11.348.734,26	0,00	0,00	11.348.734,26
	1.123.524.691,74	0,00	0,00	1.123.524.691,74

7.1.1.5.3. Piutang DBH Pajak Provinsi

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Piutang DBH Pajak dan SP III Provinsi	0,00	3.206.551.049,00

Jumlah saldo piutang DBH Pajak Propinsi tersebut merupakan jumlah tagihan piutang DBH Pajak dan SP III Provinsi yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Piutang DBH Pajak dan SP III Propinsi tahun 2020 belum tersaji disebabkan karena penetapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang DBH Pajak Provinsi definitif sampai dengan tanggal selesai audit belum diterima.

Perincian perubahan Piutang DBH Pajak Propinsi per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.3.a
Piutang DBH Pajak dan SP III Provinsi
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Piutang DBH Pajak Propinsi				
Pajak Kendaraan Bermotor	3.206.551.049,00	0,00	3.206.551.049,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang DBH Pajak Provinsi 2020	3.206.551.049,00	0,00	3.206.551.049,00	0,00
		Penyisihan Piutang DBH Pajak 2020		0,00
		Piutang DBH Pajak Neto 2020		0,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang DBH Pajak Propinsi per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.3.b
Umur Piutang DBH Pajak dan SP III Provinsi
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang DBH Pajak Propinsi 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang DBH Pajak Propinsi	1%	10%	50%	
Penyisihan piutang DBH Pajak Propinsi 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang DBH Pajak Propinsi Netto 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Persediaan	17.752.061.975,45	17.001.493.608,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan obat dan persediaan barang pakai habis pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.6.a
Persediaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No	Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Persediaan Obat	9.910.571.393,50	9.480.439.938,00
2	Persediaan Bahan Pakai Habis	7.841.490.581,95	7.521.053.670,00
	Jumlah	17.752.061.975,45	17.001.493.608,00

Persediaan obat pada Dinas Kesehatan terdiri dari sisa persediaan obat pada gudang perbekalan dan seluruh puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Persediaan obat pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri seluruh sisa persediaan obat termasuk di seluruh ruang/poli di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian saldo persediaan obat Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.6.b
Persediaan Obat
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No	Persediaan Obat	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Kesehatan	7.809.822.943,00	7.227.046.421,00
	Kedaluwarsa	(0,00)	(0,00)
2	RSUD	1.969.770.338,00	2.107.393.606,00
	Kedaluwarsa	(0,00)	(0,00)
3	Dinas Pertanian	130.978.112,50	145.999.911,00
	Kedaluwarsa	(0,00)	(0,00)
	Jumlah	9.910.571.393,50	9.480.439.938,00

Persediaan bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, barang cetakan, karcis, pakaian dinas dan alat-alat Kontrasepsi. Perincian persediaan bahan pakai habis Per OPD per 31 Desember 2020 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) sebagaimana tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.6.c
Persediaan Pakai Habis
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Persediaan Bahan Pakai Habis	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
1 Dinas Pendidikan	0,00	5.018.420,00	0,00	5.018.420,00
2 Dinas Kesehatan dan KB	2.043.434.720,00	738.994.487,95	2.043.434.720,00	738.994.487,95
3 RSUD	1.837.660.110,00	1.848.981.264,00	1.837.660.110,00	1.848.981.264,00
4 Dinas Pekerjaan Umum	845.000,00	780.000,00	845.000,00	780.000,00
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	795.692.560,00	2.532.595.990,00	795.692.560,00	2.532.595.990,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.297.547.400,00	2.105.896.600,00	2.297.547.400,00	2.105.896.600,00
7	Dinas Perhubungan	42.196.890,00	180.000.000,00	42.196.890,00	180.000.000,00
8	Dinas PM,PTSP,Koperasi,Usaha Mikro/KPPT	203.700,00	0,00	203.700,00	0,00
9	Bagian Umum	398.838.970,00	290.545.880,00	398.838.970,00	290.545.880,00
10	Bagian Hukum	0,00	27.937.500,00	0,00	27.937.500,00
11	Badan Pendapatan Daerah	77.153.980,00	60.733.480,00	77.153.980,00	60.733.480,00
12	Dinas Pertanian dan KB	2.422.340,00	17.709.960,00	2.422.340,00	17.709.960,00
13	Dinas Perdagangan	25.058.000,00	32.297.000,00	25.058.000,00	32.297.000,00
	Jumlah	7.521.053.670,00	7.841.490.581,95	7.521.053.670,00	7.841.490.581,95

7.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Belanja Dibayar Dimuka	19.008.000,00	2.657.866.888,14

Jumlah tersebut atas belanja jasa iklan dinas Perhubungan pada akhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pada tahun 2019 asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor: 027/PPK/3592/401.202/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang meliputi polis asuransi kebakaran (*property all risk*), polis asuransi gempa bumi, dan polis asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan pada tahun 2020 asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor : 027/PPK/2379/401.202/2017 tanggal 16 Desember 2020 yang meliputi polis asuransi kebakaran (*property all risk*), polis asuransi gempa bumi.

7.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Investasi Jangka Panjang	154.319.701.895,23	149.291.587.947,91

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian investasi jangka panjang Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.2
Investasi Jangka Panjang
Per 31 Desember dan 31 Desember 2019

No	Investasi Jangka Panjang	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Investasi Non Permanen	19.724.433.249,08	19.509.673.835,14
2	Investasi Permanen	134.595.268.646,15	129.781.914.112,77
	Jumlah	154.319.701.895,23	149.291.587.947,91

7.1.2.1. Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Investasi Non Permanen	19.724.433.249,08	19.509.673.835,14

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi non permanen netto setelah memperhitungkan cadangan penyisihan milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

7.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Investasi Dana Bergulir	24.563.736.456,36	24.042.031.700,94

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK.

Perincian investasi dana bergulir LKK Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.a
Investasi Dana Bergulir LKK
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Modal Pemerintah Kota Madiun	12.233.825.000,00	12.233.825.000,00
2	Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.161.342.067,00	1.161.342.067,00
3	Pemupukan Modal dari Laba Usaha	10.133.711.671,40	9.372.697.779,56
4	Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00
5	Laba / Rugi LKK Kota Madiun	1.034.857.717,96	1.274.166.854,38
6	Jumlah Investasi Dana Bergulir LKK	24.563.736.456,36	24.042.031.700,94
7	Cadangan Penyisihan Piutang LKK	(4.839.303.207,28)	(4.532.357.865,80)
8	Investasi Dana Bergulir LKK Netto	19.724.433.249,08	19.509.673.835,14

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perguliran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.563.736.456,36 Nilai tersebut termasuk modal yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nilai pemupukan modal beserta Laba yang diperoleh LKK. Rincian laba berasal dari total LKK yang mendapatkan laba sebesar Rp1.043.805.429,96 dikurangi dengan LKK yang rugi sebesar Rp 8.947.712,00 maka diperoleh laba keseluruhan sebesar Rp1.034.857.717,96 Selain itu, nilai penyisihan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.839.303.207,28.

Perincian investasi non permanen-dana bergulir Per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.b
Investasi Non Permaen Dana Bergulir
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Dana Bergulir LKK				
Modal	13.395.167.067,00	0,00	0,00	13.395.167.067,00
Pemupukan Modal	9.372.697.779,57	769.714.441,83	(8.700.550,00)	10.133.711.671,40
Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba atau Rugi LKK	1.274.166.854,38	1.043.805.429,96	(1.283.114.566,00)	1.034.857.717,96
Dana Bergulir LKK 2020	24.042.031.700,95	1.813.519.871,79	(1.291.815.116,38)	24.563.736.456,36
		Penyisihan Dana Bergulir LKK 2020		(4.839.303.207,28)
		Dana Bergulir LKK Neto 2020		19.724.433.249,08

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, investasi non permanen tahun 2020 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). LKK mengklasifikasikan pinjaman dana yang digulirkan kepada masyarakat sesuai kategori yaitu lancar, kurang lancar dan macet.

Perincian investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.c
Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Investasi Dana Bergulir LKK				
Modal	13.395.167.067,00			13.395.167.067,00
Kec Kartoharjo				
Kanigoro	1.598.252.240,00	193.753.501,80	0,00	1.792.005.741,80
Tawangrejo	45.376.345,00	1.374.000,00	0,00	46.750.345,00
Rejomulyo	69.832.122,00	0,00	(5.161.300,00)	64.670.822,00
Pilangbango	445.033.615,00	50.244.154,00	0,00	495.277.769,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Oro-Oro Ombo	189.004.652,40	17.208.996,00	0,00	206.213.648,40
Sukosari	287.332.206,00	10.928.295,00	0,00	298.260.501,00
Kelun	553.638.940,00	42.236.381,77	0,00	595.875.321,77
Kartoharjo	374.478.352,16	14.317.759,11	0,00	388.796.111,27
Klegan	46.537.046,48	4.562.231,40	0,00	51.099.277,88
Kec Manguharjo				
Ngegong	652.275.828,80	61.947.078,60	0,00	714.222.907,40
Sogaten	248.906.574,96	11.202.875,63	0,00	260.109.450,59
Madiun Lor	192.677.521,00	19.880.370,00	0,00	212.557.891,00
Patihan	152.531.512,00	9.690.929,00	0,00	162.222.441,00
Nambangan Kidul	613.969.258,90	28.318.609,20	0,00	642.287.868,10
Manguharjo	271.986.312,00	7.724.298,00	0,00	279.710.610,00
Pangongangan	202.505.060,00	15.046.200,00	0,00	217.551.260,00
Nambangan Lor	102.392.940,00	10.696.200,00	0,00	113.089.140,00
Winongo	110.910.149,00	3.863.380,00	0,00	114.773.529,00
Kec Taman				
Demangan	638.330,00	0,00	(3.539.250,00)	(2.900.920,00)
Taman	105.170.309,50	1.810.520,40	0,00	106.980.829,90
Kuncen	268.081.176,00	27.605.170,20	0,00	295.686.346,20
Banjarejo	506.013.823,50	33.891.164,40	0,00	539.904.987,90
Josenan	472.227.425,00	55.767.515,00	0,00	527.994.934,00
Kejuron	373.124.115,40	25.797.261,60	0,00	398.921.377,00
Mojorejo	1.026.376.982,67	93.868.820,12	0,00	1.120.245.802,79
Pandean	379.116.138,60	23.113.030,80	0,00	402.229.169,40
Manisrejo	84.308.809,20	4.865.699,80	0,00	89.174.509,00
Laba atau Rugi LKK Th. 2020	1.274.089.854,38	1.043.805.429,96	(8.947.712,00)	1.034.857.717,96
Investasi Dana Bergulir LKK 2020	24.042.031.700,94	1.813.519.871,79	(1.286.576.816,38)	24.563.736.456,36
			Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK 2020	(4.839.303.207,28)
			Investasi Dana Bergulir LKK Neto 2020	19.724.433.249,08

Penjelasan lainnya mengenai penambahan dan pengurangan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir adalah penambahan dari pendistribusian Laba LKK tahun 2019 untuk Pemupukan Modal sebesar 60% yaitu Rp769.714.441,83. Sedangkan untuk 40% dari Laba LKK 2019 telah didistribusikan untuk insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%.

Penambahan yang lainnya merupakan penambahan atas Laba LKK tahun 2020 sebesar Rp1.043.805.429,96 yang belum didistribusikan untuk pemupukan modal sebesar 60%, insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD

sebesar 10%. Pengurangan atas pendistribusian rugi LKK tahun 2019 sebesar Rp8.700.550,00 dan rugi LKK tahun 2020 sebesar **Rp8.947.712,00**.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Khusus klarifikasi umur piutang investasi non permanen dana bergulir LKK penyisihan dilakukan berdasarkan jumlah piutang yang beredar pada LKK bukan berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang investasi non permanen LKK Per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.d
Umur Piutang Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Per 31 Desember 2020

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK				
Kec Kartoharjo				
Kanigoro	1.484.117.000,00	147.189.000,00	382.859.500,00	2.014.165.500,00
Tawangrejo	11.199.000,00	-	527.735.870,00	538.934.870,00
Rejomulyo	12.475.000	5.848.000,00	288.888.100,00	307.211.100,00
Pilangbango	461.705.000,00	71.660.000,00	285.980.150,00	819.345.150,00
Oro-Oro Ombo	250.685.000,00	38.400.000,00	400.193.752,00	689.278.752,00
Sukosari	354.453.500,00	93.445.000,00	260.846.000,00	708.744.500,00
Kelun	599.076.000,00	84.005.000,00	436.436.400,00	1.119.517.400,00
Kartoharjo	167.250.000,00	28.800.000,00	181.537.700,00	377.587.700,00
Klegan	49.670.000,00	15.900.000,00	436.108.000,00	501.678.000,00
Kec Manguharjo				
Ngegong	575.966.111,00	221.766.666,67	279.021.000,00	1.076.753.777,78
Sogaten	250.174.000,00	46.644.000,00	234.012.445,00	350.830.445,00
Madiun Lor	380.180.000,00	46.576.500,00	285.827.950,00	712.584.450,00
Patihan	196.390.000,00	11.335.000,00	371.214.670,00	578.939.670,00
Nambangan Kidul	181.878.000,00	65.340.000,00	473.006.750,00	720.224.750,00
Manguharjo	127.800.000,00	120.300.000,00	503.480.000,00	751.580.000,00
Pangongangan	331.640.000,00	34.900.000,00	321.806.500,00	688.346.500,00
Nambangan Lor	217.950.000,00	17.100.000,00	454.937.802,00	689.987.802,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Winongo	73.400.000,00	38.700.000,00	446.786.750,00	558.886.750,00
Kec Taman				
Demangan	-	2.300.000,00	178.962.500,00	181.262.500,00
Taman	112.098.000,00	51.588.000,00	324.610.500,00	488.296.500,00
Kuncen	312.174.000,00	84.111.000,00	198.428.000,00	594.713.000,00
Banjarejo	704.694.000,00	103.980.000,00	229.065.500,00	1.037.739.500,00
Josenan	876.069.000,00	10.900.000,00	85.648.500,00	972.617.500,00
Kejuron	179.431.500,00	78.168.500,00	357.576.300,00	615.176.300,00
Mojorejo	1.161.887.000,00	106.692.500,00	266.996.500,00	1.535.576.000,00
Pandean	340.595.000,00	54.690.000,00	527.851.500,00	923.136.500,00
Manisrejo	147.750.000,00	47.984.000,00	421.909.000,00	167.643.000,00
Piutang Dana Bergulir LKK 2020	9.560.707.111,11	1.628.323.166,67	9.161.727.639,00	20.350.757.916,78
Penyisihan piutang LKK	1%	10%	50%	
Penyisihan piutang Dana Bergulir LKK 2020	95.607.071,11	162.832.316,67	4.580.863.819,50	4.839.303.207,28
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK Neto 2020	9.465.100.040,00	1.465.490.850,00	4.580.863.819,50	15.511.454.709,50

7.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Penyisihan Kerugian Dana Bergulir	4.839.303.207,28	4.532.357.865,80

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen – investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyisihan tersebut dihitung berdasarkan nilai piutang yang beredar pada seluruh LKK, bukan dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Perincian penyisihan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.2
Penyisihan Piutang Dana Bergulir
Per 31 Desember 2020

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Penyisihan Piutang Lancar	95.607.071,11	103.191.861,50
2	Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	162.832.316,67	178.327.933,30
3	Penyisihan Piutang Macet	4.580.863.819,50	4.250.838.071,00
	Jumlah	4.839.303.207,28	4.532.357.865,80

7.1.2.2. Investasi Permanen

7.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Penyertaan Modal Pemda	134.595.268.646,15	129.781.914.112,77

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pencatatan investasi permanen pada BUMD Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang disetorkan ke kas daerah. Sedangkan investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan *cost method* sehingga investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim. Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.a
Investasi Permanen
Per 31 Desember 2020

Perubahan 2019	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Penyertaan Modal Pemda				
PDAM	52.408.126.079,49	12.346.116.920,36	9.528.495.105,98	55.216.362.565,87
PD BPR Bank Daerah	38.695.385.937,95	3.614.991.462,13	1.981.010.164,00	40.329.367.236,08
PD Aneka Usaha	5.162.295.345,33	1.595.250.651,87	1.224.113.903,00	5.533.432.094,20
Bank Jatim	33.516.106.750,00	0.00	0.00	33.516.106.750,00
Jumlah	129.781.914.112,77	17.546.973.707,00	12.733.619.172,98	134.595.268.646,15

Perusahaan Daerah Air Minum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2014 Tentang PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10

Tahun 2014 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal PDAM sebesar Rp15.525.563.148,50. Modal awal PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp200.099.148,50 ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2019. Pencatatan investasi permanen pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.b
Investasi Permanen PDAM
Per 31 Desember 2020

Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun, dan terakhir diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001	200,099,148.50
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1993/1994 pasal No. 2P.0.172.01-002 disetor tanggal 04 Maret 1994	4.000.000,00
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1994/1995 pasal No. 2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995	2.000.000,00
Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No. 4017-IND, PPP No. SLA-114/DP3/1999 oleh Pemerintah Kota Madiun dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 4 tahun 2002	5.969.273.000,00
Bantuan Modal sesuai SK Walikota No. 18 Tahun 2002	2.000.000.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	486.610.000,00
Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan Sektor Air Bersih Kota Madiun (Berita Acara Pemerihthah Kota Madiun No : 650/202/413.109/2000 tanggal 2 Januari 2001) terdiri dari :	267.872.000,00
a. Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjang 2.757 m sebesar	49.148.000
b. Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 m lengkap dengan panel dan pompa 1 unit sebesar	99.990.000,00
c. Pompa submersible kapasitas 40l/dt H= 40 m, 2 unit dan motor protektor 2 unt sebesar	118.734.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC 650/825/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	281.500.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-AB sesuai BA No. 650/001A/413.401/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	173,500,000.00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota madiun Sesuai Berita Acara No. 050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) dengan perincian :	1.993.728.000,00
a. Sumur Dalam	312.513.000,00
b. Pompa Submerble	247.041.000,00
c. Jaringan Perpipaan	1.087.614.000,00
d. Pemb R.Jaga Operator/Panel Pompa	135.383.000,00
e. Instalasi Gas Chlor	82.642.000,00

f. Pagar keliling Instalasi Sumur	128.5356.000,00	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa barang Sesuai Berita Acara No. 030/3180/401.024/2007 berupa :		885.287.000,00
a. Alat-alat Pengolahan Air	69.300.000,00	
b. Jaringan Pipa Distribusi	463.850.000,00	
c. Sumur-sumur	352.137.000,00	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa hasil kegiatan pembangunan saluran pemukiman dan jaringan air bersih kota Madiun sesuai Berita Acara Nomor : 050/880/401.109/2008 denga rincian :		1.569.029.000,00
a. Sumur-sumur	515.999.000,00	
b. Peralatan Pompa	67.331.000,00	
c. Alat-alat Pengolahan Air	158.774.000,00	
d. Jaringan pipa distribusi	826.925.000,00	
Berita Acara Serah Terima Konstruksi Jaringan Air Milik Pemerintah Kota Madiun No. 028/802/401.012/2009 tertanggal 2 September 2009 berupa :		1.692.665.000,00
a. Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi serta pembuatan MCK 7 (tujuh)	434.220.000,00	
b. Pengadaan generator set 150 kva	399.645.000,00	
c. Pembuatan sumur dalam lengkap dengan pompa q=30 liter per detik	287.900.000,00	
d. Sambungan rumah murah	570.900.000,00	
Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Milik Pemerintah Kota Madiun No. 030/1333/401.012/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :		2.158.667.500,00
a. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi	632.478.000,00	
b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	830.742.000,00	
c. Pemasangan sambungan rumah	695.447.500,00	
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/2246/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)		543.431.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/785/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)		775.782.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK), Jaringan pipa Distribusi, Meter Air Induk dan Sambungan Rumah		1.089.956.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat :		
Koreksi penyertaan modal pemerintah pusat per 31 desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :		8.094.640.563,00
a. Bantuan meter air dari Direktorat teknik penyehatan departemen penyehatan umum sebesar	30.970.000,00	
b. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1972 sd 1979 sebesar	127.445.650,00	
c. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1983 sd 1991 sebesar	3.243.396.718,00	
d. Bantuan tangki air dari PPSB Jatim sebesar	39.985.000,00	
e. Bantuan dari PPSPB tahun 1994 sebesar	374.220,00	
f. Bantuan Pipa dari PPSAB 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No.PDB-Jatim/30/97 sebesar	26.164.575,00	
g. Bantuan Pipa GMS,SOCK GI dari PPSAB		

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

tanggal 29 Maret 1999 sebesar	2.544.000,00	
h. Surat Perintah Mengeluarkan Barang dari kantor proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No.PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 berupa Pipa ACP 250 diameter 240 sebesar	11.419.200,00	
i. Berita Acara tanggal 9 Nopember 1999 No.01/BA/P4/1999 Antara pemimpin proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah sumur dalam sebesar	180.744.300,00	
j. Berita Acara tanggal 31 Maret 2000 No.SPL.050/2238/413.109/2000 antara pemimpin proyek program penyediaan dan pengelolaan air bersih SPL OECF INP 23 LG tahun anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun berupa :		
- Sebuah sumur dalam	223.419.000	
- Pipa distribusi ukuran 2Q dan 4Q	329.373.000	
- Pipa distribusi ukuran 4Q dan 6Q	224.268.000	
j. Kendaraan dinas truk tangki air minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker PKP air minum Jatim. Berita Acara Serah Terima Sementara No.02/BAST_PBS/PKP-AM/XII/2007.	187.220.000	
l. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor,75/bast/pk-pam.jt/2009 tanggal 15 Desember 2009 antara kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pekerjaan perpipaan	1.819.915.900	
m. Bukti pengeluaran barang No.157/mdn/pkp/-am/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur berupa perpipaan	14.238.700	
n. Berita Acara Serah Terima Nomor.10/BAST/PK-PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengelolaan air minum senilai	1.633.162.300	
Penyertaan Modal Pemerintah Jawa Timur :		
Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut :		168.346.000,00
a. Berita Acara Serah Terima Nomor : 602.1/638.3/121/PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC S12,5 50Q+Accesoris=2.511 M dan Pipa GI 50Q+Accesoris=-30m	100.000.000	
b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK121/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara kepala sub dinas pengembangan perkotaan dinas pemukiman propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan per sambungan Rp379.700 sehingga totalnya	68.346.000	
		28.356.386.211,50
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012		1.919.306.250,50
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		30.275.692.462,00
Penam nilai inves permanet selama th 2012 dan 2013		850.389.361,20
a. Laba Tahun 2011	4.251.946.806,00	

b. Deviden dari laba tahun 2011 (PAD)	(2.338.570.743,30)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(212.597.340,30)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(425.194.680,60)	
e. Jasa Produksi	(425.194.680,60)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/211/401.101/2013		1.089.956.000,00
Koreksi Cadangan		(173.890.609,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2012		295.902.693,75
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		32.338.049.907,95
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2012 dan 2013		909.569.900,35
a. Laba Tahun 2012	4.547.849.501,75	
b. Deviden dari laba tahun 2012 (PAD)	(2.501.317.225,96)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(227.392.475,09)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(454.784.950,18)	
e. Jasa Produksi	(454.784.950,18)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/1642/401.501/2013		53.855.000,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2013		117.827.232,25
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013		33.419.302.040,54
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2013 dan 2014		933.135.346,80
a. Laba Tahun 2013	4.665.676.734,00	
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	-2.566.122.203,70	
c. Dana Sosial & Pendidikan	-233.283.836,70	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	-466.567.673,40	
e. Jasa Produksi	-466.567.673,40	
f. Koreksi Cadangan		-168.299.732,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2014		1.804.284.739,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014		35.988.422.394,34
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2014 dan 2015		1.293.992.294,60
a. Laba Tahun 2014	6.469.961.473,00	
b. Deviden dari laba tahun 2014 (PAD)	-3.558.478.810,15	
c. Dana Sosial & Pendidikan	-323.498.073,65	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	-646.996.147,30	
e. Jasa Produksi	-646.996.147,30	
f. Sumbangan Gratis dari dangan umum Penyertaan dari Pemda sesuai Berita Acara No. : No. 050/088/401.501/2015		-823.200.000,00
		1.457.833.000,00
No. 050/359/401.501/2014		1.129.206.000,00
No. 050/361/401.501/2014		15.000.000,00
Penyertaan Dari Pemerinth Jatim sesuai Berita Acara: Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013		1.633.162.300,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2015		151.789.812,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015		40.846.205.800,94
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2015 dan 2016		1.324.350.257,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

a. Laba Tahun 2013	6.621.751.285,00	
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	-3.641.963.206,75	
c. Dana Sosial & Pendidikan	-331.087.564,25	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	-662.175.128,50	
e. Jasa Produksi	-662.175.128,50	
Penambahan nilai investasi permanen th 2016		3.260.477.959,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016		45.431.034.016,94
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		1.976.445.848,80
a. Laba Tahun 2016	9.882.229.244,00	
b. Deviden dari laba tahun 2016 (PAD)	(5.435.226.084,20)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(494.111.462,20)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(988.222.924,40)	
e. Jasa Produksi	(988.222.924,40)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(386.399.991,00)
g. Koreksi Penyertaan Modal Pusat		1.633.162.300,00
h. Koreksi pengurangan modal pemth Jatim		(1.633.162.300,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2017		427.964.813,17
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017		47.449.044.687,91
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		2.062.038.811,43
a. Laba Tahun 2017	10.310.194.057,17	
b. Deviden dari laba tahun 2017 (PAD)	(5.670.606.731,44)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(515.509.702,86)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(1.031.019.405,72)	
e. Jasa Produksi	(1.031.019.405,72)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		-564.910.128,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2018		74.437.015,11
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018		49.020.610.386,45
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2018 dan 2019		2.076.926.214,32
a. Laba Tahun 2018	10.384.631.072,14	
b. Deviden dari laba tahun 2018 (PAD)	(5.711.547.089,75)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(519.231.553,61)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(1.038.463.107,23)	
e. Jasa Produksi	(1.038.463.107,23)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(215.398.331,00)
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019		1.525.987.809,72
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019		52.408.126.079,49
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019 dan 2020		(9.528.495.105,98)
a. Laba Tahun 2019	11.910.618.882,00	
b. Deviden dari laba tahun 2019 (PAD)	(6.550.840.385,10)	
c. CSR	(238.212.377,65)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(357.318.566,47)	
e. Dana Kesejahteraan	(1.191.061.888,25)	
f. Jasa Produksi	(1.191.061.888,25)	
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2020		12.346.116.920,36
Koreksi Pengakuan atas laba PDAM tahun 2020		(9.385.328,00)
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020		55.216.362.565,87

PD. Bank Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui OPD yang membidangi koperasi, UMKM, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih PD.BPR Bank Daerah setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk daerah sebesar 50%. Penyajian rincian saldo awal tahun 2016 atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun telah terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan koreksi/penyesuaian sehingga jumlah yang tersaji pada neraca lembar muka (*on face*) dengan penjelasan yang tersaji dalam catatan atas Laporan Keuangan menjadi sesuai.

Perincian penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah Per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.c
Investasi Permanen PD. BPR Bank Daerah
Per 31 Desember 2020

1	Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun	8.000.032.295,00
2	Setoran penyertaan modal fasilitas kredit lunak	1.200.000.000,00
3	Saldo Cadangan Umum, Cadangan tujuan dan Laba ditahan	2.261.467.409,00
4	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010	683.347.316,00
	a. Laba Tahun 2009	1.893.174.388,00
	b. Deviden Tahun 2009	(946.587.194,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	-378.634.878,00
	d. Penambahan Cadangan tujuan	115.395.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	12.144.847.020,00
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011	744.432.458,43
	a. Laba Tahun 2010	2.052.943.192,43
	b. Deviden Tahun 2011	(1.026.471.596,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(410.588.638,00)
	d. Penambahan Cadangan tujuan	128.549.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	12.889.279.478,43
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012	761.385.899,04
	a. Laba Tahun 2011	2.435.268.003,04
	b. Deviden Tahun 2012	(1.217.634.004,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(487.053.600,00)
	d. Penambahan Cadangan tujuan	30.805.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	13.650.665.377,47
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013	847.803.032,00
	a. Laba Tahun 2012	2.826.010.104,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	b. Deviden Tahun 2013 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(1.413.005.051,95) (565.202.020,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		14.498.468.409,47
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2013 dan tahun 2014		847.334.871,00
	a. Laba Tahun 2013 b. Deviden Tahun 2014 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	2.824.449.575,00 (1.412.224.788,00) (564.889.916,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		15.345.803.280,47
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2014 dan tahun 2015		978.878.098,00
	a. Laba Tahun 2014 b. Deviden Tahun 2014 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	3.262.926.995,00 (1.631.463.497,00) (652.585.400,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		16.324.681.378,47
10	Tambahan Penyertaan Modal secara tunai berdasarkan SP2D Nomor :900/SPP-LS/052/401.207/2015 tanggal 24 Nopember 2015		12.106.967.705,00
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016		957.561.318,00
	a. Laba Tahun 2015 b. Deviden Tahun 2015 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	3.191.871.055,00 (1.595.935.527,00) (638.374.210,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		29.389.210.401,47
12	Tambahan Penyertaan Modal berupa Hibah Tanah dengan nilai buku 492.400.000,00 berdasarkan BA Nomor : 028/1938/401.207/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai appraisal Rp 3.693.000.000,00		3.693.000.000,00
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017		1.220.671.043,00
	a. Laba Tahun 2016 b. Deviden Tahun 2016 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	4.068.903.474,00 (2.034.451.735) (813.780.696,00)	
14	Pengurangan cadangan tujuan untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) sesuai surat No.580/82/401.502/2017 tanggal 28 Pebruari 2017		-181.650.001,00
	Saldo Perubahan Ekuitas		34.121.231.443,47
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2018		824.849.967,53
	a. Laba Tahun 2017 b. Deviden Tahun 2017 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	2.749.499.889,53 (1.374.749.944,00) (549.899.978,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		34.946.081.411,00
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019		1.273.041.820,95
	a. Laba Tahun 2018 b. Deviden Tahun 2018 c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	4.243.472.734,00 (2.121.736.367,05) (848.694.546,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		36.219.123.231,95
	Penambahan investasi permanent selama tahun 2019		2.476.262.706,00
	Saldo Perubahan Ekuitas tahun 2020		38.695.385.937,95
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2019 dan tahun 2020		(1.981.010.164,00)
	a. Laba Tahun 2019 b. Deviden Tahun 2019 c. Dana Kesejahteraan e. Dana Tantiem F Jasa Produksi	2.476.262.706,00 (1.361.944.488,00) (247.626.271,00) (99.050.508,00) (198.101.016,00)	

	G CSR (74.287.881,00)	
	Penambahan Investasi Permanent selama tahun 2020	3.505.627.734,96
	Koreksi Pengakuan atas laba bank Daerah tahun 2020	109.363.727,17
	Saldo Perubahan Ekuitas	40.329.367.236,08

PD. Aneka Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagai anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih PD Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Perincian penyertaan modal PD Aneka Usaha Per 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.d
Investasi Permanen PD. Aneka Usaha
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran modal awal Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha.	4.085.502.000,00
2	Penyertaan modal pembangunan SPBU pada tahun 2007 tertuang dalam Berita Acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan peningkatan sarana praarna aparatur sub kegiatan perencanaan pengawasan teknik serta lanjutan pembangunan SPBU tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2007 Nomor: 050/5689/401.015/2007 Tanggal 19 Desember 2007	4.489.766.850,00
3	Rugi Tahun – tahun sebelumnya	(2.307.352.895,00)
4	Saldo Awal Tahun 2008	6.267.915.955,00
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2008 dan tahun 2009	282.884.044,00
	a. Laba Tahun 2008 423.402.038,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (176.266.244,00)	
	c. Kenaikan cadangan 35.748.250,00	
	d. Pengurangan laba ditahan (474.431.588,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas	6.076.368.411,00
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2009 dan tahun 2010	228.277.463,00
	a. Laba Tahun 2009 550.651.565,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (423.402.038,00)	
	c. Kenaikan cadangan 101.027.936,00	
	d. Pengurangan laba ditahan (838.470.116,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas	5.466.175.758,00
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2010 dan tahun 2011	90.552.939,00
	a. Laba Tahun 2010 531.074.191,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (550.651.565,00)	
	c. Kenaikan cadangan 110.130.313,00	
	d. Pengurangan laba ditahan (1.059.866.296,00)	

	Saldo Perubahan Ekuitas	4.496.862.401,00
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011 dan tahun 2012	(241.533.518,69)
	a. Laba Tahun 2011	389.896.947,31
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(531.074.191,00)
	c. Kenaikan cadangan	(100.356.275,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.255.328.882,31
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013	105.556.865,00
	a. Laba Tahun 2012	361.281.487,00
	b. Deviden	(214.443.320,85)
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(175.453.626,15)
	d. Kenaikan cadangan	134.172.325,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.360.885.747,31
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013 dan tahun 2014	21.380.797,00
	a. Laba Tahun 2013	310.405.987,00
	b. Deviden	(198.704.817,85)
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(162.576.669,15)
	d. Kenaikan cadangan	72.256.297,00
	e. Koreksi saldo laba	(188.648.413,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.193.618.131,31
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014 dan tahun 2015	(109.968.733,85)
	a. Laba Tahun 2014	138.356.057,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(248.324.790,85)
	c. Koreksi saldo laba	(1.956.299.461,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	2.127.349.936,46
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016	24.628.851,00
	a. Laba Tahun 2015	307.932.523,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(283.303.672,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	2.151.978.787,46
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017	(418.308.949,00)
	a. Laba Tahun 2016	(171.962.931,00)
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(246.346.018,00)
	c. Koreksi saldo laba	(2.079.500,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	1.731.590.338,46
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2019	741.463.024,00
	a. Laba Tahun 2017	741.463.024,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	
	Saldo Perubahan Ekuitas	2.473.053.362,46
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2018	668.179.699,87
	a. Laba Tahun 2018	1.261.350.119,00
	b. Deviden	(407.804.663,20)
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(185.365.756,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	3.141.233.062,33
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019	521.062.283,00

	a. Laba Tahun 2017	1.530.142.378,00	
	b. Deviden	(693.742.600,00)	
	c. Sosial Pendidikan, Sokongan, jasa Produksi Penyertaan Modal Pemda	(315.337.495,00)	1.500.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas tahun 2019		5.162.295.345,33
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2019 dan tahun 2020		(1.224.113.903,00)
	a. Laba Tahun 2019	1.530.142.378,00	
	b. Deviden	(841.578.307,90)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan	(76.507.119,00)	
	E Dana Pensiun dan Sokongan	(153.014.238,00)	
	F Jasa Produksi	(153.014.238,00)	
	Penambahan Nilai investasi permanen selama th 2020		1.659.766.344,87
	Koreksi Pengakuan atas laba Aneka Usaha tahun 2020		(64.515.693,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas tahun 2020		5.533.432.094,20

PT. Bank Jatim

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2014.

Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2020 tersaji dalam dibawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.e
Investasi Permanen PT. Bank Jatim
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008	890.000.000,00
2	Setoran tanggal 20 April 2009	1.000.000.000,00
3	Setoran tanggal 22 Pebruari 2010	1.000.000,00
4	Setoran tanggal 21 Pebruari 2012	1.000.000.000,00
5	Setoran tanggal 27 Oktober 2012	7.500.000.000,00
6	Setoran tanggal 17 Pebruari 2014	20.000.000,000,00
7	Cadangan yang dikonversi saham	3.125.106.750,00
	Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2020	33.516.106.750,00

7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Tetap	2.158.740.823.172,04	2.090.514.505.680,71

Jumlah aset tetap merupakan aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.a
Perincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Tetap	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Tanah	723.583.589.093,00	709.974.665.568,00
2. Peralatan dan mesin	601.640.702.665,35	536.073.041.427,93
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(449.569.774.915,17)	(387.428.611.175,47)
4. Gedung dan bangunan	809.892.237.901,85	779.408.086.756,33
5. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(161.308.130.178,00)	(144.838.596.945,00)
6. Jalan, irigasi dan jaringan	1.212.978.744.299,82	1.134.991.899.147,73
7. Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	(592.225.027.097,00)	(548.497.749.661,00)
8. Aset tetap lainnya	6.141.437.160,19	5.915.704.660,19
9. Konstruksi dalam pengerjaan	7.607.044.242,00	4.916.065.902,00
Jumlahbruto (1+2+4+6+8+9)	3.361.843.755.362,21	3.171.279.463.462,18
Akumulasi penyusutan aset tetap (3+5+7)	(1.203.102.932.190,17)	(1.080.764.957.781,47)
Jumlah neto	2.158.740.823.172,04	2.090.514.505.680,71

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya tidak disusutkan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

7.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Tanah	723.583.589.093,00	709.974.665.568,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Rincian mutasi aset tetap tanah Per OPD pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.1.a
Perincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Tanah	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
Dinas Pendidikan	27.186.377.900,00	0,00	47.370.000,00	27.139.007.900,00
Dinas Kesehatan&KB	1.795.117.000,00	0,00	0,00	1.795.117.000,00
RSUD	15.390.000.000,00	0,00	0,00	15.390.000.000,00
Dinas PU&TR	343.274.861.345,00	11.636.423.525,00	22.031.681.600,00	332.879.603.270,00
DinasPerkim	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	101.888.000,00	0,00	0,00	101.888.000,00
Dinas Sosial	559.650.000,00	0,00	0,00	559.650.000,00
Dinas Tenaga Kerja	205.584.000,00	0,00	0,00	205.584.000,00
DinasLingkungan Hidup	4.667.000.000,00	0,00	0,00	4.667.000.000,00
Dispendukcapi	197.606.760,00	0,00	0,00	197.606.760,00
Dinas Perhubungan	4.096.691.514,00	0,00	0,00	4.096.691.514,00
Dinas Infokom	826.200.000,00	0,00	15.000.000,00	811.200.000,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	29.920.800,00	0,00	0,00	29.920.800,00
DinasBudparpora	0,00	22.031.681.600,00	0,00	22.031.681.600,00
DinasPerpustakaan	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	15.576.385.000,00	0,00	0,00	15.576.385.000,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	434.004.000,00	0,00	0,00	434.004.000,00
BKD	459.930.000,00	0,00	0,00	459.930.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
BPKAD	105.759.888.874,00	2.034.870.000,00	0,00	107.794.758.874,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	147.200.000,00	0,00	0,00	147.200.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	64.103.912.050,00	0,00	0,00	64.103.912.050,00
Kec Manguharjo	54.664.855.040,00	0,00	0,00	54.664.855.040,00
Kec Taman	49.385.166.285,00	0,00	0,00	49.385.166.285,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	435.541.000,00	0,00	0,00	435.541.000,00
Dinas Perdagangan	19.876.886.000,00	0,00	0,00	19.876.886.000,00
	709.974.665.568,00	35.702.975.125,00	22.094.051.600,00	723.583.589.093,00

Mutasi penambahan aset tetap tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.702.975.125,00 dengan perincian sebagai berikut :

Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari realisasi belanja modal APBD sebesar Rp1.972.500.000,00 pada BPKAD berupa pembelian tanah seluas ±3.550 m² dari kepemilikan Hak Milik atas nama Bok Somoprawiro yang terletak di Jl. Manis Raya, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo sebesar Rp1.952.000.000,00, biaya appraisal harga pasar tanah sebesar Rp15.000.000,00 dan biaya notaris sebesar Rp5.000.000,00. Pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembelian tanah dimaksudkan untuk kepentingan umum Pembangunan Rusunawa di Kota Madiun. Berdasarkan hasil peninjauan kembali dan setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Madiun, tanah yang telah dibangun Rusunawa teridentifikasi overlaping dengan SHM No. 1070 atasnama Bok Somoprawiro dengan HP No.45 atasnama Pemerintah Kota Madiun. Overlaping (tumpang tindih) terhadap HM No.1070 pemegang hak : Bok Somoprawiro dan HP No.45 pemegang hak : Pemerintah Kota Madiun adalah overlaping penuh (semua) bukan sebagian. Atas sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tersebut telah terbit SPPT PBB dengan NOP. 35.77.010.002.011.0032.0 atas nama PRAWIRO sejak tahun 1995 dan NOP tersebut untuk pembayaran PBB dilakukan secara tertib. Penyelesaian sengketa overlaping akan diselesaikan dengan dasar Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan proses ganti rugi berupa pembelian langsung melalui negoisasi dengan pemilik tanah/ahli waris dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh

Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”. Oleh karenanya Pemerintah Kota Madiun akan melaksanakan pengadaan tanah dengan cara jual beli/pelepasan hak . Harga tanah ditentukan oleh Appraisal Independen KJPP Asmawi dan Rekan pada tanggal 16 Nopember 2020 Nomor : 01156/0119-00/P1/11/0222/1/XI/2020 sebagai objek penilaian adalah tanah kosong seluas ± 3.550 m² dan diperoleh nilai pasar sebesar Rp1.952.500.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penambahan aset tanah yang berasal dari koreksi berupa sejumlah 10 bidang tanah jalan sebesar Rp3.297.310.000,00 dan 18 bidang tanah saluran/irigasi sebesar Rp8.339.113.525,00 pada DPU&TR sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPD Kota Madiun tahun 2019 dalam hal belum tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2019.

Penambahan aset tanah yang berasal dari mutasi antar OPD sebesar Rp22.094.051.600,00 berupa mutasi aset antara DPU&TR dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp22.031.681.600,00 yaitu tanah stadion wilis dan asrama haji. Pengelolaan stadion wilis dan asrama haji berpindah dari DPU&TR ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, mutasi aset antara BPKAD dengan Dinas Pendidikan sebesar Rp47.370.000,00 yaitu tanah Eks. SMPN 12 Jl. Jawa Kota Madiun dan mutasi aset antara BPKAD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.000.000,00 yaitu tanah eks telecenter di Jl. MT Haryono Kota Madiun.

Pengurangan aset tetap tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.094.051.600,00 berupa mutasi kurang yang berasal dari mutasi antar OPD antara DPU&TR dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp22.031.681.600,00 yaitu tanah stadion wilis dan asrama haji. Pengelolaan stadion wilis dan asrama haji berpindah dari DPU&TR ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, mutasi aset antara BPKAD dengan Dinas Pendidikan sebesar Rp47.370.000,00 yaitu tanah Eks. SMPN 12 Jl. Jawa Kota Madiun dan mutasi aset antara BPKAD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.000.000,00 yaitu tanah eks telecenter di Jl. MT Haryono Kota Madiun.

Per 31 Desember 2018 terdapat tiga sengketa hukum atas tanah dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Madiun dan Per 31 Desember 2019 dua sengketa hukum telah selesai di tahun 2019. Pada tahun 2020 satu sengketa hukum atas tanah dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Madiun dapat terselesaikan yaitu Tanah yang beralamat pada Jalan Musi Kelurahan Pandean dengan tanggal perolehan 31 Desember 1997. Pihak ketiga sudah tidak berkeinginan untuk memperpanjang/memperbaharui HGB yang telah masa habisnya namun perjanjian dilanjutkan dengan perikatan berupa Perjanjian antara Pemerintah Kota Madiun dengan Melisa Setiawaty Tentang Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Nomor : 030/3/401.202/2020 Tanggal 2 April 2020 dengan jangka waktu 5 tahun dan

berakhir pada 1 April 2025. Adapun upaya hukum kasasi atas sengketa hukum yang diajukan Pemerintah Kota Madiun telah diputuskan dengan menyetujui semua gugatan Pemerintah Kota Madiun.

7.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Peralatan dan Mesin	601.640.702.665,35	536.073.041.427,93

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2.a
Perincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Peralatan dan Mesin				
Dinas Pendidikan	85.088.868.054,02	44.490.286.610,00	1.871.370.200,00	127.707.784.464,02
Dinas Kesehatan&KB	45.486.297.783,49	2.453.909.077,00	563.248.740,00	47.376.958.120,49
RSUD	148.063.034.269,06	6.179.366.826,00	379.567.881,00	153.862.833.214,06
Dinas PU&TR	32.037.953.433,93	1.281.114.797,00	1.091.343.139,00	32.227.725.091,93
DinasPerkim	16.381.568.454,54	5.793.808.679,78	16.302.500,00	22.159.074.634,32
DinasSatpol PP	38.452.837.190,00	188.460.000,00	0,00	38.641.297.190,00
BPBD	4.360.167.684,30	435.354.227,00	1.551.500,00	4.793.970.411,30
Dinas Sosial	2.637.291.421,78	25.011.500,00	817.500,00	2.661.485.421,78
Dinas Tenaga Kerja	1.970.051.997,26	0,00	0,00	1.970.051.997,26
DinasLingkungan Hidup	17.832.447.493,51	519.383.000,00	36.330.500,00	18.315.499.993,51
Dispendukcapil	5.504.546.858,22	39.900.000,00	230.121.535,37	5.314.325.322,85
Dinas Perhubungan	17.648.839.448,16	4.189.992.700,00	1.373.026.539,00	20.465.805.609,16
Dinas Infokom	24.223.038.188,16	1.658.321.397,00	492.038.518,89	25.389.321.066,27
Dinas PM, PTSP, K&UM	2.791.418.832,42	0,00	8.105.000,00	2.783.313.832,42
DinasBudparpora	1.957.638.372,28	159.815.500,00	0,00	2.117.453.872,28
DinasPerpustakaan	4.584.887.987,30	414.340.000,00	2.000.000,00	4.997.227.987,30
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	465.021.443,44	0,00	0,00	465.021.443,44
Bagian Organisasi	982.728.043,08	2.730.000,00	98.181.060,00	887.276.983,08

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Bagian Umum	25.520.406.471,05	3.253.281.250,00	3.244.854.007,06	25.528.833.713,99
Bagian Hukum	668.709.880,00	0,00	135.584.570,00	533.125.310,00
Bagian Perekkesra	828.905.700,00	24.279.000,00	0,00	853.184.700,00
Bagian Adbang	1.320.658.180,00	0,00	78.306.530,00	1.242.351.650,00
Sekretariat DPRD	18.481.958.576,26	2.307.155.815,06	477.028.250,00	20.312.086.141,32
BKD	3.228.599.791,67	95.584.000,00	301.332.445,00	3.022.851.346,67
BPKAD	4.259.553.285,74	396.974.000,00	78.381.600,00	4.578.145.685,74
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	2.552.135.557,70	625.250.400,00	31.217.700,00	3.146.168.257,70
Inspektorat	1.986.597.764,90	0,00	71.551.000,00	1.915.046.764,90
BAPPEDA	3.087.672.038,00	196.700.000,00	763.500,10	3.283.608.537,90
Kec Kartoharjo	4.865.028.659,67	196.350.000,00	6.561.000,00	5.054.817.659,67
Kec Manguharjo	4.676.957.818,49	180.946.500,00	24.527.000,00	4.833.377.318,49
Kec Taman	3.679.245.105,34	1.093.635.073,00	298.781.009,00	4.474.099.169,34
Bakesbangpol	1.276.069.900,00	89.650.000,00	164.675.900,00	1.201.044.000,00
Dinas Pertanian&KP	3.940.560.355,33	44.350.010,00	2.060.000,00	3.982.850.365,33
Dinas Perdagangan	5.231.345.388,83	311.340.000,00	0,00	5.542.685.388,83
	536.073.041.427,93	76.647.290.361,84	11.079.629.124,42	601.640.702.665,35
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(449.569.774.915,17)
		Peralatan dan Mesin Neto		152.070.927.750,18

Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Realisasi belanja modal peralatan dan mesin APBD tahun anggaran 2020
- Koreksi peralatan dan mesin seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting
- Perolehan non APBD seperti perolehan gedung dan bangunan karena hibah, mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi

Perincian mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin per OPD pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2.b
Penjelasan Mutasi Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Realisasi belanja modal APBD	Koreksi peralatan dan mesin	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan 2019
Peralatan dan Mesin	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	44.489.436.610,00	0,00	850.000,00	44.490.286.610,00
Dinas Kesehatan&KB	2.433.909.077,00	0,00	20.000.000,00	2.453.909.077,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Penambahan selama 2020	Realisasi belanja modal APBD	Koreksi peralatan dan mesin	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan 2019
Peralatan dan Mesin	1	2	3	4
RSUD	5.602.713.136,00	0,00	576.653.690,00	6.179.366.826,00
Dinas PU&TR	1.081.827.797,00	199.287.000,00	0,00	1.281.114.797,00
DinasPerkim	3.128.493.500,00	2.665.315.179,78	0,00	5.793.808.679,78
DinasSatpol PP	185.460.000,00	0,00	3.000.000,00	188.460.000,00
BPBD	435.354.227,00	0,00	0,00	435.354.227,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	25.011.500,00	25.011.500,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	519.383.000,00	0,00	0,00	519.383.000,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00
Dinas Perhubungan	3.686.891.700,00	0,00	503.101.000,00	4.189.992.700,00
Dinas Infokom	1.281.689.900,00	0,00	376.631.497,00	1.658.321.397,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	159.815.500,00	0,00	0,00	159.815.500,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	414.340.000,00	414.340.000,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
Bagian Umum	2.612.245.000,00	0,00	641.036.250,00	3.253.281.250,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	24.279.000,00	0,00	0,00	24.279.000,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	313.777.808,00	0,00	1.993.378.007,06	2.307.155.815,06
BKD	81.564.000,00	0,00	14.020.000,00	95.584.000,00
BPKAD	0,00	0,00	396.974.000,00	396.974.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	625.250.400,00	0,00	0,00	625.250.400,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00
Kec Kartoharjo	196.350.000,00	0,00	0,00	196.350.000,00
Kec Manguharjo	180.946.500,00	0,00	0,00	180.946.500,00
Kec Taman	1.093.635.073,00	0,00	0,00	1.093.635.073,00
Bakesbangpol	89.650.000,00	0,00	0,00	89.650.000,00
Dinas Pertanian&KP	44.350.010,00	0,00	0,00	44.350.010,00
Dinas Perdagangan	29.100.000,00	0,00	282.240.000,00	311.340.000,00
	68.492.822.238,00	2.864.602.179,78	5.289.865.944,06	76.647.290.361,84

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal APBD sebesar Rp68.492.822.238,00, berasal dari dana APBD sebesar Rp65.603.306.422,00, dana BLUD sebesar Rp560.154.650,00 dan dana BOS sebesar Rp2.329.361.166,00.

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp2.864.602.179,78, berasal dari reklas antar aset tetap dari KIB C sebesar Rp1.601.148.821,00 dan koreksi reklas dari KIB C atas aset tahun lalu pada Dinas Perkim sebesar Rp 1.263.453.358,78.

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari perolehan non APBD sebesar Rp5.289.865.944,06 berupa mutasi antar OPD sebesar Rp4.203.606.254,06 dan hibah sebesar Rp1.086.259.690,00. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari hibah berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp850.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp20.000.000,00, Satpol PP sebesar Rp3.000.000,00, Dispendukcapil sebesar Rp18.900.000,00, Bagian Organisasi sebesar Rp2.730.000,00, Bagian Umum sebesar Rp1.718.000,00, BKD sebesar Rp14.020.000,00 berupa hadiah lomba yang diadakan oleh Pemerintah Kota Madiun penyelenggara Bagian Organisasi, hibah pada RSUD sebesar Rp 576.653.690,00 berasal dari anggaran BLUD dan BTT, hibah pada Dinas Sosial sebesar Rp24.194.000,00 berasal dari pusat (Kementerian Sosial RI), hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp170.000.000,00 berasal dari pusat (Kementerian Perhubungan RI), hibah pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp235.000.000,00 berasal dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu dan hibah pada BPKAD sebesar Rp19.194.000,00 berasal dari Bank Jatim Cabang Madiun.

Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- reklas realisasi belanja modal peralatan dan mesin APBD tahun anggaran 2020 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin dibawah Rp500.000.
- reklas aset tetap rusak berat atas peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- koreksi peralatan dan mesin seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Perincian mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2.c
Penjelasan Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Reklas belanja modal APBD	Reklas aset tetap rusak berat	Koreksi peralatan dan mesin	Saldo mutasi pengurangan 2020
Peralatan dan Mesin	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	473.499.939,00	1.368.842.761,00	29.027.500,00	1.871.370.200,00
Dinas Kesehatan&KB	1.266.000,00	559.982.740,00	2.000.000,00	563.248.740,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

RSUD	14.055.000,00	365.512.881,00	0,00	379.567.881,00
Dinas PU&TR	197.659,00	1.091.145.480,00	0,00	1.091.343.139,00
DinasPerkim	15.307.000,00	995.500,00	0,00	16.302.500,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	1.551.500,00	0,00	0,00	1.551.500,00
Dinas Sosial	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	20.913.000,00	14.600.000,00	817.500,00	36.330.500,00
Dispendukcapil	0,00	230.121.535,37	0,00	230.121.535,37
Dinas Perhubungan	14.190.000,00	755.630.042,00	603.206.497,00	1.373.026.539,00
Dinas Infokom	0,00	16.500.000,00	475.538.518,89	492.038.518,89
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	8.105.000,00	0,00	8.105.000,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	98.181.060,00	0,00	98.181.060,00
Bagian Umum	520.000,00	0,00	3.244.334.007,06	3.244.854.007,06
Bagian Hukum	0,00	135.584.570,00	0,00	135.584.570,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	78.306.530,00	0,00	78.306.530,00
Sekretariat DPRD	550.000,00	0,00	476.478.250,00	477.028.250,00
BKD	0,00	280.332.445,00	21.000.000,00	301.332.445,00
BPKAD	0,00	78.381.600,00	0,00	78.381.600,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	23.217.700,00	8.000.000,00	0,00	31.217.700,00
Inspektorat	0,00	71.551.000,00	0,00	71.551.000,00
BAPPEDA	763.500,10	0,00	0,00	763.500,10
Kec Kartoharjo	561.000,00	0,00	6.000.000,00	6.561.000,00
Kec Manguharjo	0,00	12.027.000,00	12.500.000,00	24.527.000,00
Kec Taman	69.955.000,00	36.096.936,00	192.729.073,00	298.781.009,00
Bakesbangpol	0,00	164.675.900,00	0,00	164.675.900,00
Dinas Pertanian&KP	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	639.424.798,10	5.374.572.980,37	5.065.631.345,95	11.079.629.124,42

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp639.424.798,10.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas ke aset lain-lain karena rusak berat sebesar Rp5.374.572.980,37.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa koreksi sebesar Rp5.065.631.345,95 dikarenakan hibah sebesar Rp67.041.918,89, mutasi antar OPD sebesar Rp4.203.606.254,06, reklas antar aset tetap sebesar Rp582.083.173,00 dan koreksi sebesar Rp212.900.000,00. Koreksi kurang atas aset tetap peralatan mesin sebesar Rp212.900.000,00 berasal dari koreksi reklas aset tetap ke ATB pada Dinas Perhubungan sebesar Rp196.900.000,00 dan double catat nilai aset tetap pada Dinas Kesehatan&KB, Dinas Perpustakaan, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo sebesar Rp16.000.000,00.

Perincian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2.d
Perincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Dinas Pendidikan	67.469.281.965,30	19.680.762.823,00	1.368.842.857,59	85.781.201.930,71
Dinas Kesehatan&KB	35.524.909.409,04	3.735.253.465,00	561.125.733,00	38.699.037.141,04
RSUD	116.969.362.954,80	13.643.815.431,00	365.512.958,84	130.247.665.426,96
Dinas PU&TR	22.410.499.000,91	2.848.812.390,00	1.091.145.491,81	24.168.165.899,10
DinasPerkim	7.012.241.855,00	3.762.651.932,00	995.543,00	10.773.898.244,00
DinasSatpol PP	20.756.798.456,00	4.512.575.953,00	14,00	25.269.374.395,00
BPBD	3.448.956.245,00	378.752.165,00	5,00	3.827.708.405,00
Dinas Sosial	1.908.463.884,00	258.077.463,00	4,00	2.166.541.343,00
Dinas Tenaga Kerja	1.487.218.538,00	142.358.020,69	0,00	1.629.576.558,69
DinasLingkungan Hidup	12.709.357.073,81	1.467.170.233,49	14.600.000,00	14.161.927.307,30
Dispendukcapil	4.045.456.463,00	608.410.101,37	230.121.566,77	4.423.744.997,60
Dinas Perhubungan	11.987.816.406,28	2.674.142.450,00	1.011.506.246,09	13.650.452.610,19
Dinas Infokom	11.472.067.819,04	5.244.472.661,00	240.872.942,11	16.475.667.537,93
Dinas PM, PTSP, K&UM	2.006.271.240,83	294.002.579,01	8.105.000,00	2.292.168.819,84
DinasBudparpora	1.592.257.085,42	156.899.474,00	1,00	1.749.156.558,42
DinasPerpustakaan	3.375.363.359,00	880.775.452,00	2.000.003,00	4.254.138.808,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	435.871.626,00	13.060.069,00	0,00	448.931.695,00
Bagian Organisasi	821.135.122,00	84.052.674,00	98.181.060,00	807.006.736,00
Bagian Umum	19.404.182.734,24	2.194.765.823,00	1.973.293.066,29	19.625.655.490,95
Bagian Hukum	620.821.880,00	21.404.000,00	135.584.570,00	506.641.310,00
Bagian Perekkesra	712.274.830,00	61.217.896,00	3,00	773.492.723,00
Bagian Adbang	997.662.694,00	145.611.665,00	78.306.530,00	1.064.967.829,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Sekretariat DPRD	6.152.571.446,70	4.048.204.841,00	22.689.927,35	10.178.086.360,35
BKD	2.908.558.443,00	188.226.919,00	301.332.445,90	2.795.452.916,10
BPKAD	3.645.367.015,02	544.657.991,00	78.381.605,63	4.111.643.400,39
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	2.211.323.157,46	320.769.044,69	8.000.000,00	2.524.092.202,15
Inspektorat	1.694.411.515,00	128.136.588,00	71.551.013,10	1.750.997.089,90
BAPPEDA	2.487.621.454,00	260.114.334,00	45,04	2.747.735.742,96
Kec Kartoharjo	4.086.445.394,62	368.249.329,11	6.000.000,00	4.448.694.723,73
Kec Manguharjo	4.284.090.716,00	240.110.235,00	18.027.008,80	4.506.173.942,20
Kec Taman	3.279.460.241,00	374.406.979,62	36.096.936,00	3.617.770.284,62
Bakesbangpol	1.189.269.381,00	66.227.094,00	164.675.901,60	1.090.820.573,40
Dinas Pertanian&KP	3.463.578.002,00	202.654.374,00	0,00	3.666.232.376,00
Dinas Perdagangan	4.857.643.768,00	477.309.774,00	5,36	5.334.953.536,64
	387.428.611.175,47	70.028.112.223,98	7.886.948.484,28	449.569.774.915,17

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap peralatan dan mesin
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD

Tabel 7.1.3.2.e
Penjelasan Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Beban tahun berjalan	Koreksi akumulasi peralatan dan mesin	Saldo mutasi tambah penambahan 2020
Peralatan dan Mesin	1	2	3
Dinas Pendidikan	19.680.479.490,00	283.333,00	19.680.762.823,00
Dinas Kesehatan&KB	3.731.253.465,00	4.000.000,00	3.735.253.465,00
RSUD	13.643.815.431,00	0,00	13.643.815.431,00
Dinas PU&TR	2.848.812.390,00	0,00	2.848.812.390,00
DinasPerkim	2.825.763.715,00	936.888.217,00	3.762.651.932,00
DinasSatpol PP	4.511.975.953,00	600.000,00	4.512.575.953,00
BPBD	378.752.165,00	0,00	378.752.165,00
Dinas Sosial	258.077.463,00	0,00	258.077.463,00
Dinas Tenaga Kerja	142.358.018,00	2,69	142.358.020,69
DinasLingkungan Hidup	1.467.170.228,00	5,49	1.467.170.233,49
Dispendukcapil	582.685.101,00	25.725.000,37	608.410.101,37
Dinas Perhubungan	2.341.041.450,00	333.101.000,00	2.674.142.450,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Infokom	4.951.286.463,00	293.186.198,00	5.244.472.661,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	294.002.560,00	19,01	294.002.579,01
DinasBudparpora	156.899.474,00	0,00	156.899.474,00
DinasPerpustakaan	467.205.452,00	413.570.000,00	880.775.452,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	13.060.069,00	0,00	13.060.069,00
Bagian Organisasi	83.506.675,00	545.999,00	84.052.674,00
Bagian Umum	2.008.892.783,00	185.873.040,00	2.194.765.823,00
Bagian Hukum	21.404.000,00	0,00	21.404.000,00
Bagian Perekkesra	61.217.896,00	0,00	61.217.896,00
Bagian Adbang	145.611.659,00	6,00	145.611.665,00
Sekretariat DPRD	3.154.254.944,00	893.949.897,00	4.048.204.841,00
BKD	184.721.919,00	3.505.000,00	188.226.919,00
BPKAD	289.700.848,00	254.957.143,00	544.657.991,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	320.769.039,00	5,69	320.769.044,69
Inspektorat	128.136.588,00	0,00	128.136.588,00
BAPPEDA	260.114.334,00	0,00	260.114.334,00
Kec Kartoharjo	368.249.309,00	20,11	368.249.329,11
Kec Manguharjo	240.110.235,00	0,00	240.110.235,00
Kec Taman	374.406.974,00	5,62	374.406.979,62
Bakesbangpol	66.227.094,00	0,00	66.227.094,00
Dinas Pertanian&KP	202.654.362,00	12,00	202.654.374,00
Dinas Perdagangan	195.069.774,00	282.240.000,00	477.309.774,00
	66.399.687.320,00	3.628.424.903,98	70.028.112.223,98

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap peralatan dan mesin
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD

Tabel 7.1.3.2.f
Penjelasan Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Beban tahun berjalan	Koreksi akumulasi peralatan dan mesin	Saldo mutasi tambah penambahan 2020
	1	2	3
Peralatan dan Mesin			
Dinas Pendidikan	0,00	1.368.842.857,59	1.368.842.857,59

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Kesehatan&KB	0,00	561.125.733,00	561.125.733,00
RSUD	0,00	365.512.958,84	365.512.958,84
Dinas PU&TR	0,00	1.091.145.491,81	1.091.145.491,81
DinasPerkim	0,00	995.543,00	995.543,00
DinasSatpol PP	0,00	14,00	14,00
BPBD	0,00	5,00	5,00
Dinas Sosial	0,00	4,00	4,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00
Dispendukcapil	0,00	230.121.566,77	230.121.566,77
Dinas Perhubungan	0,00	1.011.506.246,09	1.011.506.246,09
Dinas Infokom	0,00	240.872.942,11	240.872.942,11
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	8.105.000,00	8.105.000,00
DinasBudparpora	0,00	1,00	1,00
DinasPerpustakaan	0,00	2.000.003,00	2.000.003,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	98.181.060,00	98.181.060,00
Bagian Umum	0,00	1.973.293.066,29	1.973.293.066,29
Bagian Hukum	0,00	135.584.570,00	135.584.570,00
Bagian Perekkesra	0,00	3,00	3,00
Bagian Adbang	0,00	78.306.530,00	78.306.530,00
Sekretariat DPRD	0,00	22.689.927,35	22.689.927,35
BKD	0,00	301.332.445,90	301.332.445,90
BPKAD	0,00	78.381.605,63	78.381.605,63
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Inspektorat	0,00	71.551.013,10	71.551.013,10
BAPPEDA	0,00	45,04	45,04
Kec Kartoharjo	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Kec Manguharjo	0,00	18.027.008,80	18.027.008,80
Kec Taman	0,00	36.096.936,00	36.096.936,00
Bakesbangpol	0,00	164.675.901,60	164.675.901,60
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	5,36	5,36
	0,00	7.886.948.484,28	7.886.948.484,28

7.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Gedung dan Bangunan	809.892.237.901,85	779.408.086.756,33

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian mutasi gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.3.a
Perincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Gedung dan Bangunan				
Dinas Pendidikan	226.760.284.200,61	23.255.987.832,21	4.336.928.720,00	245.679.343.312,82
Dinas Kesehatan&KB	37.634.642.166,63	1.328.613.900,00	1.078.953.000,00	37.884.303.066,63
RSUD	43.899.494.555,75	870.722.960,00	99.119.460,00	44.671.098.055,75
Dinas PU&TR	98.763.175.296,00	3.324.938.260,00	44.140.754.023,32	57.947.359.532,68
DinasPerkim	35.816.093.644,06	5.806.175.567,64	4.304.060.433,94	37.318.208.777,76
DinasSatpol PP	3.840.695.200,00	186.791.000,00	0,00	4.027.486.200,00
BPBD	1.006.502.000,00	0,00	0,00	1.006.502.000,00
Dinas Sosial	2.556.017.000,00	0,00	0,00	2.556.017.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.446.144.982,00	0,00	0,00	2.446.144.982,00
DinasLingkungan Hidup	14.782.373.969,00	2.099.541.500,00	2.234.841.500,00	14.647.073.969,00
Dispendukcapil	7.620.558.000,00	0,00	0,00	7.620.558.000,00
Dinas Perhubungan	15.578.314.014,33	368.535.000,00	21.680.000,00	15.925.169.014,33
Dinas Infokom	4.807.268.903,00	434.801.600,00	393.319.000,00	4.848.751.503,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	1.245.393.551,00	0,00	0,00	1.245.393.551,00
DinasBudparpora	1.896.257.000,00	43.789.022.000,00	0,00	45.685.279.000,00
DinasPerpustakaan	1.204.570.600,00	0,00	0,00	1.204.570.600,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	322.981.900,00	0,00	0,00	322.981.900,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	14.196.595.771,00	190.650.000,00	0,00	14.387.245.771,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	116.600.000,00	0,00	0,00	116.600.000,00
Bagian Adbang	254.790.000,00	0,00	0,00	254.790.000,00
Sekretariat DPRD	48.860.855.835,00	95.985.000,00	0,00	48.956.840.835,00
BKD	2.770.549.529,00	41.032.000,00	41.032.000,00	2.770.549.529,00
BPKAD	17.387.807.170,00	912.416.000,00	96.187.000,00	18.204.036.170,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	1.279.607.000,00	0,00	0,00	1.279.607.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	27.868.104.103,00	2.305.521.825,00	127.523.600,00	30.046.102.328,00
Kec Manguharjo	20.651.145.898,00	1.102.337.752,71	0,00	21.753.483.650,71
Kec Taman	18.846.724.191,00	1.245.477.685,22	0,00	20.092.201.876,22
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	17.559.591.880,95	0,00	0,00	17.559.591.880,95
Dinas Perdagangan	109.434.948.396,00	2.459.743.750,00	2.459.743.750,00	109.434.948.396,00
	779.408.086.756,33	89.818.293.632,78	59.334.142.487,26	809.892.237.901,85
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(161.308.130.178,00)
		Gedung dan Bangunan Neto		648.584.107.723,85

Mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Realisasi belanja modal gedung dan bangunan APBD tahun anggaran 2020
- Koreksi gedung dan bangunan seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting
- Perolehan non APBD seperti perolehan gedung dan bangunan karena hibah, mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Perincian mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.3.b
Penjelasan Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Realisasi belanja modal APBD	Koreksi gedung dan bangunan	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan 2019
Gedung dan bangunan	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	23.255.987.832,21	0,00	0,00	23.255.987.832,21
Dinas Kesehatan&KB	249.660.900,00	1.078.953.000,00	0,00	1.328.613.900,00
RSUD	353.395.960,00	0,00	517.327.000,00	870.722.960,00
Dinas PU&TR	2.826.637.260,00	498.301.000,00	0,00	3.324.938.260,00
DinasPerkim	4.582.059.347,64	1.224.116.220,00	0,00	5.806.175.567,64
DinasSatpol PP	186.791.000,00	0,00	0,00	186.791.000,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	187.947.000,00	1.911.594.500,00	0,00	2.099.541.500,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perhubungan	253.530.000,00	115.005.000,00	0,00	368.535.000,00
Dinas Infokom	0,00	434.801.600,00	0,00	434.801.600,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	43.789.022.000,00	43.789.022.000,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	190.650.000,00	0,00	0,00	190.650.000,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	95.985.000,00	95.985.000,00
BKD	0,00	41.032.000,00	0,00	41.032.000,00
BPKAD	0,00	316.287.000,00	596.129.000,00	912.416.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	1.998.621.825,00	306.900.000,00	0,00	2.305.521.825,00
Kec Manguharjo	545.665.000,00	556.672.752,71	0,00	1.102.337.752,71
Kec Taman	695.515.477,72	549.962.207,50	0,00	1.245.477.685,22
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	2.459.743.750,00	0,00	2.459.743.750,00
	35.326.461.602,57	9.493.369.030,21	44.998.463.000,00	89.818.293.632,78

Mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari realisasi belanja modal APBD sebesar Rp35.326.461.602,57.

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi peralatan dan mesin Rp9.493.369.030,21 yaitu sebesar Rp1.111.516.473,00 berupa reklas antar aset tetap dan sebesar Rp8.381.852.557,21 berupa koreksi aset gedung dan bangunan karena reklas dari barang dan jasa sebesar Rp1.279.696.087,21 dan koreksi aset atribusi ke aset induknya sebesar Rp7.102.156.470,00.

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari perolehan non APBD sebesar Rp44.998.463.000,00 yaitu Rp44.781.151.000,00 berupa mutasi antar OPD dan sebesar Rp217.312.000,00 berupa hibah. Hibah pada RSUD berasal dari anggaran BTT.

Mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Reklas realisasi belanja modal gedung dan bangunan APBD tahun anggaran 2020 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan dibawah Rp500.000.
- Reklas aset tetap rusak berat atas gedung dan bangunan ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi gedung dan bangunan seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Perincian mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.3.c
Penjelasan Mutasi Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Reklas belanja modal APBD	Reklas aset tetap rusak berat	Koreksi gedung dan bangunan	Saldo mutasi pengurangan 2020
Gedung dan bangunan	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	4.336.928.720,00	4.336.928.720,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	1.078.953.000,00	1.078.953.000,00
RSUD	0,00	0,00	99.119.460,00	99.119.460,00
Dinas PU&TR	1.611.263,32	0,00	44.139.142.760,00	44.140.754.023,32
DinasPerkim	0,00	0,00	4.304.060.433,94	4.304.060.433,94
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	0,00	2.234.841.500,00	2.234.841.500,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	21.680.000,00	21.680.000,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	393.319.000,00	393.319.000,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	41.032.000,00	41.032.000,00
BPKAD	0,00	0,00	96.187.000,00	96.187.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	127.523.600,00	127.523.600,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	2.459.743.750,00	2.459.743.750,00
	1.611.263,32	0,00	59.332.531.223,94	59.334.142.487,26

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp1.611.263,32.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berupa koreksi sebesar Rp59.332.531.223,94 berupa mutasi antar OPD sebesar Rp44.781.151.000,00, reklas antar aset tetap Rp 4.768.653.395,16, penghapusan sebesar Rp1.456.605.000,00 dan koreksi sebesar Rp8.326.121.828,78 karena koreksi aset atribusi ke aset induknya.

Perincian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.3.d
Perincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	51.094.953.243,00	5.141.025.666,00	860.203.347,00	55.375.775.562,00
Dinas Kesehatan&KB	7.793.563.996,00	891.500.111,00	179.162.740,00	8.505.901.367,00
RSUD	6.701.802.955,00	995.193.829,00	3,00	7.696.996.781,00
Dinas PU&TR	18.415.082.176,00	1.100.053.228,00	8.494.128.081,00	11.021.007.323,00
DinasPerkim	3.094.849.039,00	749.525.137,00	118.975.266,00	3.725.398.910,00
DinasSatpol PP	448.898.240,00	83.709.033,00	0,00	532.607.273,00
BPBD	259.367.335,00	25.994.790,00	1,00	285.362.124,00
Dinas Sosial	647.216.835,00	53.132.534,00	0,00	700.349.369,00
Dinas Tenaga Kerja	640.733.756,00	48.500.570,00	1,00	689.234.325,00
DinasLingkungan Hidup	4.022.848.697,00	684.293.978,00	267.559.710,00	4.439.582.965,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Dispendukcapil	741.531.036,00	152.400.338,00	1,00	893.931.373,00
Dinas Perhubungan	3.828.857.584,00	613.170.710,00	0,00	4.442.028.294,00
Dinas Infokom	677.836.580,00	98.863.325,00	46.410.685,00	730.289.220,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	297.570.358,00	35.003.454,00	0,00	332.573.812,00
DinasBudparpora	469.180.781,00	9.385.102.893,00	1,00	9.854.283.673,00
DinasPerpustakaan	152.403.976,00	24.411.366,00	0,00	176.815.342,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	58.916.818,00	6.459.638,00	0,00	65.376.456,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	6.893.972.125,00	336.348.527,00	0,00	7.230.320.652,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	13.992.000,00	2.332.000,00	0,00	16.324.000,00
Bagian Adbang	35.670.600,00	5.095.800,00	0,00	40.766.400,00
Sekretariat DPRD	2.805.543.209,00	1.043.937.992,00	0,00	3.849.481.201,00
BKD	989.755.393,00	77.613.128,00	5.744.480,00	1.061.624.041,00
BPKAD	3.539.104.061,00	545.054.928,00	15.389.920,00	4.068.769.069,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	330.188.420,00	25.592.140,00	0,00	355.780.560,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	3.919.529.561,00	633.667.578,00	17.019.000,00	4.536.178.139,00
Kec Manguharjo	3.529.731.113,00	443.044.521,00	7,00	3.972.775.627,00
Kec Taman	4.106.982.114,00	405.780.090,00	12,00	4.512.762.192,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	2.433.504.980,00	348.518.941,00	0,00	2.782.023.921,00
Dinas Perdagangan	16.895.009.964,00	2.761.866.983,00	243.066.740,00	19.413.810.207,00
	144.838.596.945,00	26.717.193.228,00	10.247.659.995,00	161.308.130.178,00

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap gedung dan bangunan
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD

Tabel 7.1.3.3.e
Penjelasan Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Beban tahun berjalan	Koreksi akumulasi gedung dan bangunan	Saldo mutasi tambah penambahan 2020
	1	2	3
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Dinas Pendidikan	5.141.025.666,00	0,00	5.141.025.666,00
Dinas Kesehatan&KB	699.956.324,00	191.543.787,00	891.500.111,00
RSUD	887.188.429,00	108.005.400,00	995.193.829,00
Dinas PU&TR	1.100.053.226,00	2,00	1.100.053.228,00
DinasPerkim	749.525.137,00	0,00	749.525.137,00
DinasSatpol PP	83.709.032,00	1,00	83.709.033,00
BPBD	25.994.790,00	0,00	25.994.790,00
Dinas Sosial	53.132.534,00	0,00	53.132.534,00
Dinas Tenaga Kerja	48.500.570,00	0,00	48.500.570,00
DinasLingkungan Hidup	369.042.144,00	315.251.834,00	684.293.978,00
Dispendukcapil	152.400.338,00	0,00	152.400.338,00
Dinas Perhubungan	613.170.554,00	156,00	613.170.710,00
Dinas Infokom	98.863.325,00	0,00	98.863.325,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	35.003.454,00	0,00	35.003.454,00
DinasBudparpora	890.974.812,00	8.494.128.081,00	9.385.102.893,00
DinasPerpustakaan	24.411.365,00	1,00	24.411.366,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	6.459.638,00	0,00	6.459.638,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	336.348.526,00	1,00	336.348.527,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00
Bagian Adbang	5.095.800,00	0,00	5.095.800,00
Sekretariat DPRD	1.007.943.618,00	35.994.374,00	1.043.937.992,00
BKD	60.717.598,00	16.895.530,00	77.613.128,00
BPKAD	373.820.341,00	171.234.587,00	545.054.928,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	25.592.140,00	0,00	25.592.140,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	617.266.053,00	16.401.525,00	633.667.578,00
Kec Manguharjo	443.044.521,00	0,00	443.044.521,00
Kec Taman	405.780.090,00	0,00	405.780.090,00

Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	348.518.938,00	3,00	348.518.941,00
Dinas Perdagangan	2.225.070.236,00	536.796.747,00	2.761.866.983,00
	16.830.941.199,00	9.886.252.029,00	26.717.193.228,00

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap gedung dan bangunan
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD

Tabel 7.1.3.3.f
Penjelasan Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Beban tahun berjalan	Koreksi akumulasi gedung dan bangunan	Saldo mutasi tambah penambahan 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1	2	3
Dinas Pendidikan	0,00	860.203.347,00	860.203.347,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	179.162.740,00	179.162.740,00
RSUD	0,00	3,00	3,00
Dinas PU&TR	0,00	8.494.128.081,00	8.494.128.081,00
DinasPerkim	0,00	118.975.266,00	118.975.266,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	1,00	1,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	1,00	1,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	267.559.710,00	267.559.710,00
Dispendukcapil	0,00	1,00	1,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	46.410.685,00	46.410.685,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	1,00	1,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00

Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	5.744.480,00	5.744.480,00
BPKAD	0,00	15.389.920,00	15.389.920,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	17.019.000,00	17.019.000,00
Kec Manguharjo	0,00	7,00	7,00
Kec Taman	0,00	12,00	12,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	243.066.740,00	243.066.740,00
	0,00	10.247.659.995,00	10.247.659.995,00

7.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.212.978.744.299,82	1.134.991.899.147,73

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.4.a
Perincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Jalan, irigasi dan jaringan				
Dinas Pendidikan	1.293.195.107,00	10.736.000,00	0,00	1.303.931.107,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	5.448.073.750,00	0,00	0,00	5.448.073.750,00
Dinas PU&TR	1.015.533.054.647,86	79.173.468.520,00	3.550.622.800,00	1.091.155.900.367,86
DinasPerkim	75.354.651.734,02	2.300.928.385,16	46.779.057,07	77.608.801.062,11
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

DinasLingkungan Hidup	3.794.960.661,85	67.884.000,00	131.282.032,00	3.731.562.629,85
Dispendukcapil	10.472.000,00	0,00	0,00	10.472.000,00
Dinas Perhubungan	2.488.850.500,00	0,00	0,00	2.488.850.500,00
Dinas Infokom	1.707.990.000,00	0,00	0,00	1.707.990.000,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	28.410.000,00	0,00	0,00	28.410.000,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	6.565.600,00	0,00	0,00	6.565.600,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	5.097.360,00	124.472.936,00	0,00	129.570.296,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	1.951.062.074,00	0,00	0,00	1.951.062.074,00
Kec Manguharjo	147.216.530,00	6.500.000,00	0,00	153.716.530,00
Kec Taman	315.046.221,00	66.659.800,00	66.659.800,00	315.046.221,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	26.133.547.762,00	31.539.200,00	0,00	26.165.086.962,00
Dinas Perdagangan	725.205.200,00	0,00	0,00	725.205.200,00
	1.134.991.899.147,73	81.782.188.841,16	3.795.343.689,07	1.212.978.744.299,82
			Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	(592.225.027.097,00)
			Jalan, irigasi dan jaringan Neto	620.753.717.202,82

Mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan APBD tahun anggaran 2020
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting
- Perolehan non APBD seperti perolehan jalan, irigasi dan jaringan karena mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Perincian mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.4.b
Penjelasan Mutasi Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Realisasi belanja modal APBD	Koreksi jalan, irigasi dan jaringan	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan 2020
Jalan, irigasi dan jaringan	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	10.736.000,00	0,00	0,00	10.736.000,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	79.173.468.520,00	0,00	0,00	79.173.468.520,00
DinasPerkim	1.546.529.319,00	686.001.034,16	68.398.032,00	2.300.928.385,16
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	5.000.000,00	62.884.000,00	0,00	67.884.000,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	124.472.936,00	124.472.936,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Kec Taman	66.659.800,00	0,00	0,00	66.659.800,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	31.539.200,00	0,00	0,00	31.539.200,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.833.932.839,00	755.385.034,16	192.870.968,00	81.782.188.841,16

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari realisasi belanja modal APBD sebesar Rp80.833.932.839,00

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari koreksi aset tetap sebesar Rp755.385.034,16 berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp460.617.034,16 dan koreksi aset tetap atas temuan BPK atribusi ke aset induknya sebesar Rp294.768.000,00.

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari perolehan non APBD sebesar Rp192.870.968,00 berupa mutasi antar OPD sebesar Rp68.398.032,00 dan hibah sebesar Rp124.472.936,00. Hibah pada BPKAD berasal dari Djarum Group sebagai bentuk kompensasi berupa jembatan penyeberangan orang.

Mutasi pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Reklas realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan APBD tahun anggaran 2020 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dibawah Rp500.000.
- Reklas aset tetap rusak berat atas jalan, irigasi dan jaringan ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Perincian mutasi pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.4.c
Penjelasan Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Reklas belanja modal APBD	Reklas aset tetap rusak berat	Koreksi jalan, irigasi dan jaringan	Saldo mutasi pengurangan 2020
Jalan, irigasi dan jaringan	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	0,00	2.699.142.000,00	851.480.800,00	3.550.622.800,00
DinasPerkim	17.413.057,07	0,00	29.366.000,00	46.779.057,07
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	0,00	131.282.032,00	131.282.032,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	66.659.800,00	66.659.800,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.413.057,07	2.699.142.000,00	1.078.788.632,00	3.795.343.689,07

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp17.413.057,07.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas ke aset lain-lain karena rusak berat sebesar Rp2.699.142.000,00.

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.078.788.632,00 berupa koreksi dikarenakan mutasi antar aset tetap sebesar Rp68.398.032,00, reklas antar aset tetap sebesar Rp947.506.600,00 dan koreksi sebesar Rp62.884.000,00 berupa atribusi aset ke induknya.

Perincian akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.4.d
Perincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	273.426.508,00	47.733.417,00	73,00	321.159.852,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	1.066.320.184,00	238.095.704,00	1,00	1.304.415.887,00
Dinas PU&TR	509.076.350.735,00	45.178.645.384,00	8.240.731.733,00	546.014.264.386,00
DinasPerkim	27.911.833.217,00	4.064.086.451,00	0,00	31.975.919.668,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	16.975.002,00	2.425.002,00	3,00	19.400.001,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	1.746.010.504,00	137.029.248,00	30.577.756,00	1.852.461.996,00
Dispendukcapil	837.760,00	209.440,00	0,00	1.047.200,00
Dinas Perhubungan	857.346.099,00	117.781.287,00	3,00	975.127.383,00
Dinas Infokom	1.234.444.499,00	69.299.514,00	1,00	1.303.744.012,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	15.625.500,00	1.420.500,00	0,00	17.046.000,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	2.779.220,00	328.280,00	0,00	3.107.500,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	1.019.473,00	42.422.746,00	1,00	43.442.218,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Kec Kartoharjo	215.049.658,00	67.288.349,00	0,00	282.338.007,00
Kec Manguharjo	21.813.355,00	3.498.490,00	0,00	25.311.845,00
Kec Taman	53.466.537,00	7.619.647,00	0,00	61.086.184,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	5.843.998.646,00	1.998.155.604,00	0,00	7.842.154.250,00
Dinas Perdagangan	160.452.764,00	22.547.944,00	0,00	183.000.708,00
	548.497.749.661,00	51.998.587.007,00	8.271.309.571,00	592.225.027.097,00

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD

Tabel 7.1.3.4.e

Penjelasan Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Beban tahun berjalan	Koreksi akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo mutasi tambah penambahan 2020
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	2	3
Dinas Pendidikan	47.733.417,00	0,00	47.733.417,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00
RSUD	238.095.704,00	0,00	238.095.704,00
Dinas PU&TR	43.815.015.111,00	1.363.630.273,00	45.178.645.384,00
DinasPerkim	4.038.912.696,00	25.173.755,00	4.064.086.451,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00
BPBD	2.425.002,00	0,00	2.425.002,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	137.029.248,00	0,00	137.029.248,00
Dispendukcapil	209.440,00	0,00	209.440,00
Dinas Perhubungan	117.781.287,00	0,00	117.781.287,00
Dinas Infokom	69.299.514,00	0,00	69.299.514,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	1.420.500,00	0,00	1.420.500,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	328.280,00	0,00	328.280,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00

Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00
BPKAD	2.591.406,00	39.831.340,00	42.422.746,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	67.288.340,00	9,00	67.288.349,00
Kec Manguharjo	3.498.486,00	4,00	3.498.490,00
Kec Taman	7.619.644,00	3,00	7.619.647,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	1.998.155.598,00	6,00	1.998.155.604,00
Dinas Perdagangan	22.547.944,00	0,00	22.547.944,00
	50.569.951.617,00	1.428.635.390,00	51.998.587.007,00

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD

Tabel 7.1.3.4.f

Penjelasan Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Beban tahun berjalan	Koreksi akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo mutasi tambah penambahan 2020
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	2	3
Dinas Pendidikan	0,00	73,00	73,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	1,00	1,00
Dinas PU&TR	0,00	8.240.731.733,00	8.240.731.733,00
DinasPerkim	0,00	0,00	0,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	3,00	3,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	30.577.756,00	30.577.756,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	3,00	3,00
Dinas Infokom	0,00	1,00	1,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	1,00	1,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.271.309.571,00	8.271.309.571,00

7.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Tetap Lainnya	6.141.437.160,19	5.915.704.660,19

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan dengan pertimbangan aplikasi SIMDA BMD tidak dapat menghitung sehingga tingkat kesalahan menjadi tinggi apabila dilakukan penyusutan

secara manual. Atas hal tersebut aset tetap lainnya menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan penyusutan.

Perincian mutasi aset tetap lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.5.a
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Aset Tetap Lainnya				
Dinas Pendidikan	4.540.675.311,00	1.550.096.395,00	1.457.946.895,00	4.632.824.811,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerkim	1.177.725.667,01	133.583.000,00	0,00	1.311.308.667,01
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcakil	1.660.943,40	0,00	0,00	1.660.943,40
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	143.130.793,92	0,00	0,00	143.130.793,92
DinasPerpustakaan	10.871.944,86	0,00	0,00	10.871.944,86
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
BKD	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Kec Kartoharjo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.915.704.660,19	1.683.679.395,00	1.457.946.895,00	6.141.437.160,19
		Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya		0,00
		Aset Tetap Lainnya Neto		6.141.437.160,19

Mutasi penambahan aset tetap aset tetap lainnya selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Realisasi belanja modal aset tetap lainnya APBD tahun anggaran 2020
- Koreksi aset tetap lainnya seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting, perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap lainnya yang tidak disusutkan terhitung mulai tahun 2020.
- Perolehan non APBD seperti perolehan aset tetap lainnya karena mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Perincian mutasi penambahan aset tetap lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.5.b
Penjelasan Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Realisasi belanja modal APBD	Koreksi aset tetap lainnya	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan 2019
	1	2	3	4
Aset tetap lainnya				
Dinas Pendidikan	1.521.068.895,00	29.027.500,00	0,00	1.550.096.395,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerkim	0,00	133.583.000,00	0,00	133.583.000,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.521.068.895,00	162.610.500,00	0,00	1.683.679.395,00

Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari realisasi belanja modal APBD sebesar Rp1.521.068.895,00, berupa dana APBD sebesar Rp56.372.000,00 dan dana BOS sebesar Rp 1.464.696.895,00.

Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari koreksi sebesar Rp162.610.500,00 berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp29.027.500,00 dan koreksi reklas tahun lalu atas temuan BPK sebesar Rp133.583.000,00.

Mutasi pengurangan aset tetap aset tetap lainnya selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Reklas realisasi belanja modal aset tetap lainnya APBD tahun anggaran 2020 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap aset tetap lainnya dibawah Rp500.000.
- Reklas aset tetap rusak berat atas aset tetap lainnya ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi aset tetap lainnya seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Perincian mutasi pengurangan aset tetap lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.5.c
Penjelasan Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Pengurangan selama 2020	Reklas belanja modal APBD	Reklas aset tetap rusak berat	Koreksi aset tetap lainnya	Saldo mutasi pengurangan 2020
Aset tetap lainnya	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	1.457.946.895,00	0,00	0,00	1.457.946.895,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerkim	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.457.946.895,00	0,00	0,00	1.457.946.895,00

Pengurangan aset tetap lainnya berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.457.946.895,00.

7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.607.044.242,00	6.106.393.730,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.6.a
Perincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Dinas Pendidikan	468.000.000,00	2.385.548.720,00	0,00	2.853.548.720,00
Dinas Kesehatan&KB	462.825.000,00	0,00	0,00	462.825.000,00
RSUD	152.334.450,00	99.119.460,00	0,00	251.453.910,00
Dinas PU&TR	2.104.186.550,00	504.013.560,00	0,00	2.608.200.110,00
DinasPerkim	1.137.224.902,00	29.366.000,00	404.955.000,00	761.635.902,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	47.500.000,00	23.232.000,00	0,00	70.732.000,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	21.680.000,00	0,00	21.680.000,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	38.520.000,00	0,00	0,00	38.520.000,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Kec Kartoharjo	67.200.000,00	32.973.600,00	0,00	100.173.600,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian & KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	88.275.000,00	0,00	0,00	88.275.000,00
	4.916.065.902,00	3.095.933.340,00	404.955.000,00	7.607.044.242,00
		Akumulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan		(0,00)
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Neto		7.607.044.242,00

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp3.095.933.340,00 berasal dari reklas antar aset tetap dari KIB B dan KIB C.

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan berupa koreksi sebesar Rp404.955.000,00 karena koreksi aset atribusi ke aset induknya.

Berdasarkan perincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan tersebut diatas, mutasi tambah pada beberapa OPD dapat disebabkan adanya sejumlah kegiatan perencanaan, atau DED, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum selesai dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 yang diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.853.548.720,00,00 berupa Kegiatan Perencanaan gedung dan bangunan, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.b
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada
Dinas Pendidikan

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Perencanaan Gedung SDN 01 Rejomulyo	2019	44.000.000,00
2	Perencanaan Gedung SDN 01 Winongo	2019	83.500.000,00
3	Perencanaan Gedung SDN 02 Tawangrejo	2019	83.500.000,00
4	Perencanaan Gedung SDN 03 Kanigoro	2019	54.500.000,00
5	Perencanaan Gedung SDN 04 Madiun Lor	2019	55.500.000,00
6	Perencanaan Gedung SDN 04 Nambangan Kidul	2019	83.500.000,00
7	Perencanaan Gedung SDN 05 Madiun Lor	2019	63.500.000,00
8	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Kuncen	2020	26.000.000,00
9	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 01 Mojorejo	2020	89.100.000,00
10	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Taman	2020	79.000.000,00
11	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 03 Kanigoro	2020	94.000.000,00
12	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Nambangan Kidul	2020	79.000.000,00
13	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 03 Josenan	2020	89.000.000,00
14	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Banjarejo	2020	97.400.000,00
15	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 03 Manisrejo	2020	94.000.000,00
16	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SMPN 9	2020	89.000.000,00
17	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Ngegong	2020	26.000.000,00
18	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SMPN 7	2020	94.000.000,00
19	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 01 Kanigoro	2020	89.000.000,00
20	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 03 Nambangan Kidul	2020	94.000.000,00
21	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 01 Tawangrejo	2020	79.200.000,00
22	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 03 Taman	2020	93.775.000,00
23	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SMPN 4	2020	97.200.000,00
24	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 04 Manisrejo	2020	93.665.000,00
25	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 01 Manguharjo	2020	88.800.000,00

26	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Kartoharjo	2020	93.900.000,00
27	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SMPN 13	2020	97.273.000,00
28	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 01 Manisrejo	2020	94.000.000,00
29	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Kanigoro	2020	79.000.000,00
30	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 03 Kartoharjo	2020	93.835.720,00
31	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Demangan	2020	94.000.000,00
32	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Sukosari	2020	50.000.000,00
33	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 01 Pandean	2020	79.000.000,00
34	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Pilangbango	2020	69.200.000,00
35	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Kanigoro	2020	79.200.000,00
36	Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Josenan	2020	64.000.000,00
			2.853.548.720,00

- Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp462.825.000,00 berupa DED pembangunan gedung kantor di Jalan Trunojoyo.
- Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp251.453.910,00 berupa Kegiatan Perencanaan, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.c
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada RSUD

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Laundry	2016	110.718.450,00
2	Perencanaan Teknis Pembangunan Sumber Air Bersih	2016	41.616.000,00
3	Perencanaan Rehab Gedung Haemodialisis, Ruang B3 dan Selasar RSUD	2020	54.748.320,00
4	Perencanaan Rehab Gedung Rawat Inap Paviliun dan Selasar Ruang Tunggu Rawat Jalan RSUD	2020	44.371.140,00
			251.453.910,00

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.608.200.100,00, berupa kegiatan DED Pembangunan Saluran, Jalan dan Jembatan, namun sampai dengan 31 Desember 2020 pembangunan belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggarannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.d
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	DED Jalan Basuki Rahmat	2014	49.550.000,00
2	DED Jalan dan Jembatan	2014	48.400.000,00
3	DED Jalan Pahlawan	2014	49.500.000,00
4	DED Jalan Letkol Suwarno	2014	49.000.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Kolam Renang In door dan Lapangan Volly	2016	395.229.650,00
6	DED Saluran Lingkungan Jalan Sugiyo Pranoto	2016	52.508.700,00
7	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Wisma Haji dan GOR	2018	38.720.000,00
8	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Stadion Wilis dan Kawasan Sekitarnya	2018	38.600.000,00
9	Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelita Tama	2018	39.600.000,00
10	Perencanaan Peningkatan Jalan Yos Sudarso	2018	39.600.000,00
11	Perencanaan Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jl. Slamet Riyadi	2018	39.600.000,00
12	Perencanaan Peningkatan Jalan Sedoro	2018	39.600.000,00
13	Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Bumi Mas I	2018	39.600.000,00
14	Perencanaan Pembangunan Pintu Air Pancasila	2019	79.138.400,00
15	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pintu Air Kasuari	2019	79.076.800,00
16	Perencanaan Normalisasi Saluran Jalan H. Moch Noer menuju Kali Catur	2019	79.015.200,00
17	Perencanaan Normalisasi Saluran Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Nitinegoro	2019	78.936.000,00
18	Perencanaan Normalisasi Saluran Kanigoro	2019	79.466.400,00
19	Perencanaan Normalisasi Saluran Sogaten	2019	79.464.000,00
20	Perencanaan Normalisasi Saluran Jalan Setia Budi	2019	79.195.200,00
21	Perencanaan Pembangunan Saluran Sumber Umis	2019	78.489.600,00
22	Perencanaan Normalisasi Saluran Terate Barat Hulu	2019	79.411.200,00
23	Perencanaan Normalisasi Saluran Manisrejo	2019	78.979.200,00

24	Perencanaan Normalisasi Saluran Jalan Janoko - Kali Terate	2019	79.483.200,00
25	Perencanaan Normalisasi Saluran Terate	2019	78.307.200,00
26	Pekerjaan Studi Debit Air Pada Daerah Tangkapan Sungai an. Dr. Techn. UMBORO LASMINTO, ST, M.Sc.	2019	47.135.000,00
27	Pekerjaan Studi Debit Air Pada Daerah Tangkapan Sungai an. Mohammad Bagus Ansori, ST, MT	2019	32.368.000,00
28	Studi Debit Air Pada Daerah Tangkapan Sungai an. Novi Andriany, ST, M.Sc	2019	28.345.000,00
29	Perencanaan Normalisasi Saluran Kalisono	2019	78.944.800,00
30	Studi Debit Air Pada Daerah Tangkapan Sungai an. Anak Agung Ngurah Satria Damar Negara, ST, MT	2019	32.368.000,00
31	Studi Debit Air Pada Daerah Tangkapan Sungai an. Siire Halimathussa'diah, ST	2019	16.555.000,00
32	Pengurukan Tanah untuk Persiapan IPLT	2020	244.085.000,00
33	Perencanaan Rehabilitasi Pasar Buah Sleko	2020	43.478.160,00
34	Perencanaan Pembangunan GOR Jl Ciliwung	2020	27.843.200,00
34	Perencanaan Pembangunan Pasar Bunga	2020	79.512.400,00
35	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ki Ageng Selo Gg. Makam	2020	46.760.000,00
36	Perencanaan Normalisasi Saluran Jalan Merak	2020	62.334.800,00
			2.608.200.110,00

5. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp761.635.902,00 berupa Kegiatan Perencanaan, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.e
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Perencanaan Pembuatan Gapura Pintu Masuk	2016	485.292.000,00
2	DED Perencanaan RTH Jl. Cokrobasonto Kuncen	2019	81.336.702,00
3	DED Perencanaan RTH Jl. Bumi Mulya	2019	82.625.100,00

4	DED Perencanaan RTH Jl. Utama Mulya	2019	83.016.100,00
5	Perencanaan Pemasangan Jaringan Meterisasi PJU	2020	29.366.000,00
			761.635.902,00

6. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp70.732.000,00 berupa Kegiatan Perencanaan, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.f
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Perluasan Lahan TPA Winongo	2018	47.500.000,00
2	Perencanaan Pembangunan TPST Rejomulyo	2020	23.232.000,00
			70.732.000,00

7. Dinas Perhubungan sebesar Rp21.680.000,00 berupa Kegiatan Perencanaan, namun karena sampai dengan 31 Desember 2020 belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.g
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Perencanaan Pembangunan Halte	2020	7.600.000,00
2	Perencanaan Penataan Kios dan Ruang Tunggu Sub Terminal Manisrejo	2020	14.080.000,00
			21.680.000,00

8. Sekretariat DPRD sebesar Rp38.520.000,00 berupa DED pembangunan rumah dinas wakil ketua DPRD.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp350.000.000,00 berupa Kajian atas rencana penataan atau pemanfaatan kawasan sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.h
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Kajian Rencana Penataan dan Pengembangan Alun alun dan Bundaran Taman Kota	2018	250.000.000,00
2	Hasil Kajian Rencana Pemanfaatan Aset Eks Taman Harapan yang berada di Jalan Puter	2018	100.000.000,00
			350.000.000,00

10. Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp100.173.600,00 berupa Kegiatan Perencanaan, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikategorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.1.3.6.i
Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 pada Kecamatan
Kartoharjo

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Saldo
1	2	3	4
1	Perencanaan Gedung Bangunan DED Kelurahan Kartoharjo	2018	67.200.000,00
2	Perencanaan Rehab Balai RW 05 Kelurahan Tawangrejo	2020	32.973.600,00
			100.173.600,00

11. Dinas Perdagangan sebesar Rp88.275.000,00 berupa Perencanaan Penggantian ACP Pasar Besar Madiun.

7.1.4. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Lainnya	169.947.717.217,41	161.602.457.593,47

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian asset lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.a
Perincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020

Aset Lainnya	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Tuntutan Ganti Rugi	121.444.462,00	155.654.318,43
2. Kemitraan dengan pihak ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
3. Aset tidak berwujud	20.175.489.247,00	17.170.592.747,00
4. Aset lain-lain	30.117.883.504,41	24.743.310.524,04
Jumlahbruto	169.947.717.217,41	161.602.457.593,47

7.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	121.444.462,00	155.654.318,43

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tuntutan ganti rugi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2016 kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar dari Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 7.1.4.1.a
Perincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Tuntutan Ganti Rugi				
Pihak ke III	155.654.318,43	0,00	34.209.856,43	121.444.462,00
	155.654.318,43	0,00	34.209.856,43	121.444.462,00

7.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00

Jumlah kemitraan dengan pihak ketiga milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang terdiri dari Bangun Guna Serah (BOT) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Perincian mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.2.a
Perincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
KemitraandenganPihakKetiga				
BangunGunaSerah (BOT)	31.979.755.000,00	0,00	0,00	31.979.755.000,00
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	119.532.900.004,00	0,00	0,00	119.532.900.004,00

7.1.4.2.1. Bangun Guna Serah (BOT)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Bangun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	31.979.755.000,00

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi bangun guna serah (BOT) pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.2.1.a
Perincian Mutasi Bangun Guna Serah (BOT) per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
	1	2	3	4
Bangun Guna Serah (BOT)				
Carrefour	8.500.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000.000,00
Taman Hiburan Rakyat /THR	10.406.250.000,00	0,00	0,00	10.406.250.000,00
Kawasan Suncity	13.073.505.000,00	0,00	0,00	13.073.505.000,00
	31.979.755.000,00	0,00	0,00	31.979.755.000,00

Perincian penggunaan bangun guna serah (BOT) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu
1	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (Carrefour)	15 tahun 10 bulan atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. S.Parman (eks terminal) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI <u>Nomor : 644.1/03/401.013/2008</u> Nomor : 001/III/KTP/2008.
2	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (THR)	15 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Slamet Riyad sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI <u>Nomor : 556/08/401.013/2008</u> Nomor : 001/XII/KTP/2008.
3	PT. INDRACO	30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah

(Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)	Kota Madiun di Jl.Pelita Tama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO Nomor : 415.4/14/401.011/2010 Nomor : 02/SPK-IND/X/2010
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1.4.2.2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kerja Sama Pemanfaatan(KSP)	87.553.145.004,00	87.553.145.004,00

Jumlah kerja sama pemanfaatan merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun atas tanah dan bangunan Plaza Lawu Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.2.2.a
Perincian Mutasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP) per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	1	2	3	4
Plaza Lawu Madiun	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00

Perincian Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. SRI TANAYA MEGATAMA (Kerjasama Pemanfaatan Plaza Lawu Madiun)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah dan bangunan beserta utilitas penunjang gedung Plaza Lawu Madiun milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pahlawan No.47 Madiun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. SRI TANAYA MEGATAMA Nomor : 030/4/401.202/2017 Nomor : 003/STM-LP/HO/XII/2017 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Madiun setiap tahun mendapatkan kontribusi sebesar Rp1.250.000.000,00 terhitung mulai tahun 2019 dan setiap 5 tahun sekali mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai kontribusi tetap, dan kontribusi profit sharing sebesar 7,5%. Selain ini, PT. SRI TANAYA MEGATAMA menginvestasikan dananya sebesar Rp31.121.145.004,00 untuk melakukan renovasi Plaza Lawu Madiun.

7.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Tidak Berwujud	20.175.489.247,00	17.170.592.747,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian mutasi aset tidak berwujud berupa software pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.3.a
Perincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Aset Tidak Berwujud				
Dinas Pendidikan	424.578.135,00	0,00	0,00	424.578.135,00
Dinas Kesehatan&KB	631.780.000,00	0,00	0,00	631.780.000,00
RSUD	718.311.000,00	0,00	0,00	718.311.000,00
Dinas PU&TR	2.331.668.810,00	1.472.025.040,00	0,00	3.803.693.850,00
DinasPerkim	701.894.000,00	147.132.000,00	0,00	849.026.000,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	34.840.000,00	0,00	0,00	34.840.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	165.925.000,00	152.360.500,00	0,00	318.285.500,00
DinasLingkungan Hidup	423.913.000,00	49.799.970,00	0,00	473.712.970,00
Dispendukcapi	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
Dinas Perhubungan	603.375.000,00	196.900.000,00	0,00	800.275.000,00
Dinas Infokom	2.615.995.042,00	197.197.000,00	0,00	2.813.192.042,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	751.998.300,00	0,00	0,00	751.998.300,00
DinasBudparpora	0,00	139.930.000,00	0,00	139.930.000,00
DinasPerpustakaan	274.205.635,00	252.976.990,00	0,00	527.182.625,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	286.823.500,00	0,00	0,00	286.823.500,00
Bagian Organisasi	97.665.000,00	0,00	0,00	97.665.000,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	107.350.000,00	0,00	0,00	107.350.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

BKD	197.650.000,00	0,00	0,00	197.650.000,00
BPKAD	1.103.410.425,00	0,00	0,00	1.103.410.425,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	194.451.000,00	0,00	0,00	194.451.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	5.133.623.100,00	396.575.000,00	0,00	5.530.198.100,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	59.975.000,00	0,00	0,00	59.975.000,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	254.160.800,00	0,00	0,00	254.160.800,00
	17.170.592.747,00	3.004.896.500,00	0,00	20.175.489.247,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2020		(16.924.096.077,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto 2020		3.251.393.170,00

Mutasi penambahan aset tidak berwujud selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Realisasi belanja modal aset lainnya APBD tahun anggaran 2020
- Koreksi aset tidak berwujud seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- Perolehan non APBD seperti perolehan aset tidak berwujud karena mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Perincian mutasi penambahan aset tidak berwujud pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.3.b
Penjelasan Mutasi Penamabahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Realisasi belanja modal APBD	Koreksi aset tidak berwujud	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan2020
Aset tidak berwujud	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	1.472.025.040,00	0,00	0,00	1.472.025.040,00
DinasPerkim	147.132.000,00	0,00	0,00	147.132.000,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	152.360.500,00	0,00	0,00	152.360.500,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

DinasLingkungan Hidup	49.799.970,00	0,00	0,00	49.799.970,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	196.900.000,00	0,00	196.900.000,00
Dinas Infokom	197.197.000,00	0,00	0,00	197.197.000,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	139.930.000,00	0,00	0,00	139.930.000,00
DinasPerpustakaan	252.976.990,00	0,00	0,00	252.976.990,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	396.575.000,00	0,00	0,00	396.575.000,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.807.996.500,00	196.900.000,00	0,00	3.004.896.500,00

Penambahan aset tidak berwujud yang berasal dari realisasi belanja modal APBD sebesar Rp2.807.996.500,00.

Penambahan aset tidak berwujud yang berasal dari koreksi sebesar Rp196.900.000,00 berupa reklas dari aset tetap peralatan dan mesin.

Mutasi pengurangan aset tidak berwujud selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Reklas realisasi belanja modal aset tidak berwujud APBD tahun anggaran 2020 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap aset tidak berwujud dibawah Rp500.000.

- Reklas aset tidak berwujud ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi aset tidak berwujud seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting dan penghapusan.

Selama tahun 2020 per 31 Desember 2020 tidak terdapat mutasi pengurangan aset tidak berwujud

7.1.4.4.Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Lain-Lain	32.817.025.504,41	24.743.310.524,04

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain, aset rusak berat belum dihapuskan milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain Per 31 Desember 2020.

Perincian mutasi aset lain-lain berupa aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.4.a
Perincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Aset Lain-lain				
Dinas Pendidikan	602.417.100,04	1.368.842.761,00	0,00	1.971.259.861,04
Dinas Kesehatan&KB	24.460.000,00	559.982.740,00	0,00	584.442.740,00
RSUD	781.745.600,00	365.512.881,00	0,00	1.147.258.481,00
Dinas PU&TR	21.261.481.314,00	3.790.287.480,00	0,00	25.051.768.794,00
DinasPerkim	46.000.000,00	995.500,00	0,00	46.995.500,00
DinasSatpol PP	175.465.200,00	0,00	0,00	175.465.200,00
BPBD	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Dinas Sosial	101.055.000,00	0,00	0,00	101.055.000,00
Dinas Tenaga Kerja	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
DinasLingkungan Hidup	472.250.000,00	14.600.000,00	0,00	486.850.000,00
Dispendukcapil	66.896.000,00	230.121.535,37	0,00	297.017.535,37
Dinas Perhubungan	3.500.000,00	755.630.042,00	0,00	759.130.042,00
Dinas Infokom	38.015.000,00	16.500.000,00	0,00	54.515.000,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	8.105.000,00	0,00	8.105.000,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	26.502.000,00	0,00	0,00	26.502.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Bagian Organisasi	0,00	98.181.060,00	0,00	98.181.060,00
Bagian Umum	15.480.000,00	0,00	0,00	15.480.000,00
Bagian Hukum	2.518.750,00	135.584.570,00	0,00	138.103.320,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	14.925.000,00	78.306.530,00	0,00	93.231.530,00
Sekretariat DPRD	595.767.435,00	0,00	0,00	595.767.435,00
BKD	15.878.000,00	280.332.445,00	0,00	296.210.445,00
BPKAD	0,00	78.381.600,00	0,00	78.381.600,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	257.173.500,00	8.000.000,00	0,00	265.173.500,00
Inspektorat	0,00	71.551.000,00	0,00	71.551.000,00
BAPPEDA	97.502.000,00	0,00	0,00	97.502.000,00
Kec Kartoharjo	13.170.000,00	0,00	0,00	13.170.000,00
Kec Manguharjo	60.371.000,00	12.027.000,00	0,00	72.398.000,00
Kec Taman	23.647.500,00	36.096.936,00	0,00	59.744.436,00
Bakesbangpol	7.396.000,00	164.675.900,00	0,00	172.071.900,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	34.974.125,00	0,00	0,00	34.974.125,00
	24.743.310.524,04	8.073.714.980,37	0,00	32.817.025.504,41
		Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain 2020		(19.617.359.219,44)
		Aset Tidak Berwujud Neto 2020		13.199.666.284,97

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang rusak berat sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan aset tetap karena akan diserahkan ke pihak lain.
- Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- Perolehan non APBD seperti perolehan yang berasal dari mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan karena rusak berat/tidak dimanfaatkan atau berlebih.

Perincian mutasi penambahan asset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.4.b
Penjelasan Mutasi Penambahan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020

Penambahan selama 2020	Reklas dari aset tetap	Koreksi aset tetap rusak berat	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan 2020
	1	2	3	4
Aset tidak berwujud				
Dinas Pendidikan	1.368.842.761,00	0,00	0,00	1.368.842.761,00
Dinas Kesehatan&KB	559.982.740,00	0,00	0,00	559.982.740,00
RSUD	365.512.881,00	0,00	0,00	365.512.881,00
Dinas PU&TR	3.790.287.480,00	0,00	0,00	3.790.287.480,00
DinasPerkim	995.500,00	0,00	0,00	995.500,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
Dispendukcapil	230.121.535,37	0,00	0,00	230.121.535,37
Dinas Perhubungan	755.630.042,00	0,00	0,00	755.630.042,00
Dinas Infokom	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	8.105.000,00	0,00	0,00	8.105.000,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	98.181.060,00	0,00	0,00	98.181.060,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	135.584.570,00	0,00	0,00	135.584.570,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	78.306.530,00	0,00	0,00	78.306.530,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	280.332.445,00	0,00	0,00	280.332.445,00
BPKAD	78.381.600,00	0,00	0,00	78.381.600,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Inspektorat	71.551.000,00	0,00	0,00	71.551.000,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	12.027.000,00	0,00	0,00	12.027.000,00
Kec Taman	36.096.936,00	0,00	0,00	36.096.936,00
Bakesbangpol	164.675.900,00	0,00	0,00	164.675.900,00
Dinas Pertanian&KP	0,00			0,00

Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.073.714.980,37	0,00	0,00	8.073.714.980,37

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2020 berasal dari reklas dari aset tetap KIB B karena aset rusak berat sebesar Rp5.374.572.980,37 dan reklas dari aset tetap KIB D karena aset akan diserahkan ke pihak lain pada DPU sebesar Rp2.699.142.000,00.

Mutasi pengurangan aset lain-lain selama tahun 2020 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Penghapusan aset rusak berat dan aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga.
- Koreksi aset tetap rusak berat ke aset tetap karena masih dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.

Selama tahun 2020 per 31 Desember 2020 tidak terdapat mutasi pengurangan aset lain-lain.

Aset lain-lain senilai Rp32.817.025.504,41 yang tersaji merupakan aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain. Penyajian atas aset lain-lain antara aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain tercatat dalam satu akun karena aplikasi SIMDA BMD belum bisa mengakomodir dan memisahkan kedua aset tersebut. Adapun perincian sebagaimana berikut :

- ✓ Aset tetap rusak berat senilai Rp8.858.042.190,41 berada di 51 OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- ✓ Aset yang akan diserahkan ke pihak lain senilai Rp23.958.983.314,00 berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan perincian sebagaimana berikut :

Tabel 7.1.4.4.c
Perincian Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum yang Akan Diserahkan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Peroleha	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2014	27.200	775.305.395,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Ahmad Yani	2014	12.800	584.120.074,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2014	37.440	1.222.407.801,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Basuki Rachmad	2014	17.700	620.375.256,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. S. Parman	2014	6.400	513.308.579,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Thamrin	2014	9.600	548.152.730,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Haryono	2014	12.400	763.325.250,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Panjaitan	2014	17.300	1.607.513.490,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2014	15.360	1.496.230.227,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Sukarno Hatta	2014	22.400	1.941.751.956,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Mayjend. Sungkono	2014	16.100	958.716.483,00	Kementerian PUPR

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Jalan Kabupaten Lokal	Hotmix	-	2014	3.744	59.904.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2016	-	8.056.148.500,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Khusus Lain-lain	-	pengaspalan halaman polresta madiun	2016	-	202.691.596,00	Polres Madiun Kota
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pengaspalan halaman kantor dan rumah dinas korem	2016	-	407.951.377,00	Kodim
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2020	-	205.316.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2020	-	207.024.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2020	-	207.300.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2020	-	882.298.600,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Penataan Trotoar Pintu Masuk Kota Madiun-Jiwan	2020	-	209.539.000,00	-
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan A.Yani	2020	-	202.654.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Depan INKA	2020	-	206.280.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Yos Sudarso	2020	-	204.879.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I - Jalan Basuki Rahmad (KARGO)	2020	-	1.258.101.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan S.Parman	2020	-	213.318.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jl. DI Panjaitan	2020	-	208.716.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Penataan Kawasan Road Race Bantaran Kali Madiun	2020	-	195.655.000,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
					23.958.983.314,00	

Terhadap aset yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR telah dilakukan koordinasi oleh DPU&TR Pemerintah Kota Madiun. Tahapan sebelum pelaksanaan fisik mulai dari ijin dan asistensi perencanaan telah dilakukan dengan Balai Besar Jalan Nasional Wilayah V dan telah mendapatkan persetujuan. Setelah fisik konstruksi selesai dikerjakan dan akan diserahkan, Pihak Kementerian PUPR direncanakan akan meninjau lapangan dan sampai saat ini proses tersebut belum dilaksanakan, sehingga sampai saat ini aset tersebut masih tersaji menjadi aset lain-lain.

7.2. UTANG

7.2.1. UTANG LANCAR

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Utang	12.481.370.812,44	16.882.059.880,05

Utang Pemerintah Kota Madiun adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian utang lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji dalam table dibawah ini.

Tabel 7.2.1
Perincian Utang Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

Utang Lancar	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	48.991.741,00
2. Pendapatan diterima dimuka	4.482.211.157,44	5.782.080.261,05
3. Utang belanja	7.999.159.655,00	11.050.987.878,00
4. Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
Total	12.481.370.812,44	16.882.059.880,05

7.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	48.991.741,00

Pada tahun 2020 tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK). Pada tahun 2019 PFK merupakan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan upahan di Dinas Pekerjaan Umum yang baru ditransfer ke rekening masing masing penerima honorarium tersebut di awal bulan Januari 2020.

7.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Pendapatan Diterima Dimuka	4.482.211.157,44	5.782.080.261,05

Pendapatan di terima di muka berasal dari pembayaran atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian mutasi pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.2.1.2
Perincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Pendapatan diterima dimuka	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	44.291.666,67	24.791.667,67	44.291.666,67	24.791.667,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.758.098,00	0,00	100.758.098,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, PP, PA / BPM & KB	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Trans	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Perekonomian & Kesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

BPKAD	2.718.835.061,00	1.588.259.047,00	2.718.835.061,00	1.588.259.047,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	517.025.985,75	574.932.310,00	517.025.985,75	574.932.310,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	1.098.474.016,67	1.084.830.575,00	1.098.474.016,67	1.084.830.575,00
Kecamatan Manguharjo	529.575.379,17	491.040.810,00	529.575.379,17	491.040.810,00
Kecamatan Taman	737.880.403,79	686.376.364,77	737.880.403,79	686.376.364,77
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan KB	12.622.150,00	17.716.883,00	12.622.150,00	17.716.883,00
Dinas Perdagangan	22.617.500,00	14.263.500,00	22.617.500,00	14.263.500,00
	5.782.080.261,05	4.482.211.157,44	5.782.080.261,05	4.482.211.157,44

7.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Utang Belanja	7.999.159.655,00	11.050.987.878,00

Utang belanja terdiri dari Utang belanja Pegawai dan utang belanja jasa listrik, telepon dan air bulan desember 2020 tetapi belum dibayarkan s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian Utang Belanja tersaji di tabel di bawah ini :

Tabel 7.2.1.3.a
Perincian Mutasi Utang Belanja
Per 31 Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
	1	2	3	4
Utang Belanja				
Dinas Pendidikan	445.802.451,00	1.132.330.336,00,	445.802.451,00	1.132.330.336,00,
Dinas Kesehatan dan KB	765.256.105,00	883.340.072,00	765.256.105,00	883.340.072,00
RSUD	6.113.974.124,00	648.568.560,00	6.113.974.124,00	648.568.560,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	173.825.314,00	189.118.700,00	173.825.314,00	189.118.700,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.957.463,00	137.859.284,00	114.957.463,00	137.859.284,00
Dinas Satpol PP	188.937.253,00	218.320.820,00	188.937.253,00	218.320.820,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	27.244.351,00	31.676.380,00	27.244.351,00	31.676.380,00
Dinas Sosial, PP, PA / BPM & KB	104.710.559,00	120.884.264,00	104.710.559,00	120.884.264,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Trans	81.671.820,00	89.019.436,00	81.671.820,00	89.019.436,00
Dinas Lingkungan Hidup	266.807.648,00	281.535.451,00	266.807.648,00	281.535.451,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.772.085,00	90.087.187,00	100.772.085,00	90.087.187,00
Dinas Perhubungan	177.038.447,00	211.759.333,00	177.038.447,00	211.759.333,00
Dinas Informasi dan Komunikasi	118.347.988,00	116.453.560,00	118.347.988,00	116.453.560,00
Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha	95.324.888,00	112.589.604,00	95.324.888,00	112.589.604,00
Dinas Budparpora	75.762.326,00	132.216.492,00	75.762.326,00	132.216.492,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	53.421.595,00	67.673.259,00	53.421.595,00	67.673.259,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pemerintahan	32.585.113,00	31.090.456,00	32.585.113,00	31.090.456,00
Bagian Organisasi	25.574.633,00	29.889.481,00	25.574.633,00	29.889.481,00
Bagian Umum	217.051.086,00	234.813.899,00	217.051.086,00	234.813.899,00
Bagian Hukum	87.203.489,00	31.420.051,00	87.203.489,00	31.420.051,00
Bagian Administrasi Perekonomian & Kesra	32.311.495,00	37.802.855,00	32.311.495,00	37.802.855,00
Bagian Administrasi Pembangunan	45.664.633,00	39.220.908,00	45.664.633,00	39.220.908,00
Sekretariat DPRD	80.274.197,00	100.638.743,00	80.274.197,00	100.638.743,00
Badan Kepegawaian Daerah	121.006.990,00	122.452.239,00	121.006.990,00	122.452.239,00
BPKAD OPD	31.676.550,00	1.168.909.033,00	31.676.550,00	1.168.909.033,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	110.210.641,00	101.082.525,00	110.210.641,00	101.082.525,00
Inspektorat	100.518.138,00	214.309.321,00	100.518.138,00	214.309.321,00
Bappeda	113.558.403,00	140.065.745,00	113.558.403,00	140.065.745,00
Kecamatan Kartoharjo	219.245.967,00	295.810.528,00	219.245.967,00	295.810.528,00
Kecamatan Manguharjo	313.418.533,00	288.673.359,00	313.418.533,00	288.673.359,00
Kecamatan Taman	241.601.788,00	302.874.154,00	241.601.788,00	301.347.154,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.482.500,00	89.463.327,00	65.482.500,00	89.463.327,00
Dinas Pertanian dan KB	122.315.140,00	122.395.860,00	122.315.140,00	122.395.860,00
Dinas Perdagangan	187.434.165,00	184.814.433,00	187.434.165,00	184.814.433,00
	11.050.987.878,00	7.999.159.655,00	11.050.987.878,00	7.999.159.655,00

Utang Belanja pegawai yang terdiri dari utang belanja pegawai tidak langsung berupa Tambahan Perbaikan Penghasilan ASN dan utang belanja pegawai langsung berupa Honorarium Non ASN bulan desember 2020 yang terbayarkan pada bulan Februari 2021 dengan rincian utang pegawai sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.3.c
Utang Belanja Pegawai TPP
Per Desember 2020

Perubahan di Tahun 2021	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	1	2	3	4
Utang Belanja				
Dinas Pendidikan	393.352.451,00	961.972.982,00	393.352.451,00	961.972.982,00
Dinas Kesehatan dan KB	695.590.342,00	780.140.072,00	695.590.342,00	780.140.072,00
RSUD	506.031.706,00	568.518.560,00	506.031.706,00	568.518.560,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	173.825.314,00	164.618.700,00	173.825.314,00	164.618.700,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.957.463,00	122.300.075,00	114.957.463,00	122.300.075,00
Dinas Satpol PP	103.437.253,00	128.320.820,00	103.437.253,00	128.320.820,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	27.244.351,00	31.676.380,00	27.244.351,00	31.676.380,00
Dinas Sosial, PP, PA / BPM & KB	91.122.500,00	107.752.522,00	91.122.500,00	107.752.522,00
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Trans	79.639.966,00	86.887.780,00	79.639.966,00	86.887.780,00
Dinas Lingkungan Hidup	241.707.648,00	257.085.451,00	241.707.648,00	257.085.451,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.037.187,00	88.037.187,00	88.037.187,00	88.037.187,00
Dinas Perhubungan	115.788.447,00	155.409.333,00	115.788.447,00	155.409.333,00
Dinas Informasi dan Komunikasi	103.245.673,00	103.525.738,00	103.245.673,00	103.525.738,00
Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha Mikro/KPPT	85.051.796,00	103.136.898,00	85.051.796,00	103.136.898,00
Dinas Budparpora	69.912.326,00	87.466.492,00	69.912.326,00	87.466.492,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	53.421.595,00	67.673.259,00	53.421.595,00	67.673.259,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pemerintahan	30.685.113,00	27.090.456,00	30.685.113,00	27.090.456,00
Bagian Organisasi	25.574.633,00	29.889.481,00	25.574.633,00	29.889.481,00
Bagian Umum	151.451.086,00	167.984.220,00	151.451.086,00	167.984.220,00
Bagian Hukum	85.303.489,00	29.520.051,00	85.303.489,00	29.520.051,00
Bagian Administrasi Perekonomian & Kesra	29.311.495,00	37.802.855,00	29.311.495,00	37.802.855,00
Bagian Administrasi Pembangunan	45.664.633,00	39.220.908,00	45.664.633,00	39.220.908,00
Sekretariat DPRD	72.474.197,00	65.427.946,00	72.474.197,00	65.427.946,00
Badan Kepegawaian Daerah	113.306.990,00	116.352.239,00	113.306.990,00	116.352.239,00
BPKAD OPD		116.368.833,00		116.368.833,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	31.676.550,00		31.676.550,00	
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	104.360.641,00	96.982.525,00	104.360.641,00	96.982.525,00
Inspektorat	98.568.138,00	140.282.286,00	98.568.138,00	140.282.286,00
Bappeda	111.658.403,00	128.656.845,00	111.658.403,00	128.656.845,00
Kecamatan Kartoharjo	219.245.967,00	285.670.525,00	219.245.967,00	285.670.525,00
Kecamatan Manguharjo	313.418.533,00	264.924.594,00	313.418.533,00	264.924.594,00
Kecamatan Taman	241.601.788,00	283.597.194,00	241.601.788,00	283.597.194,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.582.500,00	85.363.327,00	61.582.500,00	85.363.327,00
Dinas Pertanian dan KB	112.715.140,00	112.295.860,00	112.715.140,00	112.295.860,00
Dinas Perdagangan	185.484.165,00	182.714.433,00	185.484.165,00	182.714.433,00
TOTAL	4.976.449.479,00	6.024.666.827,00	4.976.449.479,00	6.024.666.827,00

Perincian utang belanja pegawai langsung berupa Honorarium Non ASN bulan Desember 2020, yang terbayarkan pada bulan Februari 2021 dengan rincian utang belanja pegawai langsung sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.3.e
Utang Belanja Honorer
Per Desember 2020

Perubahan di Tahun 2021	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja	1	2	3	4
Dinas Pendidikan	52.450.000,00	61.450.000,00	52.450.000,00	61.450.000,00
Dinas Kesehatan dan KB	35.100.000,00	49.200.000,00	35.100.000,00	49.200.000,00
RSUD	0,00	80.050.000,00	0,00	80.050.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
Dinas Satpol PP	85.500.000,00	90.000.000,00	85.500.000,00	90.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, PP, PA / BPM & KB	5.800.000,00	6.100.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Trans	1.900.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.100.000,00	24.450.000,00	25.100.000,00	24.450.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.900.000,00	2.050.000,00	3.900.000,00	2.050.000,00
Dinas Perhubungan	61.250.000,00	56.350.000,00	61.250.000,00	56.350.000,00
Dinas Informasi dan Komunikasi	7.650.000,00	8.050.000,00	7.650.000,00	8.050.000,00
Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha Mikro/KPPT	3.800.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
Dinas Budparpora	5.850.000,00	44.750.000,00	5.850.000,00	44.750.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Admistrasi Pemerintahan	1.900.000,00	4.000.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	65.600.000,00	64.900.000,00	65.600.000,00	64.900.000,00
Bagian Hukum	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Bagian Administrasi Perekonomian & Kesra	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	7.800.000,00	10.250.000,00	7.800.000,00	10.250.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.700.000,00	6.100.000,00	7.700.000,00	6.100.000,00
BPKAD OPD	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	5.850.000,00	4.100.000,00	5.850.000,00	4.100.000,00
Inspektorat	1.950.000,00	2.050.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
Bappeda	1.900.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Manguharjo	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
Kecamatan Taman	0,00	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.900.000,00	4.100.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00
Dinas Pertanian dan KB	9.600.000,00	10.100.000,00	9.600.000,00	10.100.000,00
Dinas Perdagangan	1.950.000,00	2.100.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00
TOTAL	401.350.000,00	599.300.000,00	401.350.000,00	599.300.000,00

Utang belanja jasa yang terdiri dari Beban Listrik, Air dan Telpon bulan Desember 2020, yang terbayarkan pada bulan Februari 2021 dan dengan rincian utang belanja jasa sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.3.g
Utang Jasa (Telepon, Jasa dan Listrik)
Per Desember 2020

Perubahan di tahun 2020	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja	1	2	3	4
Dinas Sosial	7.788.059,00	7.031.742,00	7.788.059,00	7.031.742,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	3.259.209,00	0,00	3.259.209,00
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Trans	131.854,00	131.656,00	131.854,00	131.656,00
Dinas Informasi dan Komunikasi	7.452.315,00	4.877.822,00	7.452.315,00	4.877.822,00
Dinas Pendidikan	0,00	108.907.354,00	0,00	108.907.354,00
Sekretariat DPRD	0,00	24.960.797,00	0,00	24.960.797,00
Dinas PM,PTSP,Koperasi,Usaha	6.473.092,00	5.452.706,00	6.473.092,00	5.452.706,00
Bagian Umum		1.929.679,00		1.929.679,00
BPKAD	0,00	1.050.490.200,00	0,00	1.050.490.200,00

Kec. Kartoharjo	0,00	10.140.003,00	0,00	10.140.003,00
Kec. Taman	0,00	3.499.960,00	0,00	3.499.960,00
Kec. Manguharjo	0,00	17.598.765,00	0,00	17.598.765,00
TOTAL	21.845.320,00	1.238.279.893,00	21.845.320,00	1.238.279.893,00

7.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang jangka pendek lainnya berasal dari utang Dinas Kesehatan untuk Pembayaran pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian utang jangka pendek lainnya tersaji di tabel di bawah ini :

7.2.2. UTANG JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Utang jangka panjang	0,00	0,00

Pemerintah Kota Madiun tidak mempunyai utang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

7.3. EKUITAS

7.3.1 Ekuitas

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Ekuitas	2.736.010.584.765,26	2.641.858.412.908,94

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo ekuitas akhir yang berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Operasi	959.839.585.901,90	982.980.049.979,73	(2,35%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban lain-lain terdiri dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi (asset extracom). Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 2,35%.

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2
Beban Operasi

Beban Operasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban pegawai	443.050.139.604,00	438.086.218.900,80	1,13%
2. Beban persediaan	113.021.837.094,96	104.375.640.244,77	8,28%
3. Beban jasa	187.334.265.599,56	193.457.703.824,34	(3,17%)
4. Beban pemeliharaan	26.036.900.470,06	26.029.525.183,00	0,03%
5. Beban perjalanan dinas	25.233.548.618,00	46.026.517.499,15	(45,18%)
6. Beban bunga	0,00	0,00	0,00%
7. Beban subsidi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban hibah	12.638.153.671,53	22.778.937.337,08	(44,52%)
9. Beban bantuan sosial	12.854.873.000,00	15.462.871.160,00	(16,86%)
10. Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%
11. Beban Transfer	0,00	651.920.000,00	(100%)
12. Beban Penyisihan Piutang	281.795.211,82	1.959.608.575,79	(85,62%)
13. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	306.945.341,48	0	100%
14. Beban Penyusutan	133.800.580.136,00	126.761.603.247,00	5,55%
15. Beban Amortisasi	3.164.151.141,00	2.540.028.976,00	24,57%

16. Beban Lain-Lain	2.116.396.013,49	4.834.882.109,36	(56,23%)
Jumlah	959.838.058.901,90	982.980.049.979,73	(2,35%)

8.2.1. Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai	443.050.139.604,00	438.086.218.900,80	1,13%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai belanja tidak langsung yang didanai dari APBD tahun anggaran 2020, beban pegawai belanja langsung yang didanai APBD tahun anggaran 2020 beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS, beban pegawai yang didanai dari blockgrant, beban pegawai yang didanai dari komite sekolah, beban pegawai yang didanai dari dana tugas pembantuan, beban pegawai yang didanai dari dekonsentrasi, beban pegawai lainnya. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar 1,13%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1
Beban Pegawai

Beban Pegawai	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Tdk Langsung	364.158.498.235,00	366.898.520.187,80	(0,75%)
2. Langsung	57.324.000.730,00	52.434.758.386,00	9,32%
3. BLUD	17.992.947.904,00	16.382.005.294,00	9,83%
4. BOS	2.265.383.250,00	2.370.935.033,00	(4,45%)
5. Utang APBD 2021	6.695.943.862,00	0,00	0,00
6. Utang BLUD 2021	0,00	0,00	0,00
7. Utang BOS 2021	0,00	0,00	0,00
8. Utang APBD 2020	0,00	(5.377.799.479,00)	0,00
9. Utang BLUD 2020	0,00	(0,00)	0,00
10. Utang BOS 2020	0,00	(0,00)	0,00
Jumlah	443.050.139.604	438.086.218.900,80	1,13%

8.2.1.1. Beban Pegawai Tidak Langsung

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai Tidak Langsung	365.222.242.180,00	366.898.520.187,80	1,51%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pegawai tidak langsung yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2020 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban pegawai tidak langsung mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah. Beban pegawai tidak langsung untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan beban pegawai tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 0,46%.

Perincian beban pegawai tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.2.1.1
Beban Pegawai Tidak Langsung

Beban Pegawai Tidak Langsung Per OPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dinas Pendidikan	167.497.070.819,00	181.070.555.474,00	(7,49%)
Dinas Kesehatan KB	27.705.284.985,00	26.763.555.824,00	3,52%
RSUD	11.443.538.625,00	11.753.653.224,00	(2,64%)
Dinas PU TR	5.991.592.573,00	6.738.433.029,00	(11,08%)
Dinas Perkim	4.204.253.564,00	3.965.858.348,00	6,01%
Kantor Satpol PP	4.621.830.720,00	3.895.585.174,00	18,64%
BPBD	1.081.166.738,00	933.845.595,00	15,78%
Dinas Sosial	3.271.718.503,00	3.376.421.031,00	(3,11%)
Dinas Tenaga Kerja	2.945.818.334,00	2.621.803.061,00	12,36%
Dinas LH	10.070.168.428,00	10.208.749.698,00	(1,36%)
Dispendukcapil	2.969.142.259,00	3.165.358.784,00	(6,20%)
Dinas Perhubungan	5,456,088,536.00	5.046.497.895,00	8,12%
Dinas Infokom	3,372,850,115.00	3.741.860.450,00	(9,86%)
Dinas PM, PTSP/KPPT	3,117,914,095.00	3.148.480.527,00	(0,97%)
Dinas Budparpora	2,687,675,847.00	2.506.356.354,00	7,23%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perpustakaan	2.571.591.277,00	2.085.543.155,00	23,31%
Walikota/Wakil	705,267,744,00	629.404.684,00	12,05%
DPRD	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	424,370,656,00	459.734.128,00	(7,69%)
Bagian Organisasi	460,536,674,00	389.622.026,00	18,20%
Bagian Umum	8,742,445,106,00	9.378.856.119,00	(6,79%)
Bagian Hukum	960,616,082,00	511.269.547,00	87,89%
Bagian Perekkesra	580,918,670,00	441.259.853,00	31,65%
Bagian Adbang	830,698,494,00	1.155.709.507,00	(28,12%)
Sekretariat DPRD	14,176,155,866,00	14.325.053.493,00	(1,04%)
BKD	3,741,515,316,00	3.888.226.910,00	(3,77%)
BPKAD	17,927,793,651,00	11.192.407.720,80,	60,19%
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
Bapenda	7,596,065,406,00	8.055.325.270,00	(5,70%)
Inspektorat	4,767,569,798,00	3.556.624.654,00	34,04%
BAPPEDA	4,542,435,538,00	3.848.278.865,00	18,03%
Kec Kartoharjo	8,775,879,594,00	7.567.555.890,00	15,97%
Kec Manguharjo	9,235,851,263,00	7.838.132.005,00	17,83%
Kec Taman	8,935,385,964,00	8.384.112.120,00	6,57%
Bakesbangpol	2,909,495,307,00	2.621.796.597,00	10,97%
Dinas Pertanian KP	3,777,034,843,00	3.878.803.283,00	(2,62%)
Dinas Perdagangan	7,124,500,790,00	7.753.789.893,00	(8,11%)
Total	365.222.242.180,00	366.898.520.187,80	1,51%

8.2.1.2. Beban Pegawai Langsung

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
	1	2	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai Langsung	57.569.566.270,00	52.434.758.386,00	9,79%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai langsung yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2020 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban pegawai langsung mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kewajiban pemerintah

Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai langsung terdiri dari beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur. Beban pegawai langsung untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar 9,76%.

Perincian beban pegawai langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.2
Beban Pegawai Langsung

Beban Pegawai Langsung Per OPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dinas Pendidikan	5,607,544,619.00	6.488.160.028,00	(13,57%)
Dinas Kesehatan KB	7,278,864,571.00	6.196.931.601,00	17,46%
RSUD	1,229,250,000.00	590.634.481,00	108%
Dinas PU TR	2,767,918,269.00	3.440.424.014,00	(19,54%)
Dinas Perkim	1,449,289,486.00	1.293.101.099,00	12,08%
Dinas Satpol PP	3,559,336,495.00	3.143.526.898,00	13,23%
BPBD	290,902,999.00	241.098.605,00	20,66%
Dinas Sosial	1,271,412,814.00	1.266.320.573,00	0,40%
Dinas Tenaga Kerja	861,547,189.00	820.070.911,00	5,06%
Dinas LH	2,803,558,943.00	2.449.028.909,00	14,48%
Dispendukcapil	836,796,034.00	882.326.008,00	(5,16%)
Dinas Perhubungan	2,771,443,921.00	2.533.095.569,00	9,40%
Dinas Infokom	1,208,178,836.00	1.166.156.565,00	3,60%
Dinas PM, PTSP/KPPT	991,326,686.00	991.048.498,00	0,03%
Dinas Budparpora	1,546,793,479.00	831.666.243,00	85,99%
Dinas Perpustakaan	746,373,725.00	504.900.273,00	47,82%
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	295,398,831.00	434.551.444,00	32,02%
Bagian Organisasi	324,503,660.00	270.332.461,00	20,04%
Bagian Umum	2,793,783,751.00	2.973.525.223,00	(6,04%)
Bagian Hukum	525,253,223.00	363.464.025,00	44,51%
Bagian Perekkesra	313,829,773.00	265.564.237,00	18,17%
Bagian Adbang	393,014,583.00	433.987.652,00	(9,44%)
Sekretariat DPRD	783,552,546.00	756.709.280,00	3,55%
BKD	1,368,761,880.00	1.235.547.233,00	10,78%
BPKAD	1,104,566,232.00	971.221.161,00	13,73%

BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00
Bapenda	143,805,000.00	160.020.000,00	(10,13%)
Inspektorat	1,772,348,394.00	1.320.536.361,00	34,21%
BAPPEDA	1,237,255,686.00	1.137.525.431,00	8,77%
Kec Kartoharjo	2,424,051,069.00	1.809.430.385,00	33,97%
Kec Manguharjo	2,504,247,065.00	1.737.043.953,00	44,17%
Kec Taman	2,577,486,696.00	2.317.924.699,00	11,19%
Bakesbangpol	746,172,309.00	607.630.014,00	22,80%
Dinas Pertanian KP	1,244,137,612.00	1.141.314.849,00	9,01%
Dinas Perdagangan	1,796,859,894.00	1.659.939.703,00	8,25%
Total	57.569.566.270,00	52.434.758.386,00	9,79%

8.2.1.3. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai BLUD	17.992.947.904,00	16.382.005.294,00	9,76%

Jumlah beban pegawai BLUD yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban pegawai blud mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BLUD terdiri dari beban pegawai BLUD Puskesmas dan beban pegawai blud RSUD. Beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar 9,76%. Perincian beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.3
Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Puskesmas Manguharjo	399,067,200.00	348.850.000,00	14,40%
2. Puskesmas Banjarejo	305,381,077.00	262.085.000,00	16,52%
3. Puskesmas Oro-oro Ombo	338,714,976.00	303.500.000,00	11,60%
4. Puskesmas Demangan	572,196,501.00	497.200.000,00	15,08%
5. Puskesmas Tawangrejo	351,120,500.00	339.700.000,00	3,36%

6. Puskesmas Patihan	156,713,108.00	171.450.000,00	(8,60%)
7. RSUD	15.869.754.542,00	14.459.220.294,00	9,76%
Total	17.992.947.904,00	16.382.005.294,00	9,83%

8.2.1.4. Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai BOS	2.265.383.250,00	2.370.935.033,00	(4,45%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS meliputi beban pegawai BOS SDN, beban pegawai BOS SMPN. Beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 4,45%

Perincian beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.4
Beban Pegawai BOS

Beban Pegawai BOS	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pegawai BOS SDN	1.433.030.000,00	1.412.308.133,00	1,47%
2. Pegawai BOS SMPN	832.353.250,00	958.626.900,00	(13,17%)
Total	2.265.383.250,00	2.370.935.033,00	(4,45%)

Beban Pegawai BOS sebesar Rp2.265.383.250,00 merupakan beban pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing masing rekening BOS sekolah negeri.

8.2.2. Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Persediaan	113.021.837.094,96	104.375.640.244,77	8,28%

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan konsumsi/pemakaian persediaan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD tahun anggaran 2020 hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2020. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga setiap belanja barang jasa berupa belanja persediaan di catat sebagai beban persediaan dan pada akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar 8,28%.

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.2
Beban Persediaan

Beban Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban persediaan sisa th lalu	14.745.334.586,00		100%
2. Beban persediaan apbd	69.845.172.198,29	49.847.440.281,26	35,08%
3. Beban pesediaan BLUD	40.192.291.475,00	47.527.171.385,00	(15,99%)
4. Beban persediaan BOS	5.496.420.090,12	7.001.028.578,51	(21,49%)
5. Sisa Persediaan 2020	0,00	(15.730.373.293,45)	0,00
6. Utang Belanja	0,00	(2.777.738.751,00)	0,00
7. Reklas Barang Jasa	1.250.730.790,00	0,00	0,00
Jumlah	113.021.837.094,96	104.375.640.244,77	8,28%

8.2.3. Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Jasa	187.334.265.599,56	193.457.703.824,34	(3,17%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa atas penggunaan jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2020, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama berjalan. Beban Jasa yang tersedia dipengaruhi oleh utang jasa tahun 2020 yang direalisasikan di tahun 2021 sebesar Rp. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 3,17%. Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.3
Beban Jasa

Beban Jasa	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban jasa APBD	148.704.991.091,12	153.740.148.734,75	(1,58%)
2. Beban jasa BLUD	35.885.018.962,00	37.834.275.909,15	(12,63%)
3. Beban jasa BOS	2.968.491.702,51	1.883.279.180,44	57,62%
4. Utang Jasa 2020	3.961.082.681,14	0,00	0,00
5. Utang Jasa 2019	0,00	(2.886.614.750,00)	0,00
6. Reklas Aset	0,00	(1.298.704.087,21)	0,00
Jumlah	187.334.265.599,56	193.457.703.824,34	(3,17%)

8.2.4. Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pemeliharaan	26.036.900.470,06	26.029.525.183,00	0,03%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban pemeliharaan mengakui beban yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2020, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 kenaikan sebesar 0,03%.

Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.4
Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban pemeliharaan APBD	18.234.570.714,15	20.582.959.078,54	(53,39%)
2. Beban pemeliharaan BLUD	3.238.516.556,00	3.174.415.132,00	(74,65%)
3. Beban pemeliharaan BOS	4.563.813.199,91	2.272.150.972,46	23,93%
Jumlah	26.036.900.470,06	26.029.525.183,00	0,03%

8.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Perjalanan Dinas	25.233.548.618,00	46.026.517.499,15	(45,18%)

Jumlah tersebut merupakan saldo beban perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban perjalanan dinas mengakui beban perjalanan dinas yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan dinas yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2019, dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2019. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 45,18%

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.5
Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban perjalanan dinas apbd	23.874.502.694,00	42.242.213.350,00	(67,48%)
2. Beban perjalanan dinas BLUD	423.685.229,00	2.227.335.660,00	(24,38%)
3. Beban perjalanan dinas BOS	935.360.695,00	1.556.968.489,15	(55,54%)
Jumlah	25.233.548.618,00	46.026.517.499,15	(45,18%)

8.2.6. Beban Bunga

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bunga yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tidak mempunyai beban bunga.

8.2.7. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban subsidi yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tidak mempunyai beban subsidi.

8.2.8. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Hibah	12.638.153.671,53	22.778.937.337,08	(44,52%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban hibah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban hibah mengakui beban hibah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah mengakui hibah berasal dari belanja tidak langsung BPKAD (SKPKD) APBD tahun anggaran 2020 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2020, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana bantuan keuangan parpol, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 44,52%.

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.8
Beban Hibah

Beban Hibah	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban hibah BPKAD (SKPKD)	11.938.091.671,53	15.422.819.810,08	(22,21%)
2. Beban hibah reklas dr belanja barang jasa apbd	0,00	7.354.117.527,00	(100%)
3. Beban bantuan keuangan Parpol	700.062.000	0,00	100%
Jumlah	12.638.153.671,53	22.778.937.337,08	(44,52%)

8.2.9. Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	15.462.871.160,00	(16,87%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban bantuan sosial mengakui beban bantuan keuangan yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan sosial mengakui bantuan sosial berasal dari belanja tidak langsung BPKAD (SKPKD) APBD tahun anggaran 2020 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2020, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2020. Beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 16,87%.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.9
Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban bansos BPKAD (SKPKD)	12.854.873.000,00	15.001.277.870,00	(14,31%)
2. Beban bansos reklas dr belanja barang jasa apbd	0,00	461.593.290,00	(100%)
Jumlah	12.854.873.000,00	15.462.871.160,00	(16,87%)

8.2.10. Beban Bantuan Keuangan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Bantuan Keuangan	0,0	0,00	100%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan keuangan yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban bantuan Keuangan mengakui beban bantuan keuangan yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan keuangan mengakui bantuan sosial berasal dari belanja tidak langsung BPKAD (SKPKD) APBD tahun anggaran 2020 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2020, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2020. Beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 tidak ada beban bantuan keuangan.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.10
Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban Bantuan Keuangan BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	0,00	0,00	0,00%

8.2.11. Beban Transfer

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Transfer	0,00	651.920.000,00	(100%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban transfer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban transfer mengakui beban bantuan keuangan Partai politik merupakan beban yang diterima pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan.. Beban Transfer untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 100%.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.11
Beban Transfer

Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban transfer	0,00	651.920.000,00	(100%)
Jumlah	0,00	651.920.000,00	(100%)

8.2.12. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Penyisihan Piutang	281.795.211,82	1.959.608.575,79	(85,62%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang mengakui penyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 85,62%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.12
Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pajak Daerah	0,00	1.548.518.992,79	(100%)
2. Retribusi Daerah	281.794.491,82	323.771.807,54	(18,96%)
3. Piutang lain-lain	0,00	87.317.775,46	(100%)
Jumlah	281.795.211,82	1.959.608.575,79	(85,62%)

8.2.13. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	306.945.341,48,00	14.592.922,44	2003,38%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan kerugian investasi non permanenbiaya yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beban penyisihan kerugian investasi non permanen mengakui penyisihan kerugian investasi non permanen berasal dari penyisihan kerugian investasi non permanen atas piutang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di 27 kelurahan di Kota Madiun. Beban penyisihan kerugian investasi non permanen untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar 2003,38%.

8.2.14. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Penyusutan Aset Tetap	133.800.580.136,00	126.761.603.247,00	5,55%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap yang diestimasikan berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 Aset tetap lainnya tidak disusutkan. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan. Beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar 5,55%.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.14
Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Peralatan dan Mesin	66.399.687.320,00	62.298.873.413,00	(6,19%)
2. Gedung dan Bangunan	16.830.941.199,00	16.169.736.769,00	(4,47%)
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.569.951.617,00	48.292.993.065,00	(12,84%)
Jumlah	133.800.580.136,00	126.761.603.247,00	(8,50%)

8.2.15. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.164.151.141,00	2.540.028.976,00	(24,57%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud akibat penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.164.151.141,00. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp624.122.165,00 terjadi kenaikan sebesar 24,57%.

8.2.16. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Lain-lain	2.116.396.013,49	4.834.882.109,36	(56,23%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain beban atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 8.2.16
Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Reklas BM tidak memenuhi kapitalisasi AT			
1. Tanah	0,00	0,00	0,00%
2. Peralatan dan Mesin	623.920.139,10	1.274.197.384,68	-51,03%
3. Gedung dan Bangunan	0	340.051.882,00	0,00%
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	440.000,00	0,00%
5. Aset Tetap Lainnya	1.457.946.895,00	2.852.702.842,68	-48,89%
Koreksi BM tidak memenuhi kriteria AT			
1. Tanah	0,00	0,00	0,00%
2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00%
3. Gedung dan Bangunan	0,00	367.490.000,00	0,00%
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	2.081.867.034,10	4.834.882.109,36	(56,94%)

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.16
Beban Lain-lain

Penambahan selama 2019	KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E
Beban Lain-lain	1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	0,00	473.499.939,00	0,00	0,00	1.457.946.895,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	14.055.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	1.551.500,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	20.913.000,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	14.190.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP&UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bapenda	0,00	23.217.700,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	763.500,10	0,00	0,00	0,00
Kec. Kartoharjo	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Taman	0,00	69.955.000,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	623.920.139,10	0,00	0,00	1.457.946.895,00

Beban lain-lain atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.081.867.034,10.

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.16
Beban Lain-lain

Penambahan selama 2019	KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E
Beban Lain-lain	1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan&KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU&TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasSatpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasLingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, K&UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasBudparpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DinasPerpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian&KP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beban lain-lain atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

8.3. Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Kegiatan Non Operasional	328.752.640,00	0,00	(100%)

Jumlah tersebut adalah jumlah kegiatan non operasional Kota Madiun yang berakhir pada periode 31 Desember 2020. Kegiatan Non Operasional terdiri dari surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian jangka panjang, defisit penjualan aset non lancar, defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Kegiatan Non operasional yang berakhir pada 31 desember 2020 Kota Madiun adalah sebesar Rp328.752.640,00.

8.3.1 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	328.752.640,00	0,00	(100%)

Jumlah tersebut akibat dari kegiatan non operasional yang berasal dari persediaan yang sudah kadaluwarsa dari Dinas Dukcapil sebesar Rp286.555.750,00 dan Dinas Perhubungan Rp42.196.890,00.

8.4. Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pos Luar Biasa	35.257.900,00	118.877.262,00	(70,34%)

Jumlah tersebut adalah adalah beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2021. Beban pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa, beban luar biasa, dan beban tidak terduga. Beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp35.257.900,00 dibandingkan dengan beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2019 Rp118.877.262,00 terjadi penurunan 70,34%.

8.4.1. Beban Tidak Terduga

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Luar biasa	35.257.900,00	118.877.262,00	(70,34%)

Jumlah tersebut adalah terdiri dari beban untuk pengembalian bantuan keuangan terkait kegiatan peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.607.900,00 dan pengembalian kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah atas uang sewa gedung wisma haji Kota Madiun sebesar Rp31.650.000,00 karena masa pandemi Covid-19.



PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

9.1.1. ARUS KAS MASUK

9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penerimaan Pajak Daerah	90.291.466.033,07	91.077.191.655,45

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.
Pajak Daerah

Pajak Daerah	Penerimaan 2020	Penerimaan 2019
1	2	3
1. Pajak hotel	4.372.533.671,20	6.626.179.761,00
2. Pajak restoran	11.403.756.266,81	12.986.705.054,18
3. Pajak hiburan	836.732.808,00	2.332.473.974,00
4. Pajak reklame	1.928.783.033,00	1.837.373.634,87
5. Pajak penerangan jalan	20.664.839.579,46	20.627.903.089,64
6. Pajak parkir	808.361.637,00	1.911.580.014,00
7. Pajak air tanah	329.465.566,60	330.002.129,20

8. BPHTB	27.567.526.535,00	23.753.115.140,56
9. PBB	22.379.466.936,00	20.671.858.858,00
Total	90.291.466.033,07	91.077.191.655,45

1. Penerimaan pajak hotel per 31 Desembertahun anggaran 2020 sebesar Rp4.372.533.671,20. Perincian penerimaan pajak hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.1
Pajak Hotel

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	24.765.560,00	11.947.060,00	48,24%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	4.365.228.091,20	4.360.586.611,20	99,89%
Total	4.389.993.651,20	4.372.533.671,20	99,60%

2. Penerimaan pajak Restoran tahun anggaran 2020 sebesar Rp.11.403.756.266,81 Perincian penerimaan pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.2
Pajak Hotel Restoran

Pajak Restoran	Jumlah	Realisasi2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	93.601.832,00	22.541.282,00	24,08%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	11.479.252.099,81	11.381.214.934,81	99,15%
3. Karcis benda berharga/PP1 2020			
Total	11.572.853.931,81	11.403.756.266,81	98,54%

3. Penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2020 sebesar Rp836.732.808,00 Perincian penerimaan pajak hiburan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.3
Pajak Hiburan

Pajak Hiburan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	36.287.250,00	21.722.250,00	59,86%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	827.689.008,00	815.010.558,00	98,47%
Total	863.976.258,00	836.732.808,00	96,85%

4. Penerimaan pajak reklame tahun anggaran 2020 sebesar Rp Rp1.928.783.033,00. Perincian penerimaan pajak reklame untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.1.4
Pajak Reklame**

Pajak Reklame	Jumlah	Realisasi2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	108.259.580,00	78.140.120,00	72,18%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	1.912.823.168,00	1.850.642.913,00	96,75%
Total	2.021.082.748,00	1.928.783.033,00	95,43%

5. Penerimaan pajak penerangan jalan tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.664.839.579,46 Perincian penerimaan pajak penerangan jalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.1.5
Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Realisasi2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	1.916.114.552,82	1.916.114.552,82	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	18.748.724.909,14	18.748.725.026,64	110,22%
Total	20.664.839.461,96	20.664.839.579,46	100%

6. Penerimaan pajak parkir tahun anggaran 2020 sebesar Rp808.361.637,00 Perincian penerimaan pajak parkir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.1.6
Pajak Parkir**

Pajak Parkir	Jumlah	Realisasi2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	750.000,00	750.000,00	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	830.758.304,00	807.611.637,00	97,24%
Total	831.508.304,00	808.361.637,00	97,24%

7. Penerimaan pajak air tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp329.465.566,60. Perincian penerimaan pajak air tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.7
Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah	Jumlah	Realisasi2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	29.180,00	0,00	0%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	329.489.031,60	329.465.546,60	99,99%
Total	329.518.211,60	329.465.566,60	99,98%

8. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp27.567.526.535,00. Perincian penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.8
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	27.567.526.535,00	27.567.526.535,00	100%
Total	27.567.526.535,00	27.567.526.535,00	100%

9. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp22.379.466.936,00. Perincian penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1.9
Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	7.655.170.056,00	1.421.963.475,00	14,17%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	24.732.653.246,00	20.957.503.461,00	62,79%
Total	32.387.823.302,00	22.379.466.936,00	58,56%

9.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Retribusi Daerah	15.619.539.719,00	20.301.325.919,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian anggaran dan penerimaan pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.2
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah OPD	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	6.518.635.000,00	6.004.754.409,50	92,12%	7.701.829.190,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	8.347.224.000,00	8.786.735.909,50	105,27%	10.663.257.504,00
4.1.2.03. Perizinan tertentu	1.001.800.000,00	828.049.400,00	65,95%	1.936.239.225,00
Jumlah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44 %	20.301.325.919,00

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji dibawah ini.

1. 4.1.2.01	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
Retribusi Jasa Umum	6.518.635.000,00	6.004.754.409,50	92,12 %	7.701.829.190,00
a. 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Dinas Lingkungan Hidup	<u>136.803.000,00</u>	<u>176.011.500,00</u>	<u>128,66%</u>	<u>227.944.000,00</u>
b. 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum . Dinas Perhubungan	<u>1.880.250.000,00</u>	<u>1.483.688.612,50</u>	<u>78,56%</u>	<u>2.761.329.000,00</u>
c. 4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar. Dinas Perdagangan	<u>3.810.190.000,00</u>	<u>3.565.623.620,00</u>	<u>93,58%</u>	<u>4.170.236.890,00</u>
e. 4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan	<u>474.000.000,00</u>	<u>506.360.800,00</u>	<u>106,83%</u>	<u>474.996.800,00</u>
d. 4.1.2.01.09 Retribusi Ulang Tera Dinas perdagangan	<u>61.060.000,00</u>	<u>66.236.980,00</u>	<u>108,48%</u>	<u>67.322.500,00</u>
f. 4.1.2.01.10 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	<u>156.332.000,00</u>	<u>207.139.897,00</u>	<u>132,50%</u>	<u>.00</u>

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

2. 4.1.2.02	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
Retribusi Jasa Usaha	8.347.224.000,00	8.786.735.909,50	105,27 %	10.663.257.504,00
a. 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<u>7.023.356.000,00</u>	<u>7.210.792.116,50</u>	<u>102,67%</u>	<u>8.442.093.638,00</u>
Dinas Perkerjaan Umum	10.000.000,00	10.005.000,00	100,05%	543.010.000,00
Dinas Kebudayaan & pariwisata	150.000.000,00	254.625.000,00	169,75%	0,00
Dinas Perhubungan	30.000.000,00	51.079.740,00	170,27%	51.124.800,00
Badan Kepegawaian Daerah	70.000.000,00	96.875.000,00	138,39%	325.125.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.187.289.000,00	3.883.245.156,50	92,74%	4.635.854.533,00
Kecamatan Kartoharjo	1.200.000.000,00	1.307.796.690,00	108,98%	1.332.168.820,00
Kec. Manguharjo	647.000.000,00	659.221.080,00	101,89%	646.240.455,00
Kec. Taman	700.000.000,00	918.887.850,00	131,27%	886.804.230,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.067.000,00	29.056.600,00	99,96%	21.765.800,00
b. 4.1.2.02.04 Retribusi Tempat Khusus Parkir Dinas Perhubungan	<u>550.000.000,00</u>	<u>751.334.000,00</u>	<u>136,61%</u>	<u>992.301.956,00</u>
c. 4.1.2.02.05 Retribusi Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian	<u>37.400.000,00</u>	<u>37.110.000,00</u>	<u>99,22%</u>	<u>40.418.000,00</u>
d. 4.1.2.02.06 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<u>736.468.000,00</u>	<u>787.499.793,00</u>	<u>106,93%</u>	<u>1.188.443.910,00</u>
Dinas Perkim	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	87.543.740,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	735.468.000,00	786.499.793,00	106,93	200.425.551,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0%	900.474.619,00
3. 4.1.2.03	Anggaran 2020	Realisasi2020	0 %	Realisasi2019
a. 4.1.2.03.02 Retribusi Perizinan Tertentu	1.001.800.000,00	828.049.400,00	82,66%	1.936.239.225,00

a.. 4.1.2.03.01	<u>1.000.000.000,00</u>	<u>826.249.400,00</u>	<u>82,62%</u>	<u>1.934.259.225,00</u>
Retribusi Mendirikan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum				
b. 4.1.2.03.02	0,00	0,00	0,00%	0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Dinas Pergadangan				
c. 4.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.980.000,00
Jumlah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44 %	20.301.325.919,00

➤ **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- ☑ Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan per 31 Desember 2020 sebesar Rp176.011.500,00 atau mencapai 128,66 % yang berarti Rp39.208.500,00 atau 28,66% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp136.803.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp176.011.500,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019 sebesar Rp227.944.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp51.932.500,00 atau 22,78%.

➤ **Dinas Perhubungan**

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- ☑ Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.483.688.612,50 atau mencapai 21,09% yang berarti Rp396.561.387,50 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.880.250.000,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.483.688.612,50 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebesar Rp2.761.329.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.277.640.387,50 atau 46,27 %.

➤ **Dinas Perdagangan**

Retribusi pelayanan pasar dan retribusi tera ulang.

☑ Penerimaan retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.565.623.620,00 atau mencapai 93,58% yang berarti atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3.810.190.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.565.623.620,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 4.170.236.890,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp604.613.270,00 atau 14,50 %.

☑ Penerimaan retribusi ulang tera per 31 Desember 2020 Rp66.236.980,00 atau mencapai 108,48% yang berarti Rp5.176.980,00 atau 8,48% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp61.060.000,00. dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar tahun 2019 sebesar Rp67.322.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.085.520,00 atau 1,61%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.

➤ **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU TR)**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga .

☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp10.005.000,00 atau mencapai 100,05% yang berarti Rp5.000,00 atau 0,05% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.000.000,00. terdiri dari realisasi sewa wales dan sewa asrama haji pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum tidak mengelola retribusi kekayaan daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut telah dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan tidak terdapat realisasi dikarenakan pandemi covid 19 semua kegiatan ditiadakan.

➤ **Dinas Kebudayaan Olah Raga Dan Pariwisata**

☑ Penerimaan pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp254.625.000,00 atau mencapai 169,75% yang berarti Rp104.625.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 terdiri dari realisasi sewa Asrama haji yang pada masa pandemi covid ini di sewa oleh dinas kesehatan untuk lokasi karantina covid 19 sesuai dengan potensi riil

➤ **Dinas Perhubungan**

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.079.740,00 atau mencapai 170,27% yang berarti Rp21.079.740,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 terdiri dari realisasi pemakaian bahu badan jalan dan retribusi gudang/kios ex terminal barang dan sesuai dengan potensi riil.

➤ **Badan Kepegawaian**

- ☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp.96.875.000,00 atau mencapai 138,39% yang berarti Rp.26.875.000,00 atau lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp70.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.96.875.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp325.125.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp.228.250.000,00 atau 70,20%. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan volume kegiatan yang menggunakan gedung diklat baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di wilayah Kota Madiun.

➤ **BPKAD**

- ☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2020 sebesar Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp3.883.245.156,00 atau mencapai 92,74% yang berarti Rp304.043.843,50 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.187.200.000,00. Realisasi ini terdiri atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT). Pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.883.245.156,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp4.635.854.533,00 atau terjadi Penurunan sebesar Rp752.609.376,50 atau 16,23%.

➤ **Kecamatan Kartoharjo**

- ☑ Penerimaan pemakaian kekayaan daerah kecamatan kartoharjo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.307.796.690,00 atau mencapai 108,98% yang berarti Rp107.796.690,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.200.000.000,00. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp. 6.000.000,00 dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp. 1.301.796.690,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.307.796.690,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp1.332.168.820,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp24.372.130,00 atau 1,83

➤ **Kecamatan Manguharjo**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan manguharjo per 31 Desember 2020 sebesar Rp659.221.080,00 atau mencapai 101,89% yang berarti Rp12.221.080,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp647.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan manguharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan.

- ☑ Rrealisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp4.500.000,00. dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp.654.721.080,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp659.221.080,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp646.240.455,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp12.980.625,00 atau 2,01%.

➤ **Kecamatan Taman**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan taman per 31 Desember 2020 sebesar Rp918.887.850.000,00 atau mencapai 131,27% yang berarti Rp218.887.850,00 atau 31,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp700.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan taman berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp.912.887.850,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp918.887.850,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp886.804.230,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp32.083.620,00 atau 3,62%.

➤ **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong hewan.

- ☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.056.600,00 atau mencapai 99,96% yang berarti Rp10.400,00 atau 0,04% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.056.600,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp21.765.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7.290.800,00 atau 33,50%.
- ☑ Penerimaan retribusi rumah potong hewan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.110.000,00 atau mencapai 99,22% yang berarti Rp290.000,00 0,78% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.400.000,00.

Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.110.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2019 sebesar Rp40.418.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.308.000,00 atau 8,18%.

➤ **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga

➤ **Dinas Perkim**

- Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00, atau mencapai 100% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2019 sebesar Rp87.543.740,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp86.543.740,00.

➤ **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Budparpora)**

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

- Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga 31 Desember 2020 sebesar Rp786.499.793,00 atau mencapai 106,93% yang berarti Rp51.031.793,00 atau 6,93% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp735.468.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2020 sebesar Rp786.499.793,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2019 sebesar Rp200.425.551,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp586.074.242,00.

➤ **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU TR)**

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

- Penerimaan retribusi IMB per 31 Desember 2020 sebesar Rp826.249.400,00 atau mencapai 82,62% yang berarti Rp173.750.600,00 atau 17,38% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2020 sebesar Rp 826.249.400,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2019 sebesar Rp1.934.259.225,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.108.009.825,00 atau 57,28%.

➤ **Dinas Perdagangan**

Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- Penerimaan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun anggaran 2020 tidak terdapat realisasi.

➤ **Dinas Perhubungan**

Retribusi izin trayek.

- Penerimaan izin trayek per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.800.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000,00.

Realisasi izin trayek tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2019 sebesar Rp1.980.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp180.000,00 atau 9,09%.

9.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.216.268.562,40	14.641.711.340,55

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel.9.1.1.3
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
1	2	3
1 PDAM	6.550.840.385,00	5.711.547.090,00
2 BPR Bank Daerah	1.361.944.488,00	2.121.736.367,05
3 Aneka Usaha	841.578.308,00	693.742.600,00
4 Bank Jatim	6.461.905.381,40	6.114.685.283,50
Total	15.216.268.562,40	14.641.711.340,55

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2019 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM anggaran 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun 2019 sebesar Rp5.711.547.090,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp839.293.295,00 atau 14,69%.

Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.3.1
PDAM

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PDAM	Penerimaan2020	Penerimaan2019	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2020	6.550.840.385,00	5.711.547.090,00	114,69%
Total	6.550.840.385,00	5.711.547.090,00	114,69%

2. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 atau mencapai 110,00% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.238.131.353,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar per 31 Desember 2019 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 atau terjadi penurunan sebesar Rp 759.791.879,05 atau 35,81%

Tabel 9.1.1.3.2
BPR Bank Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr BPR Bank Daerah	Penerimaan2020	Penerimaan2019	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0.00%
2. Pendapatan LO 2020	1.361.944.488,00	2.121.736.367,05	64.19%
Total	1.361.944.488,00	2.121.736.367,05	64,19%

3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp841.578.308,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp841.578.308,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2020 target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 841.578.308,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha 2020 per 31 Desember 2019 yang telah diaudit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.3.3
PD Aneka Usaha

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PD Aneka Usaha	Penerimaan2020	Penerimaan2019	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2020	841.578.308,00	693.742.600,00	120,31%
Total	841.578.308,00	693.742.600,00	120,31%

- 4 Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun per 31 Desember2020 sebesar Rp6.461.905.381,40 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.461.905.381,40. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.461.905.381,40 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2019 sebesar Rp6.114.685.283,50 atau terjadi peningkatan sebesar Rp347.220.097,90 atau 5,68%.Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya Tahun Buku 2020 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2020

Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.3.4
PT Bank Jatim

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PT Bank Jatim	Penerimaan2020	Penerimaan2019	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2020	6.461.905.381,40	6.114.685.283,50	105,68%
Total	6.461.905.381,40	6.114.685.283,50	105,68%

9.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan lain-lain PAD yang sah	127.689.132.674,12	126.028.525.498,59

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah dan kas blud yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama tahun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Perincian penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.4
Penerimaan Lain Lain PAD Yang Sah**

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Penerimaan 2020	Penerimaan 2019
1. Dinas Kesehatan	9.912.132.642,25	10.966.974.494,28
a. Pendapatan BLUD	9.912.132.642,25	10.966.974.494,28
2. RSUD	105.973.809.777,18	92.096.175.060,81
a. Pendapatan BLUD	105.973.809.777,18	92.096.175.060,81
3. BAPENDA	97.997.142,32	369.660.147,56
a. Jasa giro	0,00	0,00
b. Pendapatan lain-lain	97.997.142,32	369.660.147,56
4. BPKAD	0,00	9.371.250,00
a. Pendapatan Denda Retribusi	0,00	9.371.250,00
5. BPKAD (SKPKD)	11.646.395.478,34	22.477.825.245,94
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	1.355.620.529,82	1.516.423.603,09
c. Pendapatan dari bunga deposito	9.026.027.396,74	18.141.780.820,88
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	128.290.315,83	125.232.086,26
e. Pendapatan lain-lain	1.092.395.769,95	1.742.072.107,84
f. Pendapatan dari pengembalian	40.278.790,00	104.875.185,41
g. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	3.782.676,00	847.441.442,46
6. Dinas Pertanian	37.410.000,00	25.017.000,00
a. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	37.410.000,00	25.017.000,00
7. Dinas Perdagangan	21.387.200,00	83.502.300,00
a. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	21.387.200,00	83.502.300,00
Total	127.689.132.674,12	126.028.525.498,59

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Dinas Kesehatan

- Realisasi pendapatan blud puskesmas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.912.132.642,25 atau mencapai 102,84% yang berarti Rp273.363.642,25 atau 2,84% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.638.769.000,00.

Realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.912.132.642,25 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud puskesmas tahun

anggaran 2019 sebesar 10.966.974.494,28terdapat penurunan sebesar Rp1.054.841.852,03 atau sebesar 9,62%.

2. RSUD

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD RSUD

- Realisasi pendapatan blud RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp105.973.809.777,18 atau mencapai 111,55% yang berarti Rp10.973.809.777,18 atau 11,55% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp95.000.000.000,00.

Realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 105.973.809.777,18dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2019sebesar Rp92.096.175.060,81terdapat peningkatan sebesar Rp13.877.634.716,37 atau sebesar 15,07%.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

a. Pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan.

- Realisasi pendapatan lain-lain per 31 Desember 2020 berupa denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar Rp97.976.884,00dan denda pajak sebesar Rp20.258,32 realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB dan denda pajak tidak dianggarkan dalam dalam APBD tahun anggaran 2020karena realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB dan denda pajak tidak dapat diprediksi perolehannya.

4. BPKAD (SKPKD)

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

- Realisasi pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan per 31 Desember 2020 tidak ada realisasi .

b. Pendapatan jasa giro.

- Realisasi pendapatan jasa giro per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.355.620.529,82 atau mencapai 90,37% yang berarti Rp144.379.470,18 atau 9,63% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2020 sebesar Rp1.355.620.529,82dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.516.423.603,09 terdapat penurunan sebesar Rp160.803.073,27 atau sebesar 10,60%.

c. Pendapatan Bunga Deposito.

- Realisasi pendapatan bunga depositoper 31 Desember2020sebesar Rp9.026.027.396,74 atau100,29 % yang berarti Rp 26.027.396,74 atau 0,29% dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.026.027.396,74dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2019 sebesar

Rp18.141.780.820,88terdapat penurunan sebesar Rp9.115.753.424,14 atau sebesar 50,25%.

d. Pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

- Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK per 31 Desember 2020 sebesar Rp128.290.315,83 atau mencapai 128,29% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp128.290.315,83dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2019 sebesar Rp125.232.086,26terdapat penurunan sebesar Rp3.058.229,57 atau 2,44%.

e. Pendapatan lain-lain.

Realisasi pendapatan lain lain terdiri dari atas

- Realisasi pendapatan lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.093.395.769,95. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.Pendapatan lain lain antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat
- Realisasi pendapatan dari pengembalian per 31 Desember 2020 Rp40.278.790,00pendapatan ini realisasi dari pengembalian pajak dari belanja hibah untuk covid.Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.

f. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- Realisasi pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.782.676,00. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.

- Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.410.000,00 atau mencapai 149,64% yang berarti Rp12.410.000,00 atau 49.64% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp25.000.000,00.

Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.410.000,00dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2019 sebesar Rp25.017.000,00terdapat peningkatan sebesar Rp12.393.000,00 atau sebesar 49,54%.

7. Dinas Perdagangan

a. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

- Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 21.387.200,00 atau mencapai 11,14% yang berarti Rp170.612.800,00 atau 88,86% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp192.000.000,00. Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2020 sebesar Rp21.387.200,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2019 sebesar Rp83.502.300,00 terdapat penurunan sebesar Rp62.115.100,00 atau 74,39%.

9.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	25.788.438.430,00	16.076.390.385,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.5
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
1	2	3
PBB	3.215.220.537,00	3.507.795.600,00
PPH Pasal 21,25,29	22.573.217.893,00	12.568.594.785,00
Total	25.788.438.430,00	16.076.390.385,00

9.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	44.866.769.518,00	52.685.578.633,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.6
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Sumber daya hutan	89.390.094,00	140.982.000,00
Pungutan hasil Perikanan	788.276.289,00	590.155.800,00
Pertambangan migas	43.186.177.893,00	51.351.710.360,00
Pertambangan umum Royalti	771.296.492,00	567.954.800,00
Pertambangan umum migas	31.628.750,00	34.775.673,00
Total	44.866.769.518,00	52.685.578.633,00

9.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Alokasi Umum	473.852.439.000,00	522.596.024.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

9.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	72.596.481.424,00	76.239.204.819,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.8
Dana Alokasi Khusus

DAK	Penerimaan2020	Penerimaan2019
1	2	3
Kesehatan	1.038.522.550,00	4.467.310.349,00
Jalan	0,00	8.953.419.000,00
UKM	491.010.000,00	0,00
BOP PAUD	3.930.092.890,00	3.948.600.000,00
TPG	53.974.947.000,00	54.369.533.120,00

Tunj.peng.guru	128.750.000,00	142.850.000,00
BOP Kesehatan	6.500.725.343,00	2.678.626.700,00
BOP KB	665.356.623,00	336.437.450,00
Kependudukan	814.083.400,00	786.728.200,00
Bantuan OPS	652.500.000,00	555.700.000,00
Keluarga berencana	227.800.400,00	0,00
Rujukan	2.233.783.318,00	0,00
Pengendalian penyakit	1.938.909.900,00	0,00
Total	72.596.481.424,00	76.239.204.819,00

9.1.1.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai	15.455.519.425,00	13.939.983.813,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

9.1.1.10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	84.049.652.855,00	84.934.976.933,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.10
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
1	2	3
1. PKB	27.263.977.323,00	27.502.812.146,00
2. BBNKB	12.318.198.181,00	12.671.773.186,00
3. PPBKB	14.408.023.859,00	22.404.927.429,00
4. Pajak pemanfaatan air permukaan	200.953.509,00	250.651.372,00
5. Pajak Rokok	29.858.499.983,00	22.104.812.800,00
Total	84.049.652.855,00	84.934.976.933,00

9.1.1.11. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	1.017.079.000,00	1.114.579.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan provinsi dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.11
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar.	0,00	30.000.000,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/TK/Paud Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00
Honor kinerja guru Non PNS(TK)	12.000.000,00	72.000.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	75.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00
Honor kinerja guru Non PNS SD	12.000.000,00	48.000.000,00
Honor kinerja guru Non PNS SMP	12.000.000,00	12.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	55.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	121.029.000,00
Setoran Bantuan propinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat inap	30.000.000,00	1.500.000,00
Total	1.017.079.000,00	1.114.579.000,00

9.1.1.12. Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Dana Penyesuaian	73.313.029.000,00	55.542.726.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019. Perincian penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.12
Penerimaan Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Dana insentif daerah	73.313.029.000,00	55.542.726.000,00
Total	73.313.029.000,00	55.542.726.000,00

9.1.1.13. Penerimaan Hibah

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Hibah	20.029.980.000,00	19.189.280.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.13
Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan Hibah	20.029.980.000,00	19.189.280.000,00
Total	20.029.980.000,00	19.189.280.000,00

9.1.2. ARUS KAS KELUAR

9.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pembayaran pegawai	441.740.830.119,00	440.222.361.775,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluarnya dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian penerimaan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.1
Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
1	3	5

1. Belanja pegawai belanja tidak langsung	371.359.200.247,00	368.531.374.093,00
2. Belanja pegawai belanja langsung	50.123.298.718,00	59.833.077.649,00
3. Belanja pegawai BLUD BTL dan BL	17.992.947.904,00	9.528.675.000,00
4. Belanja Pegawai BOS	2.265.383.250,00	2.329.235.033,00
Total	441.740.830.119,00	440.222.361.775,00

Perincian pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.1.1
Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
BELANJA PEGAWAI	508.839.805.584,56	441.740.830.119,00	86,81%	440.222.361.775,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung	428.985.359.8916,56	371.359.200.247,00	86,57%	375.303.304.387,00
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	260.227.047.549,00	221.623.558.333,00	85,17%	225.712.878.659,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS	92.771.688.814,00	82.277.750.079,00	88,69%	74.356.579.377,00
Tambahan Penghasilan PNS BLUD	9.350.708.000,00	7.200.702.042,00	77,01%	6.771.930.294,00
5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya dan Anggota	4.701.600.000,00	4.545.272.900,00	96,68%	4.454.496.650,00
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.840.503.528,00	3.817.429.733,00	99,40%	3.992.809.987,00
5.1.1.07 Tunjangan Profesi Guru	58.093.812.000,00	51.894.487.160,00	89,33%	60.014.609.420,00
Belanja Pegawai Langsung	79.854.445.693,00	70.381.629.872,00	88,14%	64.919.057.338,00
5.2.1.01 Honorarium PNS	53.013.650.481,00	45.165.275.724,00	85,20%	40.433.695.030,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS	8.823.435.000,00	8.418.735.000,00	95,41%	8.394.345.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur	4.363.116.762,00	3.739.990.036,00	85,72%	4.233.107.325,00
5.2.1.05 Belanja Pegawai BLUD	11.068.945.400,00	10.792.245.862,00	97,50%	9.528.675.000,00
5.2.1.06 Belanja Pegawai BOS	2.585.298.050,00	2.265.383.250,00	87,63%	2.329.235.033,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.1.1a
Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	190.096.592.738,00	174.792,378,157.00	91.95%	190.598.262.380,00
Dinas Kesehatan KB	39.811.396.840,00	37,008,693,188.00	92.96%	34.902.936.663,00
RSUD	31.301.626.85400	28,400,006,313.00	90.73%	26.891.041.812,00
Dinas PU TR	9.644.952.463,00	8,744,217,456.00	90.66%	10.252.671.794,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Pegawai Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dinas Perkim	5.945.800.100,00	5,633,900,438.00	94.75%	5.265.542.820,00
Satpol PP	8.832.021.925,00	8,151,783,648.00	92.30%	7.039.951.936,00
BPBD	1.424.251.964,00	1,367,637,708.00	96.02%	1.174.721.906,00
Dinas Sosial	6.369.241.533,00	4,526,201,295.00	71.06%	4.661.065.597,00
Dinas Tenaga Kerja	4.099.336.970,00	3,800,017,709.00	92.70%	3.448.385.833,00
Dinas LH	13.551.642.314,00	12,858,999,568.00	94.89%	12.669.999.211,00
Dispendukcapil	4.402.506.280,00	3,816,623,191.00	86.69%	4.045.559.954,00
Dinas Perhubungan	9.227.661.108,00	8,192,811,571.00	88.79%	7.593.403.732,00
Dinas Infokom	5.392.147.988,00	4,580,348,886.00	84.94%	4.910.728.226,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	4.480.437.270,00	4,090,955,679.00	91.31%	4.162.051.362,00
Dinas Budparpora	4.790.625.568,00	4,178,015,160.00	87.21%	3.347.198.454,00
Dinas Perpustakaan	3.534.824.270,00	3,303,713,338.00	93.46%	2.593.258.260,00
Walikota/Wakil	802.579.300,00	705,267,744.00	87.88%	629.404.684,00
Bagian Pemerintahan	840.078.500,00	721,264,144.00	85.86%	894.705.554,00
Bagian Organisasi	841.214.220,00	780,725,486.00	92.81%	659.866.155,00
Bagian Umum	12.738.606.470,00	11,520,395,723.00	90.44%	12.362.238.497,00
Bagian Hukum	1.663.546.320,00	1,541,652,743.00	92.67%	817.869.796,00
Bagian Perekkesra	972.787.120,00	889,257,083.00	91.41%	707.565.503,00
Bagian Adbang	1.612.659.320,00	1,230,156,802.00	76.28%	1.579.669.572,00
Sekretariat DPRD	15.992.463.064,00	14,964,304,663.00	93.57%	15.084.343.422,00
BKD	5.585.895.085,00	5,108,831,947.00	91.46%	5.125.067.843,00
BPKAD	47.452.631.525,56	18,945,617,600.00	39.93%	13.277.159.465,00
Bependa	8.441.898.000,00	7,748,998,522.00	91.79%	8.222.472.358,00
Inspektorat	6.476.229.800,00	6,426,127,009.00	99.23%	4.873.610.991,00
BAPPEDA	6.806.303.870,00	5,762,592,782.00	84.67%	4.991.143.746,00
Kec Kartoharjo	11.872.143.370,00	11,133,506,105.00	93.78%	9.395.694.869,00
Kec Manguharjo	12.332.495.090,00	11,782,442,267.00	95.54%	9.606.829.953,00
Kec Taman	12.192.679.300,00	11,456,627,254.00	93.96%	10.740.745.115,00
Bakesbangpol	3.990.198.275,00	3,631,686,789.00	91.02%	3.238.532.219,00
Dinas Pertanian KP	5.367.006.360,00	5,021,091,735.00	93.55%	5.023.791.156,00
Dinas Perdagangan	9.953.324.410,00	8,923,980,416.00	89.66%	9.434.870.937,00
Total	508.839.805.584,56	441,740,830,119.00	86,81%	440.222.361.775,00

9.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pembayaran barang dan Jasa	350.024.036.581,10	369.278.712.052,86

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kasBLUD dan kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.2
Pembayaran Barang dan Jasa**

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Barang jasa	256.320.438.671,56	268.630.971.834,52
Barang jasa BLUD	79.739.512.222,00	87.983.714.667,15
Barang jasa BOS	13.964.085.687,54	12.664.025.551,19
Total	350.024.036.581,10	369.278.712.052,86

1. Barang dan Jasa

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.2.1
Pembayaran Barang dan Jasa**

PembayaranBarang dan Jasa	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Barang dan Jasa	379.671.611.527,00	350.024.036.581,10	92,22%	369.278.712.052,86
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	23.966.777.859,00	20.073.063.974,20	83,75%	19.937.173.455,00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material	11.987.009.226,00	10.519.865.275,00	87,76%	6.148.942.644,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	112.716.092.691,00	106.400.462.468,00	94,40%	92.731.559.090,22
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi	973.466.108,00	531.407.492,00	54,59%	3.025.083.052,26
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.619.398.470,00	6.235.084.582,00	81,83%	6.217.236.004,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	9.644.092.733,00	8.831.628.321,00	91,58%	16.180.867.596,50
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.267.163.160,00	861.995.700,00	68,03%	2.873.502.980,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	521.322.850,00	279.105.000,00	53,54%	1.546.659.445,00

PembayaranBarang dan Jasa	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.058.487.500,00	1.283.118.380,00	62,33%	5.351.005.462,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	24.673.169.008,00	21.313.929.710,00	86,39%	30.167.721.294,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	914.832.250,00	845.440.900,00	92,41%	1.079.377.963,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	462.226.000,00	456.891.900,00	98,85%	326.087.678,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.408.186.983,00	5.032.377.282,00	93,05%	4.956.881.212,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	29.873.243.524,00	23.974.388.194,00	80,25%	40.205.255.910,00
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	00,00%	48.000.000,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.081.336.000,00	851.170.000,00	78,71%	2.655.555.800,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan	20.115.355.533,00	19.383.968.120,15	96,36%	22.696.464.521,54
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi	7.358.218.370,00	6.512.191.250,00	88,50%	5.843.835.523,00
5.2.2.22 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	23.964.447.185,00	22.648.150.123,21	94,51%	3.344.642.204,00
5.2.2.24 Belanja Software / Aplikasi Komputer	100.000.000,00	0,00	00,00%	98.060.000,00
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.282.970.150,00	79.739.512.222,00	100,58%	87.983.714.667,15
5.2.2.27 Belanja uang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	425.453.500,00	286.200.000,00	67,27%	3.197.060.000,00
5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS	15.258.362.427,00	13.964.085.687,54	91,52%	12.664.025.551,19

9.1.2.3. Pembayaran Hibah

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pembayaran hibah	12.638.153.671,53	15.422.819.810,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan naskah perjanjian Hibah daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perincian pengeluaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.3
Pembayaran Hibah

Hibah SKPKD	Anggaran2020	Realisasi 2020	%	Realisasi2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.4.05.01 Hibah kepada KQRPRI	168.250.000,00	168.250.000,00	100,00%	168.250.000,00
5.1.4.05.03 Hibah kepada KONI	1.000.000.000,00	495.444.189,53	49,54%	5.606.792.820,08
5.1.4.05.04 Hibah kepada Pramuka	308.050.000,00	307.507.500,00	99,82%	305.462.750,00
5.1.4.05.05 Hibah kepada PMI	2.348.054.000,00	2.234.224.982,00	95,15%	968.116.250,00
5.1.4.05.06 Hibah kepada MUI	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00
5.1.4.05.07 Hibah kepada BAZ	388.615.000,00	388.615.000,00	100,00%	388.615.000,00
5.1.4.05.11 Hibah kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.15 Hibah kepada GOW	15.000.000,00	0,00	00,00%	808.550.000,00
5.1.4.05.16 Hibah kepada Dewan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.17 Hibah kepada GOPTKI	15.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.19 Hibah Pengamanan Kepada Polresta	850.000.000,00	850.000.000,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.20 Hibah Pengamanan kepada Kodim	179.955.000,00	179.955.000,00	100,00%	179.955.000,00
5.1.4.05.28 Bantuan Operasional PAUD (DAK)	4.685.400.000,00	3.692.100.000,00	78,80%	4.019.720.990,00
5.1.4.05.29 Hibah Kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia	0,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.34 Hibah kepada ORKEMAS/LSM	89.500.000,00	0,00	00,00%	35.000.000,00
5.1.4.05.35 Hibah kepada Den POM Pengamanan Terpadu	129.409.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.41 Hibah Bantuan Operasional Sekolah	1.086.240.000,00	953.640.000,00	87,79%	0,00
5.1.4.05.44 Hibah kepada PGRI	142.000.000,00	0,00	00,00%	100.000.000,00
5.1.4.05.48 Hibah kepada Persatuan	0,00	0,00	00,00%	10.000.000,00
5.1.4.05.50 Hibah kepada LKP2 TPA/TPQ	1.586.400.000,00	1.586.400.000,00	100,00%	1.586.400.000,00
5.1.4.05.54 Hibah kepada Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	0,00	0,00	00,00%	10.000.000,00
5.1.4.05.55 Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.000.000,00	0,00	00,00%	100.000.000,00
5.1.4.05.56 Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	200.357.000,00	0,00	00,00%	200.357.000,00

5.1.4.05.57 Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia	196.855.000,00	196.855.000,00	100,00%	130.000.000,00
5.1.4.05.59 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	676.400.000,00	326.200.000,00	48,23%	555.600.000,00
5.1.4.05.60 Hibah kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Madiun	1.389.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.61 Hibah kepada Perkumpulan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (PGPS)	151.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.7.05 Bantuan keuangan partai politik	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	0,00
TOTAL	16.845.547.000,00	12.638.153.671,53	75,02%	15.422.819.810,08

9.1.2.4. Pembayaran Bantuan Sosial

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pembayaran Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	15.001.277.870,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 . Perincian pengeluaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.4
Pembayaran Bantuan Sosial

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	15.001.277.870,00
Total	12.854.873.000,00	15.001.277.870,00

Perincian realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1.2.4.1
Pembayaran Bantuan Sosial

Bantuan Sosial	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
SKPKD				
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	9.095.284.000,00	6.732.010.000,00	74,02%	7.841.779.870,00
5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	11.670.224.000,00	6.036.763.000,00	51,73%	7.092.630.000,00
5.1.5.04 Bantuan Sosial yang tidak dapat di rencanakan	280.000.000,00	86.100.000,00	30,75%	66.868.000,00
Total	21.045.508.000,00	12.854.873.000,00	61,08%	15.001.277.870,00

9.1.2.5. Pembayaran Tidak terduga

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pembayaran Tidak Terduga	6.361.433.706,00	118.877.262,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perincian pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.6
Pembayaran Tidak Terduga

OPD	Uraian	Jumlah
Dinas Kesehatan		3.959.737.264,00
	belanja mamin	1.152.635.000,00
	belanja reagen rapid tes	2.160.327.264,00
	belanja upah	167.750.000,00
	belanja desinfektan	307.575.000,00
	belanja mamin	2.700.000,00
RSUD		1.646.174.990,00
	belanja mamin	187.570.000,00
	belanja desinfektan	23.750.000,00
	belanja pengadaan APD Gown Reuse dan balaclava	175.725.000,00
	belanja alat kebersihan	475.401.690,00
	belanja alat kesehatan	76.472.000,00
	belanja pengadaan bahan medis habis pakai	198.538.400,00
	belanja bahan pembersih	291.405.900,00
	belanja jasa konstruksi ruang tunggu physical distancing klinik	198.721.000,00
	belanja perencanaan dan pembangunan ruang tunggu physical distancing klinik	9.858.000,00

	belanja pengawasan pembangunan ruang tunggu physical distancing klinik	8.733.000,00	
BPBD			256.511.575,00
	belanja upah	24.000.000,00	
	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor /rumah tangga	65.967.200,00	
	belanja upah	58.141.375,00	
Dinas Sosial			26.250.000,00
	bantuan transport	26.250.000,00	
SKPKD	pengembalian bantuan keuangan terkait keg peringatan hari jadi ke 75 propinsi Jawa Timur	3.607.900,00	3.607.900,00
Dinas Kebudayaan			31.650.000,00
	penarikan kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah, uang sewa gedung wisma haji kota madiun	31.650.000,00	
Dinas Komunikasi dan Informasi			79.151.977,00
	belanja mamin	153.171.000,00	
	pengembalian belanja mamin	(3.732.723,00)	
	pengembalian btt dinas kominfo	(30.638.800,00)	
	pengembalian btt dinas kominfo	(39.647.500,00)	
Kecamatan Kartoharjo			123.600.000,00
	Belanja Upah	123.600.000,00	
Kecamatan Manguharjo			131.085.000,00
	Belanja Upah	131.085.000,00	
Kecamatan Taman			103.665.000,00
	Belanja Upah	103.665.000,00	
	Jumlah Total		6.361.433.706,00

9.1.2.6. Pembayaran Belanja Transfer

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pembayaran belanja transfer	0,00	651.920.000,00

Jumlah tersebut ada arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran belanja transfer untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 34 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Perincian arus kas keluar belanja transfer untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.7
Pembayaran Belanja Transfer

Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.7.05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00%	651.920.000,00
5.1.7.05.01 Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	0,00	0,00	0,00%	133.271.000,00
5.1.7.05.02 Belanja Bantuan kepada Partai PDIP	0,00	0,00	0,00%	133.697.000,00
5.1.7.05.03 Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	0,00	0,00	0,00%	81.228.000,00
5.1.7.05.04 Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	0,00	0,00	0,00%	66.496.000,00
5.1.7.05.05 Belanja Bantuan kepada Partai Nasdem	0,00	0,00	0,00%	43.858.000,00
5.1.7.05.06 Belanja Bantuan kepada Partai Golkar	0,00	0,00	0,00%	42.568.000,00
5.1.7.05.07 Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	0,00	0,00	0,00%	26.102.000,00
5.1.7.05.08 Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	0,00	0,00	0,00%	32.943.000,00
5.1.7.05.09 Belanja Bantuan kepada Partai Hanura	0,00	0,00	0,00%	27.936.000,00
5.1.7.05.10 Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	0,00	0,00	0,00%	19.713.000,00
5.1.7.05.11 Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0,00	0,00	0,00%	26.709.000,00
5.1.7.05.12 Belanja Bantuan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0,00	0,00	0,00%	17.399.000,00

9.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	236.167.468.562,96	253.671.529.226,65

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 9.1.3
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus kas masuk	1.059.785.795.640,59	1.094.367.497.996,59
Arus kas keluar	(823.619.327.077,63)	(840.695.968.769,94)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas operasi	236.166.468.562,96	253.671.529.226,65

9.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

9.2.1. ARUS KAS MASUK**9.2.1.1 Penjualan Aktiva Tetap**

Uraian	Pengeluaran 2020	Pengeluaran 2019
Penjualan Aktiva Tetap	127.997.499,00	0,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan bangunan dalam kondisi berdiri, eks SMPN 12 Madiun di jalan Jawa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

9.2.2. ARUS KAS KELUAR**9.2.2.1. Perolehan Modal Tanah**

Uraian	Pengeluaran 2020	Pengeluaran 2019
Perolehan Modal Tanah	1.972.500.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal Tanah untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Realisasi belanja modal Tanah APBD sebesar

Rp1.972.500.000,00 pada BPKAD berupa pembelian tanah seluas ±3.550 m² dari kepemilikan Hak Milik atas nama Bok Somoprawiro yang terletak di Jl. Manis Raya, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo. Pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembelian tanah dimaksudkan untuk kepentingan umum Pembangunan Rusunawa di Kota Madiun.

9.2.2.2.Perolehan Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	68.549.937.238,00	68.460.669.520,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.2
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00
5.2.3.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	1.007.500.000,00	933.680.000,00	92,67%	202.260.000,00
5.2.3.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	10.868.276.920,00	10.668.319.150,00	75,30%	9.432.965.880,00
5.2.3.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	77.150.000,00	0,00	00,00%	248.501.000,00
5.2.3.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	149.855.000,00	148.807.110,00	99,30%	345.850.330,00
5.2.3.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	50.696.922.256,00	49.803.401.068,00	98,24%	32.350.751.490,00
Belanja Modal Alat Kantor BOS	0,00	0,00	00,00%	1.271.763.615,00
5.2.3.02.06 Belanja Modal Peralatan Studio/ Komunikasi	210.200.000,00	205.850.000,00	97,93%	6.432.321.210,00
5.2.3.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	8.067.769.000,00	5.508.583.213,00	68,28%	16.184.556.695,00
5.2.3.02.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium	81.400.000,00	73.560.000,00	90,37%	27.321.300,00

5.2.3.02.10	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas	1.109.737.400,00	1.098.713.900,00	99,01%	1.964.378.000,00
-------------	--------------------------------------------------	------------------	------------------	--------	------------------

9.2.2.3. Perolehan Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Perolehan modal gedung dan bangunan	35.326.461.602,57	48.758.211.485,26

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.3
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26

9.2.2.4. Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan	80.833.932.839,00	184.022.541.935,80

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian perolehan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.4
Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5

5.2.3.04. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80
5.2.3.04.01 Belanja Jalan	53.246.289.636,60	50.972.703.200,00	95,73%	93.277.992.490,46
5.2.3.04.02 Belanja Modal Jembatan	60.000.000,00	46.760.000,00	77,93%	349.934.960,00
5.2.3.04.03 Belanja Modal Bangunan Air/ Irigasi	28.371.426.772,00	28.006.544.520,00	98,71%	87.906.475.705,00
5.2.3.04.04 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan	1.904.086.500,00	1.807.925.119,00	94,95%	2.474.475.705,00

9.2.2.5. Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Perolehan modal aset tetap lainnya	1.521.068.895,00	2.888.082.876,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.5
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.05. Belanja modal Aset Tetap lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	495.052.824,00
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan BOS	0,00	0,00	00,00%	2.393.030.052,00

9.2.2.6. Perolehan Modal Aset lainnya

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Perolehan modal aset lainnya	2.807.996.500,00	3.671.236.527,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas bos yang berasal dari perolehan modal aset lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian perolehan modal aset lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.6
Perolehan Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.06.01 Belanja modal Aset Lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00
5.2.3.06.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	903.315.500,00	699.109.490,00	77,39%	1.245.371.905,00
5.2.3.06.02 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud DED	1.200.000.000,00	972.025.040,00	81,00%	1.096.295.060,00
5.2.3.06.03 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Studi Kelayakan (FS)	650.000.000,00	647.132.000,00	99,56%	147.350.000,00
5.2.3.06.04 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rencana Induk/ Master Plan	145.000.250,00	139.930.000,00	96,50%	499.999.562,00
5.2.3.06.05 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Hasil Kajian	350.000.000,00	349.799.970,00	99,94%	682.220.000,00
Total	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

9.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(190.883.899.575,57)	(309.300.742.344,06)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus kas masuk	127.997.499,00	0,00
Arus kas keluar	191.011.897.074,57	309.300.742.344,06
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas investasi	(190.883.899.575,57)	(309.300.742.344,06)

9.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

9.3.1. ARUS KAS MASUK

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2020 dan tahun 2019, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

9.3.1.1. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.000.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

9.3.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.

9.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Desember2020	31 Desember 2019
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.000.000,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.3.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember2019
Arus kas masuk	1.000.000,00	0,00
Arus kas keluar	0,00	0,00
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.000.000,00	0,00

9.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

9.4.1. ARUS KAS MASUK

9.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Penerimaan2020	Penerimaan2019
Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK)	37.526.892.507,00	55.229.715.540,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Perincian penerimaan PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan PFK dan Sisa Uang Persediaan	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK)	37.526.892.507,00	55.229.715.540,00
Total	37.526.892.507,00	55.229.715.540,00

9.4.2. ARUS KAS KELUAR

9.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK)	37.575.884.248,00	55.274.987.799,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitoris yang berasal dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan Pengeluaran pihak ketiga (PFK) merupakan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan upahan di Dinas Pekerjaan Umum yang baru ditransfer ke rekening masing masing penerima honorarium tersebut di awal bulan Januari 2020.

Perincian pengeluaran PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.2.1
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran PFK dan Sisa Uang Persediaan	Pengeluaran2020	Pengeluaran2019
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	37.575.884.248,00	55.274.987.799,00
Sisa Uang Persediaan	0,00	0,00
Total	37.575.884.248,00	55.274.987.799,00

9.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember2019
Arusk kas bersih dari aktivitas transitoris	(48.991.741,00)	(45.272.259,00)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember2019
Arus kas masuk	37.526.892.507,00	55.229.715.540,00
Arus kas keluar	37.575.884.248,00	55.274.987.799,00
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas transitoris	(48.991.741,00)	(45.272.259,00)

9.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Perincian kenaikan (penurunan) kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.5
Kenaikan (Penurunan) Kas

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	236.166.468.562,96	253.671.529.226,65
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(190.883.899.575,57)	(309.300.742.344,06)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.000.000,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(48.991.741,00)	(45.272.259,00)
Jumlah kenaikan (penurunan) kas	45.234.577.246,39	(55.674.485.376,41)

9.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan saldo awal kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ditambah Saldo Kas Daerah dan saldo awal kas. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan.

Perincian saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 9.6
Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kenaikan (penurunan) bersih kas	45.234.577.246,36	(55.674.485.376,41)
Saldo awal kas daerah dan Saldo awal kas di bendahara pengeluaran	203.192.165.987,48	257.960.619.602,94
Saldo awal kas di BLUD Dinas Kesehatan	7.160.289.222,91	5.779.791.851,63
Saldo awal kas di BLUD RSUD	11.466.239.616,67	14.145.086.994,01
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan	2.117.000,00	7.068.400,00
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	96.484,46
Saldo awal Kas Lainnya BOS	1.828.801.486,75	1.386.163.098,18
Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	48.991.741,00	94.264.000,00
Jumlah saldo akhir kas	268.933.182.301,20	223.698.605.054,81



PENJELASAN POS-POS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1. Ekuitas Awal

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas awal	2.641.859.240.394,40	2.513.300.240.126,40

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019.

10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Surplus (Defisit) LO	78.615.893.163,18	126.958.335.648,12

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

10.3.3. Lain-lain

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Lain-lain	15.535.451.207,68	1.600.664.619,88

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi perubahan ekuitas secara langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Rincian ekuitas lain-lain Per OPD pada tanggal 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2019	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2020
Ekuitas lain-lain	1	4 = (1 + 2 - 3)
Dinas Pendidikan	665.523.588,26	-1.138.546.483,41
Dinas Kesehatan&KB	1.920.466.539,96	-16.728.069,00
RSUD	(844.878,30)	471.317.668,98
Dinas PU&TR	3.744.873.299,53	-38.813.050.524,19
DinasPerkim	(11.451,00)	774.688.632,00
DinasSatpol PP	8,00	-599.987,00
BPBD	(4,00)	9,00
Dinas Sosial	13.525.045,00	817.504,00
Dinas Tenaga Kerja	(3,00)	-1,69
DinasLingkungan Hidup	(1.704.889,81)	-386.344.905,49
Dispendukcapil	(34,00)	89.761.032,03
Dinas Perhubungan	2.225.949.240,28	-35.732.443,91
Dinas Infokom	2.179.999.326,96	-94.826.985,78
Dinas PM, PTSP, K&UM	13,17	499.980,99
DinasBudparpora	4,58	57.326.575.521,00
DinasPerpustakaan	(44,00)	(234.229.998,00)
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	(4,00)	0,00
Bagian Organisasi	(7,00)	-545.999,00
Bagian Umum	10,76	-817.595.731,77
Bagian Hukum	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	2,00	3,00
Bagian Adbang	(3,00)	(6,00)
Sekretariat DPRD	(2.188.340.408,70)	705.630.413,41
BKD	(1,00)	-11.151.048,10
BPKAD	1.057.433.014,98	710.118.792,63
BPKAD (SKPKD)	(6.606.321.089,15)	307.000,00
BAPENDA	2.572.936.989,54	-1.163.116.998,19
Inspektorat	18,00	13,10
BAPPEDA	(8,00)	43,04
Kec Kartoharjo	184.388.832,38	617.445,89

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Perubahan di tahun 2019	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2020
Kec Manguharjo	7.600.000,00	11,80
Kec Taman	(56.014,00)	3,38
Bakesbangpol	(2,00)	0,60
Dinas Pertanian&KP	147,345.982,00	-21,00
Dinas Perdagangan	28,00	-283.036.400,64
	1.600.664.619,88	15.535.451.207,68

Untuk perincian terkait penyajian lain-lain laporan perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini :

OPD	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
1	2	3	4	5 = 3 - 4
Dinas Pendidikan	Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	96,59	0,00	96,59
	Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	860.203.347,00	0,00	860.203.347,00
	Koreksi akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	73,00	0,00	73,00
	Mencatat mutasi aset tetap tanah antar SKPD Tahun 2020	0,00	47.370.000,00	(47.370.000,00)
	Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020	0,00	1.951.380.000,00	(1.951.380.000,00)
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Mencatat penghapusan aset tetap Peralatan dan mesin tahun 2020, karena doeble catat	0,00	857.143,00	(857.143,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin	0,00	3.999.864,00	(3.999.864,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan	0,00	12.381.047,00	(12.381.047,00)
	Koreksi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud tahun 2018	0,00	2,00	(2,00)
	Koreksi tambah beban penyisihan atas piutang lain-lain atas klaim BPJS Puskesmas Banjarejo bulan September-Desember 2020 sesuai verifikasi BPJS	678.050,00	0,00	678.050,00
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	12.381.047,00	0,00	12.381.047,00
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	191.543.787,00	(191.543.787,00)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	179.162.740,00	0,00	179.162.740,00
	Koreksi BPK kesalahan jurnal penyisihan piutang lain-lain tahun 2020	0,00	168.063,00	(168.063,00)
Rumah sakit Umum Daerah	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	77,84	0,00	77,84
	Koreksi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	3,00	0,00	3,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Penyisihan Piutang klaim BLUD (8) tahun 2020 (khusus SKPD penghasil)	279.307.987,14	0,00	279.307.987,14
	Mencatat mutasi aset Gedung dan Bangunan antar SKPD aset tetap tahun 2020	192.009.600,00	0,00	192.009.600,00
Dinas perumahan dan Pemukiman	Beban amortisasi aset tidak berwujud SKPD 2020	0,00	1,00	(1,00)
	Mutasi aset antar SKPD aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020	66.118.044,00	0,00	66.118.044,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	43,00	0,00	43,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	23,00	0,00	23,00
	Koreksi BPK pengakuan sisa persediaan SKPD berupa PJU dari dana APBD tahun 2020	0,00	936.888.217,00	(936.888.217,00)
	Koreksi BPK pengakuan sisa persediaan SKPD berupa PJU dari dana APBD tahun 2020	0,00	118.075.243,00	(118.075.243,00)
	Koreksi BPK pengakuan sisa persediaan SKPD berupa PJU dari dana APBD tahun 2020	0,00	22.893.767,00	(22.893.767,00)
	Koreksi BPK pengakuan sisa persediaan SKPD berupa PJU dari dana APBD tahun 2020	237.050.486,00	0,00	237.050.486,00
Satpol PP	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	1,00	(1,00)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	600.000,00	(600.000,00)
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	14,00	0,00	14,00
BPBD	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	5,00	0,00	5,00
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	3,00	0,00	3,00
Dinas Sosial, PPPA	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	4,00	0,00	4,00
	Mencatat mutasi aset peralatan mesin masuk dari OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020	817.500,00	0,00	817.500,00
Dinas Tenaga Kerja	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	2,69	(2,69)
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
Dinas Lingkungan Hidup	Penghapusan aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 atas aset yang diserahkan ke P2D Propinsi	0,00	68.398.032,00	(68.398.032,00)
	Mutasi antar OPD aset tetap Gedung dan bangunan tahun 2020 atas aset berupa laboratorium yang ada RSUD	0,00	192.009.600,00	(192.009.600,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020	30.577.756,00	0,00	30.577.756,00
	Mutasi aset tetap Peralatan dan mesin antar OPD tahun 2020	0,00	817.500,00	(817.500,00)
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	5,49	(5,49)
	Koreksi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	155.697.524,00	(155.697.524,00)
	Koreksi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 dari manual ke SIMDA	155.697.524,00	0,00	155.697.524,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Koreksi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	315.251.834,00	(315.251.834,00)
	Koreksi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 dari manual ke SIMDA	159.554.310,00	0,00	159.554.310,00
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	31,40	0,00	31,40
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	25.725.000,00	(25.725.000,00)
	Reklas aset tetap Peralatan dan mesin antar SKPD karena perubahan OPD tahun 2020	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	0,37	(0,37)
	Koreksi sisa persediaan habis pakai dari dana APBD tahun 2019	94.486.000,00	0,00	94.486.000,00
Dinas Perhubungan	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	3,00	0,00	3,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	6,09	0,00	6,09
	Koreksi beban amortisasi aset tidak berwujud SKPD 2020	2,00	0,00	2,00
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	156,00	(156,00)
	Saldo kas bendahara penerimaan yang telah disetor ke kas daerah pada awal Januari 2020 (khusus SKPD penghasil)	0,00	307.000,00	(307.000,00)
	Reklas aset tetap dan aset tidak berwujud peralatan dan mesin tahun 2020	0,00	35.425.299,00	(35.425.299,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	23,11	0,00	23,11
	Mutasi aset tetap gedung dan bangunan ke POLRESTA tahun 2020	0,00	169.901.800,00	(169.901.800,00)
	Pengakuan mutasi aset tetap tanah eks telecenter jalan MT Haryono tahun 2020	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Pengakuan mutasi aset tetap tanah eks telecenter jalan MT Haryono tahun 2020	6,00	0,00	6,00
	Mutasi aset tetap peralatan dan mesin ke POLRESTA tahun 2020	0,00	12.343.999,89	(12.343.999,89)
	Mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD dari Bagian Umum dan Dinas Perhubungan atas aset tetap tahun 2020	83.445.299,00	0,00	83.445.299,00
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	18.973.485,00	0,00	18.973.485,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Koreksi BPK atas kesalahan penjurnalan pengakuan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0,00	18.973.485,00	(18.973.485,00)
	Mutasi aset tetap gedung dan bangunan ke POLRESTA tahun 2020	169.901.800,00	0,00	169.901.800,00
	Mutasi aset tetap gedung dan bangunan antar OPD tahun 2020	0,00	73.916.800,00	(73.916.800,00)
	Mutasi aset tetap gedung dan bangunan antar OPD tahun 2020	7.455.285,00	0,00	7.455.285,00
	Koreksi BPK atas penghapusan aset gedung dan bangunan kapitalisasi	0,00	84.466.800,00	(84.466.800,00)
Dinas Penanaman Modal, PSP, Koperasi dan Usaha Mikro	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	19,01	19,01
	Koreksi BPK atas penyisihan piutang investasi dana bergulir tahun 2020	500.000,00	0,00	500.000,00
Dinas Kebudayaan, Pemuda, Pariwisata dan Olahraga	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Mencatat koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Mutasi aset antar SKPD berupa aset tetap tanah Stadion Wilis, Asrama Haji tahun 2020	22.031.681.600,00	0,00	22.031.681.600,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Mutasi aset antar SKPD berupa aset tetap gedung dan bangunan karena kewenangan berpindah dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas	35.294.893.919,00	0,00	35.294.893.919,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	413.570.000,00	(413.570.000,00)
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	1,00	(1,00)
	Mutasi aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD aset tetap tahun 2020	179.340.000,00	0,00	179.340.000,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	3,00	0,00	3,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	8.494.128.079,00	0,00	8.494.128.079,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	8.494.128.069,19	(8.494.128.069,19)
	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	50,00	(50,00)
	Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan SKPD tahun 2020	0,00	35.294.893.919,00	(35.294.893.919,00)
	Mutasi aset tetap tanah jalan saluran SKPD tahun 2020	11.636.423.525,00	0,00	11.636.423.525,00
	Mutasi aset tetap tanah jalan saluran SKPD tahun 2020	0,00	22.031.681.600,00	(22.031.681.600,00)
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	8.494.128.079,00	(8.494.128.079,00)
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	8.494.128.069,19	0,00	8.494.128.069,19
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	2,00	(2,00)
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	11,81	0,00	11,81
	Koreksi BPK atas penambahan beban dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	6.877.101.510,00	0,00	6.877.101.510,00
Walikota		0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Bagian Administrasi Pemerintahan		0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	545.999,00	(545.999,00)
Bagian Umum	Mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD aset tetap tahun 2020 dari Sekretariat Dewan dan Dinas Kominfo	453.445.210,00	0,00	453.445.210,00
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	1,00	(1,00)
	Mutasi aset tetap peralatan dan mesin ke OPD lain tahun 2020	0,00	1.271.040.940,77	(1.271.040.940,77)
Bagian Hukum		0,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	6,00	(6,00)
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	3,00	0,00	3,00
Sekretariat DPRD	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA koreksi ekuitas	0,00	13.304.447,65	(13.304.447,65)
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	487,35	0,00	487,35
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Reklas masuk aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD karena tukar mobil Dinas dari Bagian Umum tahun 2020	1.099.428.110,06	0,00	1.099.428.110,06
	Reklas keluar aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD karena tukar mobil Dinas dari Bagian Umum tahun 2020	0,00	453.788.810,00	(453.788.810,00)
	Reklas masuk aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD karena tukar mobil Dinas dari Bagian Umum tahun 2020	73.295.072,65	0,00	73.295.072,65
Badan Kepegawaian Daerah	Koreksi beban amortisasi aset tidak berwujud SKPD tahun 2020	1,00	0,00	1,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	11.151.050,00	(11.151.050,00)
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	0,90	0,00	0,90
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 dari manual ke SIMDA	11.151.050,00	0,00	11.151.050,00
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	16.895.530,00	(16.895.530,00)
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 dari manual ke SIMDA	5.744.480,00	0,00	5.744.480,00
BPKAD	Mutasi aset antar SKPD aset tetap tanah dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo tahun 2020	62.370.000,00	0,00	62.370.000,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	5,63	0,00	5,63
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	15.389.920,00	0,00	15.389.920,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,00	0,00	1,00
	Mutasi aset antar SKPD aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020	122.822.857,00	0,00	122.822.857,00
	Mutasi aset antar SKPD aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020	180.493.593,00	0,00	180.493.593,00
	Koreksi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020	464.500.820,00	0,00	464.500.820,00
	Koreksi aset tetap Jalan, irigasi dan Jaringan tahun 2020	84.641.596,00	0,00	84.641.596,00
	Koreksi BPK mencatat realisasi aset dari belanja barang dan jasa tahun 2020	0,00	180.493.593,00	(180.493.593,00)
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	15.389.920,00	(15.389.920,00)
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	15.389.920,00	0,00	15.389.920,00
	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan SKPD 2020 dari manual ke SIMDA	0,00	39.606.407,00	(39.606.407,00)
BPKAD SKPKD	Pembagian deviden BUMD tahun 2019 (khusus SKPKD) Penyertaan modal PDAM	0,00	9.528.495.105,60	(9.528.495.105,60)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Pembagian deviden BUMD tahun 2019 (khusus SKPKD) Penyertaan modal BPR Bank Daerah	0,00	1.981.010.164,00	(1.981.010.164,00)
	Pembagian deviden BUMD tahun 2019 (khusus SKPKD) Penyertaan modal PD Aneka Usaha	0,00	1.224.113.902,00	(1.224.113.902,00)
	Koreksi saldo awal karena transaksi tahun 2019 yang baru dieksekusi tahun 2020 atas pendapatan denda	81.864.580,00	0,00	81.864.580,00
	Mencatat pengakuan atas saldo kas bendahara penerimaan Dinas Perhubungan tahun 2019 dan	307.000,00	0,00	307.000,00
	Koreksi pengakuan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (penyertaan modal PDAM)	9.528.495.105,60	0,00	9.528.495.105,60
	Koreksi pengakuan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (penyertaan modal BPR Bank Daerah)	1.981.010.164,00	0,00	1.981.010.164,00
	Koreksi pengakuan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (penyertaan modal PD Aneka Usaha)	1.224.113.902,00	0,00	1.224.113.902,00
	Koreksi saldo awal karena transaksi tahun 2019 yang baru dieksekusi tahun 2020 atas pendapatan denda	0,00	81.864.580,00	(81.864.580,00)
Inspektorat	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	13,10	0,00	13,10
Bapenda	Penghapusan piutang Pajak Restoran daerah potensi wajib pajak selama tahun 2020	0,00	270.000,00	(270.000,00)
	Penghapusan piutang Pajak Reklame daerah potensi wajib pajak selama tahun 2020	0,00	14.943.000,00	(14.943.000,00)
	Penghapusan piutang Pajak Air Tanah daerah potensi wajib pajak selama tahun 2020	0,00	29.160,00	(29.160,00)
	Penghapusan piutang Pajak PBB potensi wajib pajak selama tahun 2020	0,00	1.550.090.511,00	(1.550.090.511,00)
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	5,69	(5,69)
	Penghapusan beban penyisihan piutang pajak sd 2019 (1) tahun 2020 (khusus SKPD penghasil)	402.215.678,50	0,00	402.215.678,50
Bappeda	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	45,04	0,00	45,04

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Koreksi beban amortisasi aset tidak berwujud SKPD 2020 berupa kamar mandi pilangbango	0,00	2,00	(2,00)
Kecamatan kartoharjo	Mutasi aset tetap akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dari OPD lain tahun 2020	0,00	16.401.525,00	(16.401.525,00)
	Mutasi aset tetap akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dari OPD lain tahun 2020	17.019.000,00	0,00	17.019.000,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	20,11	(20,11)
	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	9,00	(9,00)
Kecamatan Manguharjo	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	8,80	0,00	8,80
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	7,00	0,00	7,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	4,00	(4,00)
Kecamatan Taman	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	5,62	(5,62)
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	12,00	0,00	12,00
	Koreksi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	3,00	(3,00)
	Mutasi aset antar SKPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020	290.573.334,50	0,00	290.573.334,50
	Koreksi BPK mutasi aset dari realisasi belanja barang dan jasa dari kegiatan dana kelurahan tahun 2020	0,00	290.573.334,50	(290.573.334,50)
Badan KesBang dan Linmas	Koreksi akumulasi amortisasi tahun sebelumnya	0,00	1,00	(1,00)
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	1,60	0,00	1,60
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	12,00	(12,00)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	Koreksi Penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	6,00	(6,00)
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	3,00	(3,00)
Dinas Perdagangan	Penyisihan piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran sd 2020 tahun 2020 (khusus SKPD penghasil)	10.693.600,00	0,00	10.693.600,00
	Koreksi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 manual lebih besar dari SIMDA	5,36	0,00	5,36
	Beban amortisasi aset tidak berwujud SKPD 2020	1,00	0,00	1,00
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 manual lebih kecil dari SIMDA	0,00	293.730.007,00	(293.730.007,00)
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020	293.730.007,00	0,00	293.730.007,00
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020	0,00	536.796.747,00	(536.796.747,00)
	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020	243.066.740,00	0,00	243.066.740,00
		112.238.779.692,26	96.703.328.484,58	15.535.451.207,68

10.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas akhir	2.736.010.584.765,26	2.641.859.240.394,40

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.



INFORMASI NON KEUANGAN

11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN

11.1.1 Keadaan Geografis

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km² dan terletak pada koordinat 111⁰ sampai 112⁰ Bujur Timur dan 7⁰ sampai 8⁰ Lintang Selatan, yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

11.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2012 mencapai 172.421 jiwa terdiri atas 83.192 penduduk laki-laki dan 89.229 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km² di Kota Madiun sebesar 5.189 jiwa/km².

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 73.286 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km², sehingga kepadatannya 5.882 penduduk/km².

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 49.812 jiwa dan 49.323 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km² dan 10,73 km², maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 4.961 dan 4.597 penduduk/ km².

11.2 ORGANISASI

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 – 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8263 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 - 2024 terdiri dari:

- a. Pimpinan Eksekutif
 1. Walikota Madiun : Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd
 2. Wakil Walikota Madiun : Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB
- b. Pimpinan Legislatif
 1. Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH
 2. Wakil Ketua DPRD : Drs. Istono, M.Pd
 3. Wakil Ketua DPRD : Drs. H. Armaya

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
9. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ;
10. Dinas Lingkungan Hidup ;
11. Dinas Perhubungan ;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika ;

13. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro ;
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga ;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
16. Walikota/Wakil Walikota ;
17. Sekretariat Daerah ;
18. Sekretariat DPRD ;
19. Badan Kepegawaian Daerah ;
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
21. Badan Pendapatan Daerah ;
22. Inspektorat ;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
24. Kecamatan Kartoharjo ;
25. Kecamatan Manguharjo ;
26. Kecamatan Taman ;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
28. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
29. Dinas Perdagangan.

Pada tanggal 28 Desember 2017, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11.3 VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun telah memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk periode 2019-2024

11.3.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

11.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK**.

Tabel 11.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	
Pokok-Pokok Visi	Misi
Bersih Berwibawa	Misi ke- 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Misi ke- 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Sejahtera	Misi ke- 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misi ke- 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019-2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11.2
Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Misi	Isu Strategis
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
		Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
		Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif
2.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)
		Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		Percepatan Pengembangan Agro Industri

11.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

11.3.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**. Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pemerintahan yang baik
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 1.3	: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

11.3.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**. Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

11.3.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun

5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 1.1	: Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Sasaran 1.3	: Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan 2	: Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif
Sasaran 2.1	: Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi
Sasaran 2.2	: Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd